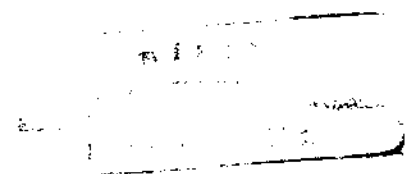


TESIS
KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK PRA-PEMILU

**(Studi Konflik PDI Perjuangan dengan
Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK di Kabupaten
Tabanan, Bali Menjelang Pemilu Legislatif 2004)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK PRA-PEMILU

(Studi Konflik PDI Perjuangan dengan
Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK di Kabupaten
Tabanan, Bali Menjelang Pemilu Legislatif 2004)

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Sosial
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

GPB Suka Arjawa

090415435-M

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Tanggal 24 Mei 2006


DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I



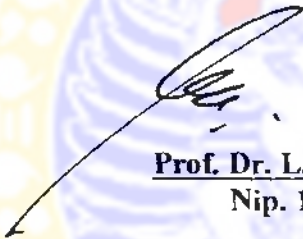
Drs Priyatmoko, MA.
Nip. 130937952

Pembimbing II



Drs. Wisnu Pramutanto, MSi
Nip. 131453124

**Mengetahui :
KPS Program Magister**



Prof. Dr. L. Dyson P., M.A
Nip. 130937724

Telah diuji pada

Tanggal 24 Mei 2006

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Drs. Musta'in, M.Si.

Anggota : 1. Drs. Priyatmoko, MA.

2. Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si.

3. Drs. I. Basis Susilo, MA.

4. Drs. Kris Nugroho, MA.

5. Dra. Siti Aminah, MA.



UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis merasa bersyukur kepada Tuhan Yang maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas selesainya tesis tentang konflik partai politik ini. Tulisan ini membahas tentang beberapa dimensi penyebab konflik serta upaya untuk menyelesaikan konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum legislatif 2004. Bagaimanapun dalam pandangan penulis, masalah ini penting untuk ditelusuri sebab di jaman pembaruan ini, masih banyak yang belum memahami bagaimana berpolitik dan memaknai demokrasi itu. Ketika masyarakat diberikan kebebasan berdemokrasi, tiba-tiba muncul eksekutif samping berupa kekerasan yang justru menimbulkan ketakutan kepada masyarakat.

Menelusuri jejak konflik di kabupaten Tabanan, cukup merupakan pekerjaan yang memerlukan tantangan. Setidaknya ketika beberapa masyarakat yang merasa curiga dengan kehadiran penulis manakala misalnya datang ke sebuah desa untuk mencari informasi. Ketakutan mereka tidak bisa disalahkan karena pengalaman-pengalaman yang telah dialami sebelumnya.

Karena itu, ketika penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini, sekali lagi rasa syukur itu nampaknya pantas diutarakan. Tulisan ini tentu belum sempurna karena itu penulis dengan sukarela menerima kritik yang sifatnya membangun. Kendati demikian, tidak bisa pula dilepaskan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mempunyai andil dalam penyelesaian tulisan ini.

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hotman Siahaan, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.
2. Kepada Bapak. Prof. Dr. L. Dyson P., M.A., baik selaku ketua program magister Ilmu Sosial Unair maupun pribadi, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih. Beliau telah memberikan kemudahan yang demikian besar sehingga memperlancar studi penulis di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
3. Terima kasih kepada Bapak Drs. Priyatmoko, M.A., selaku pembimbing I. Beliau sangat sabar dalam memberikan bimbingan. Juga kepada Bapak Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si. selaku pembimbing II. Pak Wisnu berhasil membuka wawasan penulis dalam menelusuri alur konflik-konflik di kabupaten Tabanan. Sekali lagi terima kasih.
4. Segenap staf pengajar Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Sosial Universitas Airlangga.
5. Seluruh teman-teman peserta S2 Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Airlangga angkatan 2004.
6. Dewa Made beserta Mbak Tut Rumini serta Adik Ketut atas “pinjaman” rumahnya selama di Surabaya. Dewa Made dan Mbak Tut Rumini begitu banyak membantu saya dalam studi, baik S1 maupun S2. Terima kasih banyak.
7. Dua orang yang menempati posisi spesial dalam hidup saya, istri Mas Jayantiari yang dengan rela memberikan peluang bagi saya untuk tinggal di Surabaya serta pemberi inspirasi-semangat Putri Indria Saraswati, putri kami tersayang, yang

sering manghibur dari jarak jauh. Tentu saja juga Ibu kandung saya, Gusti Ayu Nyoman Karniati.

8. Aji, Ajitu, Uwa, Ajin Dewa Gede dan Ibu Bidan meski mereka telah almarhum, tetapi tetap memberikan semangat untuk meraih cita-cita. Beliau berlima tidak habis-habisnya memberi dan menjadi inspirasi penulis untuk terus bergerak dan bergerak....dalam mengisi hidup ini.
9. Tidak bisa dilepaskan para asisten keluarga kami: Tina, Ketut Paing, Kadek Samsam, Kadek Ami, Komang Buleleng termasuk Kadek Sul yang secara bergantian maupun berpasangan membantu keluarga kami di rumah selama saya di Surabaya. Peran mereka cukup besar. Mereka telah membantu terutama dalam menjaga dan membantu keluarga di rumah sehingga saya bisa merasa lebih aman di saat-saat meninggalkan keluarga untuk studi di Surabaya.
10. Para responden serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat.

GPB Suka Arjawa.

RINGKASAN

Oleh : GPB Suka Arjawa

Konflik antar partai politik yang terjadi di kabupaten Tabanan, Bali, cukup mengkhawatirkan masyarakat. Hal ini dikarenakan konflik tersebut terjadi menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004. Masyarakat mengkhawatirkan munculnya lagi kerusuhan besar seperti penghadangan mobil, penghancuran bangunan pemerintah serta penebangan pohon seperti yang pernah terjadi tahun 1999 ketika Megawati Sukarnoputri gagal menjadi Presiden Indonesia.

Pada hakekatnya, konflik antar partai politik itu terjadi melibatkan PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK (Partai Nasionalis Benteng Kemerdekaan), yang merupakan empat partai paling berpengaruh di kabupaten Tabanan. Konflik itu terjadi karena di satu sisi ada upaya partai politik untuk mencoba mengkonsolidasi diri dan pada sisi lain memandang konsolidasi itu sebagai ancaman eksternal yang bisa mengancam eksistensi partainya. Sebagai partai yang baru ikut kampanye di Kabupaten Tabanan, PNI Marhaenisme dan PNBK memang aktif melakukan konsolidasi diri. Sedangkan Partai Golkar berupaya memperbaiki citranya di masa lalu dan mencoba meraih dukungannya kembali. Upaya-upaya itulah yang dipandang PDI Perjuangan sebagai pengancam eksistensinya sehingga kemudian partai ini berupaya menghalangi konsolidasi tersebut. Hal inilah kemudian yang menimbulkan konflik.

Secara garis besar, konflik ini disebabkan oleh adanya pandangan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh partai itu menjadi ancaman bagi keberadaan dirinya, apalagi PNI Marhaenisme dan PNBK mempunyai ideologi yang mirip dengan PDI Perjuangan. Konflik dengan Partai Golkar lebih banyak disebabkan oleh adanya kekecewaan dengan janji-janji masa lalu ketika Orde baru berkuasa. Tetapi meletusnya konflik ini tidak bisa pula dilepaskan oleh adanya budaya kekerasan, upaya menguasai posisi penting dan ketidakmampuan pemerintah dan elit partai dalam menguasai massa.

Kekhawatiran masyarakat Tabanan pada akhirnya tidak menjadi kenyataan karena konflik tersebut bisa dihindari. Suasana pemilu legislatif 2004 maupun masa minggu tenangnya berlangsung dengan aman.

Pendekatan banyak jalur (multitrack), konsensus dan kompromis merupakan upaya yang dilakukan berbagai pihak di kabupaten Tabanan untuk menghindari pecahnya konflik yang lebih besar. Melalui pendekatan tersebut dengan memakai teknik seperti konsiliasi, mediasi serta pendidikan politik, konflik yang lebih besar akhirnya bisa dicapai sehingga pemilu bisa berlangsung dengan aman dan lancar.

SUMMARY

By: GPB Suka Arjawa

Conflicts among political parties in the Tabanan Regency, South Bali, had been a concern of the people in the regency. The conflict took place before 2004 general election to vote for the member of the legislative body. People of Tabanan were most concerned about the mass riots including cars obstruction acts, destructions of the governments' buildings and indiscriminately trees cutting during the 1999 general election, which could not bring Megawati into power.

The problems involved the four major and most influential political parties in Tabanan: PDIP, Golkar, PNI Marhaenisme and PNBK. The trouble was the results of different views on how the party should be internally managed by consolidating measures. In the one hand the idea was seen as positive for a sustainable policy of the parties, on the other hand some members of the parties perceived it as a threat for the existence of the party themselves. As a new party for the Tabanan regency, PNI Marhaenisme and PNBK were active players in seeking internal cohesiveness. At the same time, Golkar tried itself to re-gain a positive image while seeking new supporters. These developments were seen by PDIP as a threat to its existence as a well-established political party in Tabanan regency. PDIP tried to restrain the consolidating measures and thus, this turned into an open conflict.

There were two important reasons led to the problems: external threat perception from the PDIP and ideological similarities among the parties involved. The failure of the parties' leaders to control their masses, disappointment of unfulfilled old promises and the culture of violence were contributed to the development of the dispute. However the unrest did not finally break thanks to conflict prevention measures that employed multi-tracked resolutions with consensus and conciliatory approaches.

ABSTRAK

Oleh : GPB Suka Arjawa

Konflik antar partai politik ini terjadi menjelang pemilu legislatif 2004, di Tabanan, sebuah kabupaten yang ada di bagian selatan Pulau Bali, antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme, dan PNBK. Sebaran peritiwanya boleh dikatakan merata karena hampir di setiap kecamatan pecah konflik, meskipun tidak semuanya mempunyai intensitas kualitas konflik yang sama. Intensitas paling besar terjadi di kota Tabanan, Banjar Bongan Lebah, Tunjuk, Tegalinggah serta Abiantuwung.

Seluruh konflik itu, terjadi hampir dalam rentang waktu setahun. Hal itulah yang membuat masyarakat Tabanan khawatir mengingat tahun 1998 di Singaraja terjadi peristiwa yang sama dengan korban jiwa. Setahun kemudian di Tabanan terjadi kerusuhan massa akibat gagalnya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden.

Setelah dianalisis, konflik ini disebabkan oleh karena adanya persepsi ancaman luar dari PDI Perjuangan disamping juga adanya kemiripan ideologis antara partai-partai yang terlibat konflik tersebut. Perlu juga dilihat bahwa kegagalan negara serta elit partai dalam mengontrol massa, kekecewaan terhadap janji-janji masa lalu serta elemen kekerasan ikut memicu konflik ini terjadi.

Pada akhirnya kekhawatiran masyarakat ini tidak terwujud karena adanya upaya resolusi multitrack dari berbagai komponen yang ada dengan pendekatan konsensus dan kompromis.

Kata kunci: Konflik, Ancaman Eksternal, Resolusi Multitrack.

ABSTRACT

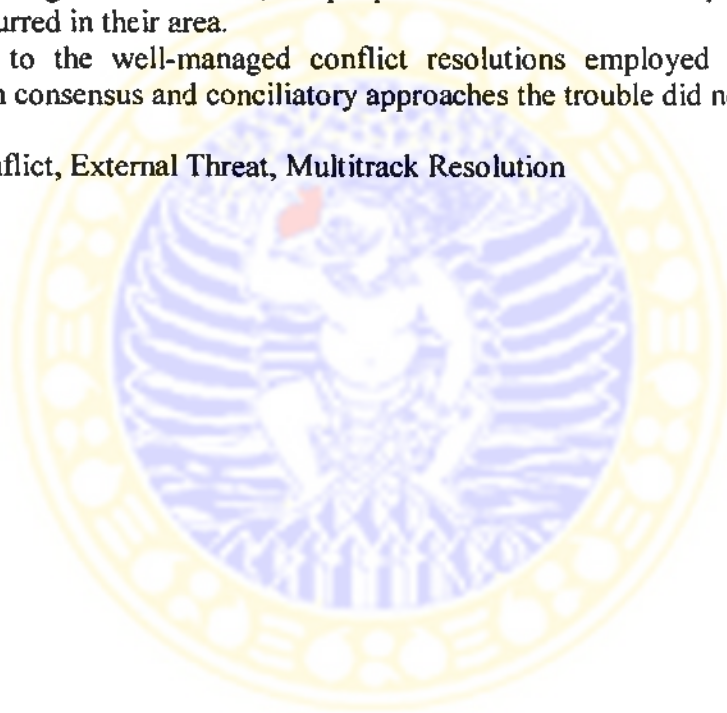
By: GPB Suka Arjawa

Conflicts among four major and influential parties: PDIP, Golkar, PNI Marhaenisme and PNBK occurred prior to 2004 legislative general election in Tabanan, South Bali. The tensions was spread around districts in Tabanan with various level of intensity, but the most serious one happened in Tabanan, particularly in sub-districts of Banjar Bongan Lebah, Tunjuk, Tegalinggah and Abiantuwung.

With duration less than a year prior to the 2004 legislative general election the conflict broke resulted in anxiety among the Tabanan people. Based on the 1998 Singaraja incidents and the failure of Megawati to become the fourth Indonesian president that brought into violence, the people of Tabanan did not expect some kind of hostility occurred in their area.

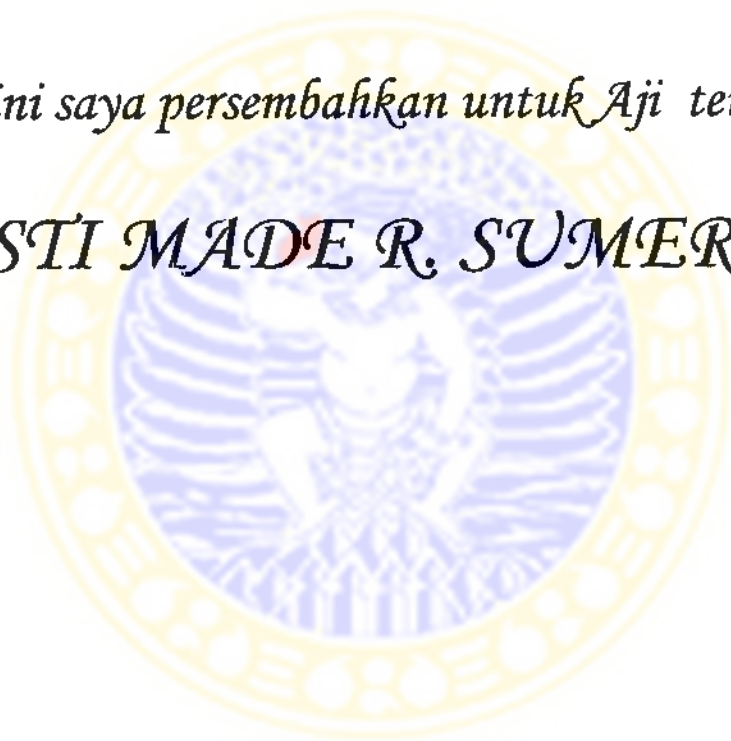
Thanks to the well-managed conflict resolutions employed multi-tracked resolutions with consensus and conciliatory approaches the trouble did not take place.

Keywords: Conflict, External Threat, Multitrack Resolution



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Aji terkasih;
I GUSTI MADE R. SUMERTHA



DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Prasyarat Gelar	ii
Persetujuan	iii
Penetapan Panitia.....	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	viii
Summary	ix
Abstrak	x
Persembahan	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
BAB 2. LANDASAN TEORITIS.....	11
2.1. Teori-Teori tentang Pemicu Konflik.....	11
2.2. Teori tentang Penyelesaian Konflik.....	16
BAB 3. METODOLOGI.....	25
3.1. Konseptualisasi.....	25
3.2. Jenis Penelitian	29
3.3. Subyek Penelitian	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Teknik Analisa Data	35
BAB 4. TINJAUAN UMUM DAN GAMBARAN KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN	37
4.1. Adat dan Budaya.....	40
4.2. Politik	42
4.2.1. Masa Orde Lama.....	42
4.2.2. Masa Orde Baru.....	46
4.2.3. Masa Reformasi	48
4.3. Kasus Konflik antar Partai Politik	54
4.3.1. Konflik PDI Perjuangan dengan Partai Golkar	54
4.3.2. Konflik PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme.....	57
4.3.3. Konflik PDI Perjuangan dengan PNBK.....	58
4.4. Lokasi Konflik paling Menonjol	59
4.4.1. Desa Tunjuk	59
4.4.2. Desa Abiantuwung	60
4.4.3. Desa Bonggan	62
4.4.4. Desa Tegalinggah	63

BAB 5. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN	65
5.1. Politis	65
5.1.1. Persepsi Ancaman Eksternal	65
5.1.2. Kemiripan Ideologis.....	74
5.1.3. Kegagalan Negara dan Elit Partai Mengontrol Massa.....	76
5.2. Ekonomi Sosial.....	82
5.2.1. Deprivasi Relatif.....	83
5.2.2. Upaya Menguasai Posisi Langka.....	85
5.3. Budaya	87
5.3.1. Budaya Kekerasan	87
5.3.2. Budaya Simbolik	91
BAB 6. PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN MENJELANG PEMILU LEGISLATIF 2004	94
6.1. Resolusi <i>Multitrack</i>	94
6.1.1. Peran Elit Lokal	95
6.1.2. Peranan Lembaga Adat dan Dinas	102
6.1.3. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Partai Politik.....	110
6.2. Penyelesaian Melalui Upaya Formal	115
6.3. Upaya Pendidikan Politik.....	121
BAB 7. KESIMPULAN.....	127
Hal yang direkomendasikan	132
Penelitian di Depan.....	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tumbangnya kekuatan Orde Baru pada 21 Mei 1998, memberikan warna baru bagi kehidupan politik di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Pergantian rejim itu diikuti dengan harapan besar untuk memberlakukan pemerintahan demokratis yang sesungguhnya di Indonesia. Pemerintahan demokratis itu dipersepsikan sebagai pemerintah yang dipilih oleh rakyat, sesuai dengan kehendak rakyat berdasarkan kebebasan memilih. Hal demikian pula dipersepsikan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu antisipasi untuk membentuk pemerintahan demokratis itu adalah dengan munculnya kebebasan membentuk partai politik. Sebab, partai politik yang independen, tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah, akan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat secara baik. Undang Undang No 2 tahun 1999 tentang Partai Politik (sebelum kemudian diubah menjadi UU. No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik) akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang memberikan jaminan pembentukan partai politik. Salah satu isi dari undang-undang itu adalah bahwa partai politik bisa dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun. Setidaknya setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, terbentuk 141 partai politik di Indonesia. Setelah melalui verifikasi, terdapat 48 partai yang diperbolehkan ikut dalam pemilu pertama di masa reformasi tahun 1999. PDI Perjuangan akhirnya mendapatkan suara

terbanyak, yakni 35.689.073 suara atau 33,74%, yang disusul oleh Partai Golkar dengan 23.741.749 suara atau 22,44% (Suroto, 2003: 184).

Namun demikian, perwujudan pemerintahan demokratis dengan indikator multipartai itu dalam perjalanannya ternyata tidak berlangsung mulus sesuai dengan keinginan reformasi. Banyak konflik partai terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Di pusat, pada tingkat kelembagaan, salah satu konflik partai politik ini terlihat dengan terbentuknya Poros Tengah di MPR yang merupakan gabungan antara partai-partai Islam dengan Partai Golkar dan kemudian berhasil menggagalkan Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sebagai presiden dan memilih Abdurrahman Wahid tahun 1999.

Di daerah konflik tersebut lebih verbal dalam bentuk kekerasan. Di Bali, ketidakpuasan pendukung Megawati atas kegagalannya sebagai presiden diwujudkan dengan amuk massa. Tanggal 21 Oktober 1999, ketidakpuasan ini dimulai dengan pembakaran ban-ban bekas di jalan raya di Denpasar. Tetapi kemudian meluas menjadi destruktif dalam bentuk pembakaran dan merobohkan gedung. Di Denpasar, kompleks perkantoran Pemda Badung yang ada di Lumintang, semuanya dihancurkan massa. Kejadian ini tidak hanya terjadi di kota Denpasar tetapi juga melanda daerah-daerah lain di Bali. Beberapa gedung utama pemerintahan di Kabupaten Tabanan, Buleleng serta Jembrana roboh dihancurkan massa. Jalur lalu lintas Denpasar-Gilimanuk yang merupakan lintas utama di Pulau Bali, macet total karena sebagian besar infrastruktur jalan seperti pembatas jalan dan pohon-pohon yang berada di pinggir jalan dirobohkan ke jalan sehingga merintanginya lalu lintas.

Meski kerusuhan itu kemudian berhenti setelah Megawati berhasil terpilih menjadi wakil presiden dan cukup membuat marah pendukung PDI Perjuangan mereda, tetapi kecurigaan akan persekongkolan ini terus berlanjut dan menimbulkan konflik antar partai, terutama PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Hal itu bahkan tetap kelihatan meskipun tahun 2001 akhirnya Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Konflik-konflik dalam skala lebih kecil terjadi sampai dengan menjelang dilangsungkannya Pemilu legislatif tahun 2004. Untuk memperlihatkan dominasi keunggulan partainya di Bali, banyak simpatisan PDI Perjuangan memasang bendera partai di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis, tanpa bisa dicegah oleh aparat keamanan maupun elit partai. Pemasangan atribut partai yang dilakukan tidak menjelang pemilu ini merupakan ungkapan politis yang ingin memberikan pesan tentang keunggulan partainya.

Kondisi inilah kemudian yang membuat gesekan-gesekan partai itu bertambah dan membuat perasaan masyarakat semakin khawatir. Di kabupaten Tabanan konflik antar partai itu, terjadi tidak saja antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar sebagai dua kekuatan yang paling bersaing tetapi juga antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain yang ikut menjadi kontestan pemilu legislatif. Di Kabupaten ini terdapat 24 partai yang ikut pemilihan umum legislatif tetapi yang paling banyak mendapatkan simpati adalah partai-partai yang mempunyai keterkaitan dengan nama Soekarno seperti misalnya PNI Marhanisme atau PNBK serta partai yang masih mempunyai kaitan dengan Orde Baru (Partai Karya Peduli Bangsa atau Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia). Partai-partai baru yang muncul setelah reformasi di luar yang berkaitan dengan dua tema diatas, relatif kecil pendukungnya meskipun

tercatat Partai Demokrat juga berhasil meraih simpati. Karena itu konflik yang terjadi adalah antara PDI Perjuangan dengan partai-partai seperti yang disebutkan diatas.

Diantara peristiwa tersebut, konflik yang paling besar terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Ini misalnya meletus pada saat partai Golkar merayakan ulang tahunnya yang ke-39 di Bali. Tanggal 25 Oktober 2003 rombongan simpatisan Partai Golkar Tabanan yang hendak melakukan perayaan ulang tahun di Padang Galak, Denpasar dihadang oleh simpatisan PDI Perjuangan di kota Tabanan. Peristiwa ini membuat rombongan yang berasal dari Kecamatan Kerambitan itu, mengalami kekacauan dan beberapa orang simpatisannya terluka berat. Konflik antara dua partai ini, sebelumnya juga pernah terjadi tetapi dalam skala yang lebih kecil. Misalnya pada bulan Agustus tahun yang sama, seorang simpatisan PDI Perjuangan mendapat ancaman dari simpatisan Partai Golkar di desa Tunjuk, kecamatan Tabanan. Akibatnya dalam beberapa hari kemudian, muncul tindakan balasan dari pihak PDI Perjuangan.

Simpatisan PDI Perjuangan juga terlibat konflik dengan simpatisan partai lain, di luar Golkar. Yang cukup memperhatikan terjadi dengan PNI Marhaenisme di Desa Bongan Lebah, ketika puluhan simpatisan PDI Perjuangan mencabuti, merusak papan nama sekretariat partai tersebut dan juga mengepung rumah tokoh-tokoh PNI Marhaenisme. Di Dusun Tegalinggah Kaja, Kecamatan Penebel simpatisan PDI Perjuangan merusak tempat sembahyang dan dapur milik simpatisan PNBK.

Kejadian bentrokan antar partai ini ternyata tetap berlangsung sampai saat kampanye pemilu legislatif bulan Maret 2004. Konflik itu, tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi marak juga di pedesaan, bahkan yang jaraknya cukup jauh dari kota

Tabanan. Pada tanggal 12 Maret 2004, pukul 06.00 Wita terjadi pencabutan sebuah bendera Partai Golkar dan bendera partai PNI Marhaenisme yang terpasang di jalanan umum Desa Sanda. Pelaku dari pencabutan itu, teridentifikasi dari massa PDI Perjuangan yang berasal dari Kecamatan Pupuan. Massa PDI Perjuangan dari Pupuan ini berangkat menuju kota Gianyar untuk melakukan kampanye. Jarak antara Pupuan dengan kota Gianyar kurang lebih 90 kilometer. Ketika lewat di jalanan Desa Sanda itulah bendera-bendera partai yang bukan identitas mereka dicabuti. Pengrusakan terhadap rumah simpatisan partai juga terjadi pada masa kampanye ini.

Studi terdahulu tentang konflik antar partai yang melibatkan PDI Perjuangan dan Partai Golkar, pernah dilakukan oleh Putra Agung (2001). Konflik tersebut terjadi pada tahun 1998 di Singaraja, yang menewaskan enam orang. Studi ini lebih menekankan pada latar belakang munculnya konflik. Dalam catatan akhirnya disebutkan bahwa peristiwa itu disebabkan oleh akumulasi emosional tekanan-tekanan yang terjadi pada jaman Orde Baru yang kemudian pecah pada masa reformasi. Sejak tahun 1971 ada upaya-upaya untuk memaksakan agar masyarakat Buleleng (Singaraja) masuk Golkar secara bersama-sama. Seperti juga di daerah lain di Bali, pemaksaan politik yang terjadi di Singaraja ini cukup berhasil. Ketika kemudian Orde Baru jatuh terjadilah benturan antara dua pihak, yakni pihak yang ingin tetap mempertahankan dominasi Golkar dan pihak yang menuntut pembaruan melalui PDI Perjuangan. Inilah yang memunculkan konflik yang mengakibatkan korban jiwa tersebut.

Dalam pandangan Putra Agung, disamping karena adanya benturan tersebut, munculnya konflik juga diperparah oleh lemahnya pihak keamanan dalam

menegakkan supremasi hukum. Karena itu dalam pandangannya sebagai jalan keluar, upaya yang mesti dilakukan adalah dengan membangkitkan kesadaran masyarakat kepada paham kebangsaan yang dimulai dari tingkat lokal, yaitu desa sampai pada tingkat nasional (Agung, 2001: 88). Studi lain dari kasus konflik antar partai di Singaraja ini dilakukan oleh Rideng (2004) yang menekankan bahwa konflik yang terjadi itu disebabkan lebih oleh faktor sentimen akibat dari perbedaan partai politik.

Studi tentang konflik antar partai juga dilakukan oleh Yanuati (2001) dalam konflik PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di Pekalongan. Dalam kasus yang terjadi bulan April 1999 antara dua partai itu para simpatisan partai saling menghancurkan rumah dan bangunan masing-masing pihak. Sehingga bentrokan yang berlangsung dalam selang tiga hari itu menghancurkan belasan rumah termasuk penjarahan toko-toko. Bentrokan antara dua simpatisan partai ini dipicu oleh pidato salah seorang tokoh PPP yang dinilai menyinggung tokoh PKB dalam sebuah acara syukuran yang kebetulan disiarkan secara langsung oleh stasiun radio setempat.

Oleh Yanuati disebutkan bahwa konflik itu terjadi disebabkan oleh adanya politisasi agama, persaingan antara tokoh-tokoh agama dalam memperebutkan pengaruh di masyarakat serta persepsi dari masyarakat terhadap politik itu sendiri. Dalam konteks sejarah, pertikaian antara PKB dengan PPP tidak bisa dilepaskan dari warisan masa lalu dimana setelah Orde Baru dan terjadinya fusi antar partai politik, kekuatan NU bergabung dengan PPP (Sulistyo, 2001: 140-155)

Penelitian tentang konflik antar partai politik yang dilakukan di kabupaten Tabanan dalam tulisan ini, yakni PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme, dan PNBK lebih menekankan pada situasi menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.

Setelah peristiwa konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Singaraja tahun 1998 serta amuk massa tanggal 21 Oktober 1999, masyarakat Tabanan terlihat traumatis dengan peristiwa-peristiwa politik. Wujud traumatis itu terlihat misalnya dari warung-warung yang segera ditutup jika ada rombongan massa partai yang melintas. Disamping itu dalam rentang waktu setahun sebelum pemilihan umum legislatif 2004, konflik antar massa partai politik sering terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Tabanan. Konflik antar partai politik ini terjadi di seluruh kecamatan yang ada. Peristiwa demikian semakin membuat cemas masyarakat Tabanan akan kelangsungan pemilu 2004 di kabupaten ini.

Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 atau 1999, kabupaten-kabupaten lain di Bali yang saat itu dilanda konflik partai, menjelang pemilu legislatif ini tidak dijumpai banyak terjadi peristiwa kekerasan seperti itu. Di Tabanan dalam catatan pihak Kepolisian Resort Tabanan, justru terjadi banyak kasus kekerasan antar partai politik. Kekerasan politik itu tidak hanya terjadi di satu wilayah kecamatan tertentu tetapi menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Hal itulah yang membuat kekhawatiran masyarakat Tabanan bertambah besar berseiring dengan dekatnya pelaksanaan pemilu.

Namun demikian, kenyataan kemudian memperlihatkan kekhawatiran masyarakat itu tidak sampai terjadi. Masa minggu tenang lewat tanpa ada gangguan

1.3. Manfaat Penelitian

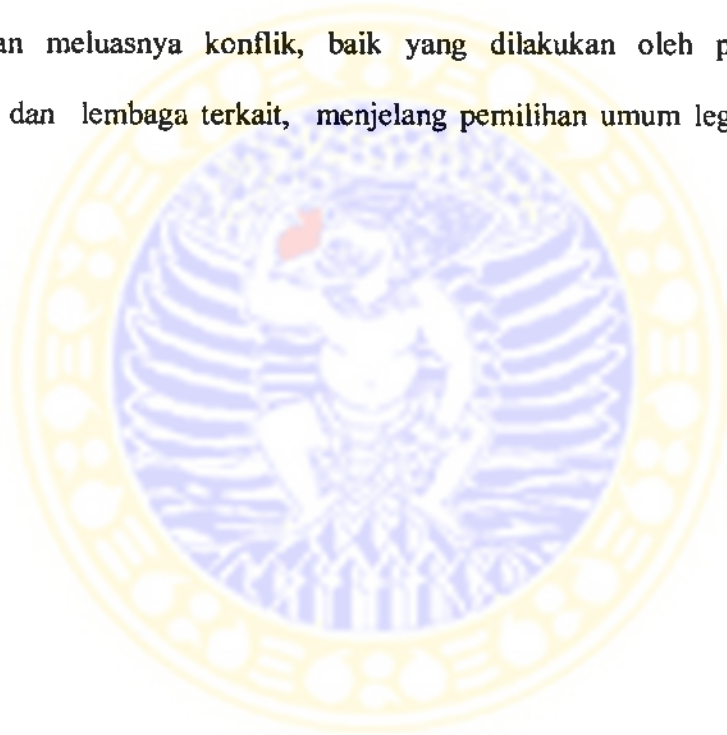
Penelitian, terutama yang dipublikasikan kepada publik, baik dalam bentuk buku, disumbangkan kepada perpustakaan umum atau melalui diskusi-diskusi publik, kolektif maupun kelompok, akan memberikan manfaat tertentu. Dalam konteks demikian ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- 1). Memberikan sumbangan teoritik kepada ilmu pengetahuan, khususnya teori mengenai konflik antar partai di kabupaten Tabanan, yang bisa dimanfaatkan baik secara sosial-politik maupun akademis.
- 2). Memberikan informasi kepada masyarakat, Tabanan khususnya, tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik antar partai politik sekaligus juga memberikan masukan tambahan kepada lembaga-lembaga terkait.
- 3). Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pola-pola konflik politik (antar partai) yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.
- 4). Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di kabupaten Tabanan tentang kondisi-kondisi yang mampu menciptakan konflik antar partai.
- 5). Di masa depan, berupaya memberikan inspirasi demi tumbuhnya lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang mampu memberikan pendidikan politik, guna mencegah konflik politik di tingkat akar rumput.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, disamping memberikan informasi kepada masyarakat tentang fenomena konflik antar partai di kabupaten Tabanan, secara khusus adalah:

- 1). Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya konflik antar partai politik tersebut.
- 2). Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah melebar dan meluasnya konflik, baik yang dilakukan oleh partai politik, masyarakat dan lembaga terkait, menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2004.



BAB 2

LANDASAN TEORITIS

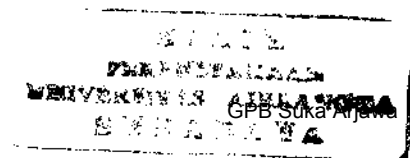
Untuk membantu menjelaskan fenomena konflik politik menjelang pemilu legislatif 2004 yang terjadi di Kabupaten Tabanan, pada bagian ini dibahas beberapa teori pendukung. Pembahasannya dimulai dengan teori-teori yang mampu menjelaskan tentang sebab-sebab yang memicu munculnya konflik partai politik, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teori yang menjelaskan bagaimana konflik itu bisa ditanggulangi, diredam atau diselesaikan.

2.1. Teori-Teori tentang Pemicu Konflik.

Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan fenomena terjadinya konflik politik. Pada perangkat kolektif, Maurice Duverger menyebutkan bahwa konflik muncul sebagai akibat adanya persepsi ancaman dari luar kelompok. Adanya tekanan dari pihak lain yang membuat sebuah kelompok terancam eksistensinya dapat membuat kelompok yang merasa terancam ini untuk membela diri dan terlibat konflik dengan kelompok yang dipandang mengancam. Perasaan terancam ini bisa disebabkan oleh karena adanya keinginan kelompok tertentu untuk memajukan dan memperbaiki posisinya dalam masyarakat. Keinginan ini menimbulkan reaksi dari kelompok lain yang merasa terganggu dengan upaya konsolidasi tadi, sehingga bisa menimbulkan konflik antar kelompok (diolah dari Rauf, 2001: 50).

Sedangkan pada kelompok-kelompok horizontal, penyebab konflik bisa dimunculkan oleh perbedaan ideologi. Pemahaman terhadap ideologi itu, mengandung nilai-nilai normatif yang dipercaya sebagai kebenaran yang harus dipatuhi dan dipercaya sepenuhnya. Solidaritas muncul sebagai akibat dari kepercayaan terhadap norma ini. Sebaliknya, setiap kelompok ideologi memusuhi kelompok ideologi lain yang dipandang menganut ideologi yang salah. Partai politik, mempunyai ideologi-ideologi tertentu. Partai-partai dengan ideologi berbeda terlibat di dalam konflik politik karena masing-masing ingin memiliki kekuasaan politik dan duduk sebagai penguasa politik agar supaya bisa mewujudkan nilai-nilai dan mekanisme politik yang dianut oleh ideologinya (Rauf, 2001: 52-53). Namun demikian dalam menjelaskan konflik politik di Kabupaten Tabanan, fenomena yang nampak, konflik-konflik itu muncul justru karena ada kemiripan ideologi. Anthony Downs mengatakan bahwa konflik antar partai politik akan bisa terjadi di suatu daerah apabila daerah itu didominasi oleh partai politik yang ideologinya sejenis atau jarak ideologinya tidak terlalu jauh (Putra Erawan, 2004: 36). Betapapun partai-partai politik yang ikut dalam pemilu di kabupaten Tabanan bisa dikatakan tidak memiliki jarak ideologi yang terlalu jauh.

Pendapat tentang pecahnya konflik juga diberikan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. Ia mengatakan bahwa konflik itu terjadi dan berkembang apabila seseorang atau kelompok dalam upaya mencapai tujuannya, tidak dilakukan dengan melampaui lawannya tetapi dengan mencegah lawannya bertindak secara efektif. Atau dengan lain perkataan disebutkan bahwa konflik itu merupakan proses untuk



mencapai tujuan dengan upaya membatasi atau memperlemah saingan (Horton, 1976: 296).

Konflik yang terjadi antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan juga bisa dilihat dari sisi lain, yakni bagaimana peran negara dalam mempengaruhi konflik tersebut serta upaya elit politik dalam mengontrol massa. Pada hekekatnya, jika dilihat dari aras struktur, konflik antar partai politik merupakan konflik horizontal yakni konflik yang terjadi antara lapisan sosial masyarakat yang sejajar. Dalam hal ini terjadi antar partisan kontestan pemilu. Kekerasan jenis ini bisa terjadi akibat campur tangan negara dalam memicunya tetapi negara sendiri tidak ikut terlibat dalam konflik yang terjadi. Kekerasan jenis ini juga bisa muncul akibat tidak dilakukannya fungsi negara sebagai penjamin diselesaikannya konflik secara damai. Lemahnya kekuatan negara menyebabkan terjadinya suatu situasi yang mengarah pada *anomi*, yaitu ketika nilai-nilai lama telah hilang, sementara nilai baru belum mapan. Lemahnya kekuatan negara juga menyebabkan lemah atau kurang berfungsinya hukum positif, yang memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, dalam hal ini adalah pelaku tindak kekerasan. Dengan kata lain, negara mengabaikan tugas utamanya sebagai pemelihara keamanan masyarakat. Karena tidak berlakunya prinsip-prinsip yang mengandung sanksi seperti itu, maka berkembanglah apa yang disebut dengan prinsip *impunity*, yaitu berkembangnya kejahatan akibat tidak dihukumnya pelaku (Sulistyo, 2000: 60-61).

Kemunculan konflik mempunyai latar belakang yang beragam. Secara umum disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara dua pihak. Tetapi unsur-unsur yang

membuat perbedaan pendapat itu beragam. Dalam hubungan antara penguasa dengan masyarakat, Ted Gurr misalnya menyebutkan bahwa konflik akan muncul apabila janji-janji yang diutarakan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ini disebutnya dengan kondisi deprivasi relatif, yang lebih menekankan pada munculnya konflik antara pemerintah dengan rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa pemberontakan politik dan pembangkangan lainnya terjadi bila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya. Untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus kekecewaannya, kelompok yang bersangkutan mengambil jalan agresi dan kekerasan politik. Kondisi kemiskinan dan penindasan obyektif atau absolut, tidak langsung mengobarkan pemberontakan. Melainkan tanggapan subyektif atau psikologis atas kondisi-kondisi itulah yang mengobarkannya. Studi statistik memperlihatkan bahwa kekerasan cenderung meningkat selama masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. (Jones, 1993: 202). Oleh Hermawan Sulisty, pendapat Gurr ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Disebutkan bahwa kondisi ekonomi yang krisis membuat rendahnya ketahanan nasional, dan masyarakat menjadi rentan terhadap pemicu tindak kekerasan (Sulistyo, 2000: 14). Pendapat tentang munculnya konflik sebagai akibat krisis ekonomi, signifikan untuk menjelaskan fenomena umum yang terjadi di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997. Tetapi dalam persoalan konflik partai politik di kabupaten Tabanan, deprivasi relatif itu lebih dikaitkan dengan kekecewaan masyarakat karena tidak adanya ketepatan dari janji-janji politik di masa lalu.

Menurut Mack dan Snyder, sebagaimana dikutip oleh Tedd Gurr, konflik itu juga bisa terjadi akibat adanya upaya-upaya untuk mendapatkan kontrol sumber-sumber dan posisi-posisi yang langka atau untuk mempengaruhi perilaku dengan tujuan-tujuan tertentu. (Rauf, 2001: 6). Posisi sebagai elit partai maupun sebagai anggota dewan adalah posisi langka dalam masyarakat. Tetapi jika mendapatkan posisi tersebut, disamping mampu meraih penghasilan ekonomi yang lebih besar dari masyarakat pada umumnya di Indonesia, juga bisa dipakai untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh tertentu.

Menjelaskan konflik antar partai politik di kabupaten Tabanan, juga bisa dilihat dari adanya unsur budaya kekerasan di dalam masyarakat. Menurut Hermawan Sulistyو dalam menjelaskan fenomena kekerasan antar partai politik bisa dilihat dari budaya yang mengandung unsur kekerasan di tingkat masyarakat. Misalnya yang terjadi di daerah Madura, Jawa Timur dalam pemilihan umum 1999 yang lalu, munculnya konflik bisa dilihat dari adanya budaya kekerasan dalam masyarakat setempat. Budaya carok misalnya akan mendukung munculnya kekerasan yang terjadi antar kontestan partai politik pada kampanye tersebut. Dalam kaitan ini juga disebutkan adanya unsur yang mendukung budaya kekerasan tersebut, seperti membawa senjata tajam dan sebagainya (Sulistyo, 2000: 13).

Pada budaya Bali, terdapat unsur budaya yang mengandung konflik, yaitu adu ayam jago yang disebut tajan. Jika dikaitkan dengan konflik, adu ayam ini termasuk *zero sum conflict*, yang maknanya penegasan pihak yang kalah dengan yang menang. Dalam hal adu ayam ini, satu ayam mati untuk menentukan

menangnya ayam yang lain. Taji, yaitu senjata tajam yang dipasang di kaki ayam saat bertarung, karena bentuknya kecil dan ketajamannya tinggi, dalam beberapa kasus dipakai sebagai senjata pelindung oleh anggota masyarakat jika hendak bepergian. Dalam kasus konflik antar partai politik yang terjadi di Tabanan, dijumpai adanya anggota masyarakat yang sering berpartisipasi dalam sabungan ayam ini terlibat di dalam konflik.

Teori-teori diatas akan dipakai untuk menjelaskan munculnya konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan. Namun demikian, perlu juga diperhatikan apa yang dikatakan Hermawan Sulisty. Dalam penjelasannya tentang konflik antar partai yang terjadi di Indonesia menjelang pemilihan umum 2004, ia menyebutkan bahwa dalam memandang munculnya konflik tidak bisa dilepaskan oleh dua faktor, yaitu faktor penyebab dan faktor pemicu. Faktor penyebab adalah kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya tindak kekerasan. Sedangkan faktor pemicu mengacu kepada kondisi yang bersifat sesaat, seperti saling teriak antar kontestan atau kontestan partai politik kebetulan sedang berpapasan di jalan raya (Sulisty, 2000: 13). Artinya konflik akan muncul jika dipicu oleh riak tertentu di daerah yang bersangkutan. Riak-riak ini bisa saja berupa pelecehan simbol, teriakan dan sejenisnya yang bisa memunculkan konflik yang terbuka.

2.2. Teori tentang Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menekan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara

pihak-pihak yang terlibat. Sesuai dengan definisi konflik, yaitu adanya perbedaan pandangan dari dua pihak atau lebih, konflik berhasil diselesaikan bila dapat dicapai konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Konflik hanya dapat dihadapi dengan melakukan pengaturan (konflik regulation) dengan harapan konflik yang terjadi diantara kekuatan sosial atau kelompok masyarakat tidak berkembang menjadi kekerasan. Regulasi konflik dilakukan untuk mengubah konflik-konflik yang terjadi menjadi konsensus atau kompromis.

Untuk mencapai konsensus dan kompromis dengan teknik mediasi dan konsiliasi itu, dilakukan pendekatan-pendekatan atau upaya mengelola konflik agar tujuannya lebih mudah dicapai. Disini diperlukan pendekatan yang disebut dengan resolusi banyak jalur (*multitrack*). Upaya penyelesaian model ini digunakan untuk menyelesaikan konflik horizontal (yaitu konflik yang terjadi antara komponen masyarakat). Dalam bidang politik, konflik itu misalnya terjadi antar simpatisan partai politik. Resolusi banyak jalur atau *multitrack* ini, dalam pandangan Lambang Triyono, yang mengutip pendapat dari Lederach, memaknakan bahwa konflik itu diselesaikan dengan menggunakan intervensi banyak jalur, baik sektor pemerintah, maupun sektor sipil dengan melibatkan berbagai lapisan sosial (lapisan menengah, bawah maupun atas) dengan pendekatan yang berbeda-beda. Ini dilakukan karena konflik horizontal ini bukan hanya disebabkan oleh masyarakat lapisan bawah tetapi juga dari kalangan atas. Dalam setiap langkah resolusi, perlu dibangun resolusi konflik tanpa kekerasan berupa langkah-langkah diplomasi, negosiasi dan dialog-dialog pemecahan masalah. Melalui dialog-dialog informal secara intensif di tingkat

komunitas, maka konflik bisa dikurangi, ketegangan diturunkan, prasangka dikikis dan selanjutnya konflik bisa ditransformasikan menuju kerjasama antar komunitas (Triyono, 2001: 154-157). Dalam pengertian yang lebih jauh penyelesaian konflik ini bisa melibatkan para elit dan tokoh-tokoh masyarakat maupun lembaga yang hidup dan diakui perannya dalam masyarakat. Melalui resolusi seperti itulah kemudian bisa dicari kesepakatan-kesepakatan seperti konsensus yang mampu mengurangi intensitas konflik.

Konsensus terjadi bila tercipta kesepakatan dalam hubungan antara dua pihak atau lebih. Bila konsensus tercapai berarti penyelesaian konflik berhasil dicapai. Prinsip dasar dalam konsensus adalah dibukanya kemungkinan di dalam diri pihak yang berkonflik untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap pendapat yang dianutnya dengan bersedia menerima bagian-bagian dari pendapat pihak lain yang menjadi lawannya dalam konflik. Persyaratan terpenting bagi tercapainya konsensus adalah tawar-menawar, yang berarti kesediaan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi tuntutan sendiri dan menerima bagian-bagian tertentu dari tuntutan pihak lain.

Ada bermacam-macam model konsensus. Yang pertama adalah konsensus yang merupakan gabungan dari butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Model ini bisa dikatakan sebagai konsensus pendapat internal karena konsensus yang dicapai terdiri dari gabungan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Proses yang terjadi dalam model ini adalah usaha-usaha secara persuasif dalam musyawarah untuk mencari butir-butir pendapat yang dianut oleh

pihak-pihak yang berkonflik yang dapat disetujui oleh pihak. Musyawarah untuk mencari butir-butir apa saja yang disetujui oleh semua pihak dan membuang butir-butir yang tidak disepakati. Di sini terlihat bahwa harus ada kesediaan setiap pihak untuk membuang butir-butir pendapat sendiri yang tidak disetujui pihak lain dan menerima pendapat pihak lain yang semula tidak disetujui. Dalam proses tersebut terjadi proses tawar menawar berupa kesediaan satu pihak untuk menerima butir-butir pendapat tertentu dari pihak lain dengan ketentuan pihak lain juga harus bersedia menerima butir-butir tertentu dari pendapat pihaknya.

Yang kedua mirip dengan yang pertama. Perbedaannya terletak pada disepakatinya pendapat dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik sebagai konsensus. Model ini disebut sebagai konsensus pendapat dominan. Model ini hanya terjadi bila pihak-pihak yang terlibat konflik terdiri dari lebih dari dua pihak.

Model ketiga adalah konsensus yang dibentuk dari pendapat-pendapat pihak lain, bukan dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Ini disebut sebagai konsensus pendapat luar. Digunakannya pendapat luar ini disebabkan karena adanya kesulitan-kesulitan dari pihak-pihak yang bertikai untuk menerima pendapat lawan masing-masing. Ini terjadi karena besarnya perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang berkonflik, tetapi mereka melihat ada butir-butir dari pendapat pihak yang bisa mereka setujui. Pihak lain itu bisa saja adalah mediator atau pihak lain dimanapun juga dalam masyarakat (Rauf 2001: 17).

Model keempat adalah konsensus gabungan. Model ini merupakan gabungan dari beberapa model konsensus tadi. Dalam model ini digunakan butir-butir pendapat

tertentu yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat konflik, disamping butir-butir pendapat lain yang berasal dari pihak-pihak yang tidak terlibat konflik. Diterimanya butir-butir tertentu dari pendapat pihak lain menunjukkan bahwa ada kesulitan dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menerima pendapat mereka sendiri (Rauf, 2001: 16- 17).

Model-model konsensus diatas didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ada cara untuk mencapai konsensus untuk menyelesaikan konflik tidak didasarkan atas perubahan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat konflik, tetapi dilakukan melalui wewenang pemerintah untuk memutuskan penyelesaian konflik secara hukum. Cara ini dikenal dengan cara pengadilan. Dalam cara ini pihak-pihak yang berkonflik tidak menemukan konsensus antara mereka. Untuk menyelesaikan konflik itu mereka menyerahkan kepada pemerintah untuk mengadili mereka. Pemerintah melalui pengadilan mencari penyelesaian konflik yang paling tepat menurut hukum. Keputusan pengadilan merupakan konflik resolusi yang harus diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Cara lain untuk mencapai konsensus yang tidak didasarkan atas perubahan pendapat di kalangan yang terlibat konflik adalah cara pemungutan suara (voting). Konsensus dengan cara pemungutan suara didasarkan atas suara terbanyak. Pendapat yang memperoleh suara terbanyak menjadi pendapat bersama sehingga perbedaan pendapat dapat diselesaikan.

Dalam menganalisis konflik antar partai di Kabupaten Tabanan, dalam tulisan ini akan dipakai model konsensus pendapat gabungan. Model inilah yang paling representatif karena semua pihak merasa ikut memberikan solusi atas permasalahan yang ada, atau pendapat-pendapatnya dipakai.

Disamping cara konsensus, upaya lain yang dipakai untuk menyelesaikan konflik politik adalah memakai pendekatan kompromis. Upaya kompromis merupakan bentuk dari akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat pertikaian saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. (Soekanto, 2003: 77-78).

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, mempunyai cara pandang yang sama dengan kompromis. Hanya saja dikatakan bahwa jika terkadang dalam konflik yang terlalu tajam, susah untuk mendapatkan kompromis. Dalam hal seperti ini, kompromis bisa terjadi jika ada bantuan dari pihak ketiga, seperti yang dilakukan pada teknik konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. (Horton, 1976: 303-304). Dalam pengertian yang lebih luas bisa dikatakan bahwa mekanisme untuk mencapai konsensus atau kompromis itu bisa dilakukan dengan memakai teknik mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Mediasi atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan pihak yang bersengketa. Konsiliasi juga merupakan mekanisme penyelesaian konflik

dengan intervensi pihak ketiga. Hanya saja dalam hal ini pihak ketiga lebih aktif dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang terlibat konflik. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik dari pihak yang berkonflik sendiri. Penyelesaian konflik dengan mekanisme arbitrase juga menggunakan pihak ketiga yang netral, tetapi disini pihak ketiga ini bisa bertindak sebagai hakim yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu ia berwenang mengambil keputusan yang bersifat mengikat (Sutrisno, 2001 218-220)

Mekanisme penyelesaian konflik di Kabupaten Tabanan, menggunakan teknik mediasi dan konsiliasi.

Penyelesaian konflik antar partai politik, tidak saja bisa dilakukan secara informal melalui tindakan konsensus, akomodasi atau kompromis tetapi juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga formal. Dalam pandangan Muhaimin A. Ruslan, konflik itu bisa diatasi melalui dua jalan, yakni jalan atas yang menurutnya merupakan jalan formal dengan memakai saluran hukum yang ada. Dan yang kedua, jalan bawah, yakni jalan informal dengan mengikuti mekanisme yang hidup dalam masyarakat.

Resolusi dengan memakai jalan atas, yakni jalan formal itu memerlukan sejumlah syarat, yakni adanya instrument hukum yang bisa dijadikan alat untuk

penyelenggaraan proses penyelesaian, lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas dan pelaksana (penegak hukum) yang tidak bisa diragukan. (Ruslan, 2001: 61-62).

Dalam konteks demikian, meskipun dalam masa transisi ini masih banyak yang meragukan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum Indonesia, tetapi dalam konteks upaya menyelesaikan dan menekan konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang Pemilu Legislatif 2004, langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga formal yang berwenang untuk menyelesaikan konflik pemilu, cukup mempunyai pengaruh. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan pemilu ini adalah Panwaslu, yang menurut UU dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada pemilu.

Sebagai sebuah upaya meminimalkan konflik, pendidikan politik juga memegang peran penting. Upaya pendidikan politik akan mampu membangun kesadaran dan menambah wawasan politik kepada masyarakat. Dengan pemahaman dan kesadaran berpolitik itu, diharapkan akan mampu meredam gejolak masyarakat yang mendorong terjadinya konflik antar partai. Di Kabupaten Tabanan pendidikan politik ini juga dilaksanakan dan setidaknya-tidaknya mampu memberikan sumbangan untuk meredam semakin meluasnya konflik antar partai.

Dalam tulisan ini, konflik antar simpatisan maupun yang melibatkan elit partai dipandang sebagai konflik antar partai politik. Elit partai masih memegang kuat pengaruh terhadap simpatisan. Sebaliknya simpatisan partai masih memegang fanatisme yang bermuara pada partai maupun elit. Dalam setiap konflik partai, selalu dijumpai adanya simbol partai yang hadir. Simbol-simbol itu berupa lambang

partai, warna baju lengkap dengan lambang partai termasuk juga kendaraan yang ditempeli stiker lambang partai.

Tulisan ini berangkat dari paradigma fakta sosial yang menitikberatkan pada pemahaman tipe struktural fungsional dan struktural konflik. Dengan demikian teori-teori yang dipakai disini menyangkut konflik dan konsensus. Peristiwa yang terjadi antar partai politik di Kabupaten Tabanan, bisa dijelaskan pada konteks tersebut.



BAB 3

METODOLOGI

Pada bagian ini diuraikan sisi metodologis dari tulisan ini, yang membimbing penulis untuk melakukan penelitian di lapangan maupun membimbing sistematika penulisan. Dimulai dari penjelasan konsep-konsep yang dipakai, kemudian jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Aspek metodologis ini memudahkan bagi penulis untuk menjelaskan hasil penelitian dan memudahkan juga bagi pembaca untuk memahami hasil penelitian.

3.1. Konseptualisasi

Konflik. Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk fisik. Konflik dalam bentuk fisik ini menggunakan kekerasan dalam membela pendapat masing-masing. Bisa menggunakan anggota tubuh seperti tinju, kaki, bisa juga menggunakan senjata atau benda lain seperti kursi dan sebagainya. Bahkan bisa juga dengan membunuh pihak lawan. Konflik bisa berkembang manakala seseorang atau kelompok berupaya mencapai hasil tidak dengan mengungguli lawannya tetapi mencegahnya dalam upaya berkompetisi dengan efektif. Atau mencapai hasil dengan upaya membatasi atau melemahkan lawan (Horton, 1976: 296)

Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2003: 98-99), antara konflik dan kekerasan itu disatukan ke dalam satu pengertian. Menurutnya, konflik atau pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Kondisi-kondisi perbedaan yang terdapat dalam individu atau kelompok itu memungkinkan terjadinya konflik. Perbedaan itu seperti ciri-ciri badaniah, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, kepentingan, perubahan sosial dan sebagainya.

Dalam pandangan Maswadi Rauf, konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial. Jadi pengertian dan persyaratan konflik politik sebenarnya sama dengan konflik sosial. Hanya saja dalam konflik politik tersebut mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan. Hal lain yang membedakannya dengan konflik sosial adalah bahwa dalam konflik politik selalu melibatkan konflik kelompok. Yang dimaksud dengan konflik kelompok disini adalah konflik yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Dengan demikian, konflik politik bukanlah konflik individu karena yang dipertentangkan dalam konflik politik adalah isu publik yang menyangkut kepentingan banyak orang, bukan kepentingan satu orang tertentu (Rauf, 2001: 19).

Konflik dalam tulisan ini memakai pengertian gabungan diatas. Artinya konflik itu merupakan pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang bersifat kekerasan dan diakibatkan oleh adanya upaya untuk menghalangi tujuan kelompok tertentu.

Menyelesaikan Konflik. Terminologi menyelesaikan konflik dipakai untuk menegaskan makna bahwa segala pertikaian dan segala bentuk konflik lainnya yang terjadi antar partai di Kabupaten Tabanan, bisa dipecahkan dan dicari solusinya berdasarkan cara-cara yang dipakai dan disepakati agar konflik tersebut tidak meluas menjelang pemilihan umum legislatif ini. Penyelesaian konflik (*conlict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik mutlak diperlukan untuk mencegah 1). semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan pihak-pihak yang berkonflik dan 2). Semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik. Bila konflik tidak mampu dicegah, maka akan berpotensi menyebabkan disintegrasi masyarakat.

Dalam kasus konflik antar partai di Kabupaten Tabanan, potensi disintegrasi itu kelihatan. Sebab konflik politik yang terjadi, tidak hanya melibatkan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar tetapi juga melibatkan antara PDI Perjuangan dengan partai-partai di luar Golkar seperti PNI Marhaenisme dan PNBK. Dalam intensitas yang lebih kecil juga melibatkan PKPB, Partai Merdeka, PPDK, PKB, Partai Demokrat dan PDK. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki pengikut mayoritas di Kabupaten tabanan. Dalam Pemilu tahun 1999, partai ini berhasil mengumpulkan suara sebanyak 230.643 suara, jauh meninggalkan partai-partai lain Ini berarti, jika konflik antar partai tersebut tidak segera diselesaikan, maka potensi disintegrasi politik antar masyarakat akan terjadi.

Partai Politik. Dalam pengertian Carl J. Frieddrich adalah sekelompok orang yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan partainya, berdasarkan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun materiil. (*A Political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of government, with the further objective of giving to members of party through such control ideal and material benefits and advantages*).

Sedangkan dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum (Suroto, 2003:20).

Dalam tulisan ini pengertian partai politik tersebut diambil dari ketentuan yang dimuat dalam Undang Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik itu.

Yang dimaksudkan dengan pra-pemilihan umum legislatif adalah rentang waktu satu tahun sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Ada beberapa alasan untuk melihat pentingnya masa satu tahun sebelum pemilihan umum legislatif tersebut digelar. Yang pertama, situasi kabupaten Tabanan selama rentang waktu itu sudah cukup ramai dengan atribut-atribut politik yang dipasang di pinggir-pinggir jalan atau di kampung-kampung. Atribut berbagai partai tersebut sebenarnya melanggar aturan karena pemasangan atribut tersebut baru boleh dilakukan semasa kampanye. Artinya satu bulan sebelum bulan April 2004.

Tetapi meski pelanggaran itu terjadi, panwaslu kabupaten Tabanan dan juga partai-partai politik tidak mampu mengendalikan suasana. Yang ditakutkan adalah semakin meluasnya konflik dan akibat dari peristiwa 1999, dimana terjadi pengrusakan atas bangunan-bangunan pemerintah setelah gagalnya Megawati menjadi presiden. Pemasangan atribut partai itu terpaksa dibiarkan demi memberikan pelepasan emosi bagi para pengikut partai politik. Alasan kedua, pihak kepolisian resort Tabanan, mengantisipasi masalah konflik antar partai ini, sejak satu tahun menjelang pemilu tahun 2004. Catatan-catatan yang berkaitan dengan kerusuhan politik ini dimulai pada bulan Januari 2003.

Pemilu legislatif, merupakan model baru dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah reformasi, dimana pemilihan umum nasional itu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan eksekutif lainnya seperti bupati, dan gubernur serta pemilu untuk memilih anggota DPR, baik nasional tingkat I maupun tingkat II. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota DPR ini.

Persepsi dalam tulisan ini diartikan sebagai pandangan dari partai tertentu terhadap suatu fenomena yang kemudian dipakai sebagai alasan untuk bertindak. Semisal cara pandang PDI Perjuangan terhadap fenomena kegiatan partai-partai lain di kabupaten Tabanan. Berdasarkan cara pandang itulah mereka kemudian membuat penilaian sebagai dasar untuk melakukan tindakan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan secara kualitatif. Penelitian deskriptif berupaya membuat deskripsi fenomena yang

diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasi fenomena tersebut secara factual dan cermat (Ibnu Hadjar, 1996: 274). Penelitian kualitatif, menurut Chadwick dan kawan-kawan adalah mengacu kepada strategi penelitian seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, partisipasi ke dalam aktivitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan pertama mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan (Chadwick, 1991: 234). Pendekatan kepada data menunjukkan adanya interaksi dengan orang yang sedang diselidiki, pemahaman budaya mereka, termasuk nilai, kepercayaan, pola-pola perilaku, dan bahasa dan usaha merasakan atau mengalami motif dan emosi mereka.

Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, ucapan-ucapan, tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen pribadi dan tindakan yang dilakukan informan penelitian. Atau bentuknya berupa kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Ciri khas data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu, serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Data kualitatif juga bisa berdasarkan pengalaman individu. Data pengalaman individu dimaksud adalah keterangan mengenai apa yang dialami oleh individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi obyek penelitian (Bungin, 2001 : 24-125).

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai jenis kualitatif. Artinya penelitian yang tidak mendasarkan temuannya berdasarkan angka-angka statistik ataupun menganalisa berdasarkan angka statistik, melainkan melakukan observasi langsung ke lapangan.

Penelitian kualitatif, tidak mesti menyantumkan hipotesis, malah justru akan mendapatkan hipotesis baru (Sugiyono, 2005:12). Atau bisa juga mencantumkan hipotesis yang disebut dengan hipotesis kerja. Hipotesis ini sebenarnya telah terekam dalam pemikiran peneliti secara terus menerus, mulai dari awal sejak dia melakukan penelitian di lapangan.

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tabanan ini didasarkan pada pengumpulan data seperti yang dilukiskan diatas. Yakni melakukan wawancara dengan informan serta menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik antar partai politik yang terjadi menjelang pemilu legislatif 2004.

3.3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang terlibat dalam konflik maupun tokoh-tokoh partai serta tokoh lembaga politik dan sosial yang ada di kabupaten Tabanan. Mereka-mereka ini bisa dipandang sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan prosedur wawancara, subyek penelitian ini disebut dengan informan (Burhan Bungin, 2001:173). Mereka yang terlibat konflik tidak saja simpatisan partai tetapi juga akan yokoh partai yang menjadi anggota legislatif daerah. Untuk mendapatkan data yang lebih dalam mengenai sebaba munculnya konflik maupun penyelesaiannya, simpatisan yang terlibat konflik juga diwawancarai.

Tokoh-tokoh lembaga politik seperti ketua KPU atau Ketua Panwaslu juga dilibatkan. Sedangkan tokoh lembaga sosial yang dijadikan subyek penelitian adalah ketua adat serta kepala desa, lembaga yang mempunyai pengaruh kuat dalam

menyelesaikan persoalan yang melibatkan anggota warga. Konflik-konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan, lokasinya sporadis. Disamping sebagai simpatisan partai politik, mereka yang terlibat tersebut secara sosial juga menjadi anggota satu desa adat yang berbenturan dengan warga desa adat lainnya.

Cara untuk mendapatkan informan ini adalah melalui penelusuran jejak peristiwa konflik seperti yang tercatat pada kantor kepolisian resort Tabanan. Dari sini diketahui identitas mereka-mereka yang terlibat konflik termasuk juga daerah tempat kejadiannya. Disamping itu, juga dengan menanyakan kepada masyarakat di tempat mana konflik itu pernah terjadi sebelum pemilu legislatif 2004. Penelusuran juga dilakukan dengan menanyai simpatisan partai untuk mendapatkan informan yang paling mengetahui permasalahan konflik yang melibatkan partainya.

Setiap individu yang diwawancarai ini, dipandang sebagai mewakili partainya sehingga penjelasan-penjelasan yang diberikan itu juga dipandang mengatasnamakan partainya.

Di bawah ini disebutkan subyek penelitian yang didekati. Mereka adalah:

1. PY. Posisinya sebagai sekretaris Partai Golkar Cabang Tabanan di tahun 2003.
2. WS, tokoh Partai Golkar Kecamatan Kerambitan yang menjadi korban penganiayaan di Tabanan.
3. NR, Tokoh Partai Golkar Abiantuwung
4. GR, Tokoh PDI Perjuangan yang ikut ditahan pihak kepolisian Tabanan ketika konflik terjadi tahun 2003.
5. IS, Tokoh PDI Perjuangan Tabanan.
6. SP, tokoh PDI Perjuangan Tabanan.

7. KS, intel Resort Tabanan.
8. WW, Ketua Partai Nasional Banteng Kemerdekaan.
9. MS, tokoh PNI Marhaenisme Tabanan.
10. GB, Ketua KPU Kabupaten Tabanan.
11. GP Ketua Majelis Madya Desa Pakraman, Tabanan.
12. J, Pegawai Pemda Tabanan yang sering meliput kegiatan bupati/wakil.
13. AW, Kepala Desa Borgan, Tabanan.
14. WU, Kepala Desa Tunjuk, Tabanan
15. WS, Kepala Desa Tegalinggan, Tabanan
16. GW Kepala Desa Abiantuwung, Tabanan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif memperlihatkan adanya interaksi antara peneliti dengan orang yang akan diselidiki, pemahaman budaya mereka, termasuk nilai kepercayaan pola-pola perilaku, dan bahasa; dan usaha merasakan atau mengalami motif dan emosi mereka (Bruce A. Chadwick, 1991:235). Penelitian kualitatif, banyak melakukan penelitian berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku alami subyek penelitian di lapangan, cerita serta kata-katanya dan menggunakan dokumentasi untuk melakukan penelusuran penelitian. (Burhan Mungin, 2001 : 142).

Karena itu dalam upaya untuk memndapatkan data di lapangan yang berkaitan dengan perilaku, emosi simpatisan partai politik dan elit partai politik yang terlibat dalam konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Bali itu

dilakukan dengan wawancara. Wawancara ini termasuk wawancara mendalam agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kejadian dan penyelesaian kejadiannya. Sebagai patokan, beberapa pertanyaan awal telah dipersiapkan yang bisa dikembangkan di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas. Wawancara tersebut tidak saja dilakukan kepada simpatisan partai yang terlibat konflik, juga kepada tokoh-tokoh politik, tokoh lembaga politik dan sosial yang ada di Kabupaten Tabanan. Tokoh politik itu adalah elit partai sedangkan tokoh lembaga politik seperti misalnya ketua KPU, serta ketua panwaslu. Tokoh sosial termasuk diantaranya ketua adat, sebuah lembaga sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam sistem sosial di Bali.

Wawancara bentuk ini dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya. (Burhan Bungin, 2001 :135). Model wawancara seperti ini lebih layak digunakan untuk mendapatkan informasi dari pejabat-pejabat teras partai, disamping untuk menambah keakraban juga memancing informasi-informasi lain yang diperkirakan berguna dalam penelitian. Jika wawancara dilakukan secara sistematis dengan pertanyaan yang sudah ada yang disodorkan kepada responden, suasana wawancara akan kaku dan dikhawatirkan tidak mampu mendapatkan informasi yang mencukupi untuk penelitian. Dalam wawancara ini digunakan instrument tape recorder untuk merekam berbagai hasil wawancara.

Disamping melakukan wawancara langsung tersebut juga dilakukan dengan eksplorasi dokumen seperti koran, majalah serta buletin. Menganalisis dokumen, penting untuk penelitian kualitatif, terutama untuk menganalisis kejadian-kejadian

yang sudah lewat. Dokumen ini bisa dilihat dari catatan resmi pemerintah, atau catatan yang dibuat oleh partai serta dokumen-dokumen yang ada di dalam masyarakat. Dokumen ini merupakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, dokumen yang dipakai itu adalah dari pemerintah, yaitu jumlah konflik antara partai yang tercatat di kantor Polres Tabanan serta yang dicatat oleh panitia pengawas pemilu kabupaten Tabanan. Disamping itu, juga dilihat dokumen-dokumen yang menjadi catatan dari partai politik itu sendiri, baik yang ditulis secara pribadi oleh tokoh partai maupun yang menjadi catatan dari partai itu sendiri.

Catatan pribadi peneliti juga dipakai. Catatan dari peneliti, sebagai sumber data dimaksudkan dengan catatan dari kesan dan hasil pengamatan peneliti pada saat melakukan wawancara kepada responden maupun saat melakukan observasi. Ini penting untuk melihat bagaimana bahasa tubuh tokoh yang diwawancara. Sedangkan analisis isi media, adalah tulisan-tulisan dari media massa cetak yang memberitakan tentang terjadinya konflik antar partai di kabupaten Tabanan, maupun kesepakatan yang berhasil dicapainya.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut pandangan Soffian Efendi dan Chris Maning, tujuan analisa data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi (Singarimbun, 1985 :213). Sedangkan Burhan Bungin (2001:290) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif maupun verifikasi kualitatif. Strategi deskriptif berintikan cara

berfikir induktif. Sedangkan verifikasi kualitatif mempunyai inti pemikiran deduktif. Dalam penelitian ini, teknik analisa datanya memakai cara deskriptif kualitatif.

Dalam pemikiran tersebut, analisisnya dimulai dari berbagai data yang didapatkan dari lapangan disederhanakan ke dalam kesimpulan atau cirri-ciri umum tertentu. Artinya, data-data yang didapatkan dari lapangan tersebut diklasifikasikan menurut persamaan-persamaannya ke dalam tema-tema tertentu, menyingkirkan yang tidak berguna dalam konteks penelitian. Dari penyederhaan tersebut, data kemudian diinterpretasikan dan dihubungkan antara satu dengan yang lain.



BAB 4

DINAMIKA SOSIAL DAN POLITIK KABUPATEN TABANAN

Tabanan merupakan salah satu kabupaten dari sembilan daerah tingkat II (delapan daerah kabupaten dan satu kotamadya) di Bali. Posisi geografisnya berada di bagian selatan dari pulau ini dengan luas wilayah sekitar 839,33 km² atau 83.933 hektar. Total luas kabupaten Tabanan mencapai sekitar 14,90% dari luas Pulau Bali. Dari keseluruhan luas wilayah itu sebanyak 26,97% merupakan lahan persawahan (226,39 Km²), dan 61,11% merupakan lahan pertanian bukan sawah (512,88 Km²). Sedangkan 6,67% merupakan lahan tanah pekarangan rumah serta bangunan, dan sisanya 5,25% diperuntukkan lahan lain. Peruntukan ini bisa dalam bentuk areal pertamanan, parkir, terminal dan sebagainya. Seperti kabupaten dan kota lainnya di Bali, Tabanan juga mempunyai banyak tempat wisata yang memerlukan pertamanan dan tempat parkir. Dengan luas lahan pertanian sejumlah itu dan dengan curah hujan paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Pulau Bali, Tabanan sering disebut sebagai kota hujan dengan predikat kota Pelangi dan dipandang sebagai wilayah paling subur. Pada tahun 2003 rata-rata hujan turun dalam 138 hari dalam satu tahun atau setara dengan 3.264 mm.

Tahun itu juga Tabanan menghasilkan sebanyak 224.304 ton padi sawah dan 56 ton padi gogo. Padi jenis belakangan ini banyak dihasilkan di daerah pegunungan, terutama di Kecamatan Pupuan yang memiliki perbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Produksi buah-buahan didominasi oleh pisang sebanyak 7905,4 ton dengan penghasilan sekitar 13.861.802.684 rupiah. Setelah pisang, hasil

pertanian yang menonjol adalah durian dan jeruk. Durian dihasilkan di pegunungan daerah Penebel, Baturiti dan Pupuan. Meski demikian, durian juga dihasilkan di daerah dataran rendah. Produk sayur-sayuran yang didominasi oleh tomat dan kubis/sawi mampu menghasilkan produksi sebanyak 39.591,8 ton. Sebagian besar dari produk ini dihasilkan di wilayah kecamatan Baturiti, daerah yang terkenal dengan udara sejuk dekat dengan daerah pariwisata Bedugul.

Produksi perkebunan didominasi oleh kelapa, kelapa hibrida, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, vanili, lada dan kakao. Total di tahun 2003 menghasilkan produksi sebanyak 28.887,67 ton. Kelapa dihasilkan di wilayah yang berdekatan dengan pantai, terutama di wilayah Tabanan bagian barat seperti di Suraberata, Selabih dan Selemadeg. Desa ini berada di tepi pantai yang membentang pada poros jalan utama Bali, Denpasar-Gilimanuk. Sedangkan daerah penghasil cengkeh, vanili dan kopi arabika adalah Kecamatan Pupuan dengan Desa Pujungan, Belimbing, Padangan, Galiukir, Blatungan serta desa-desa yang ada di pegunungan.

Luas hutan di kabupaten Tabanan sebanyak 8.460,95 Ha yang terdiri dari hutan lindung sebanyak 6.969,24 ha, kebun raya 154,50 ha, hutan cagar alam 949,20 ha dan 388 merupakan hutan wisata. Daerah ini terdapat di kecamatan Baturiti dan Pupuan (Bappeda Kabupaten Tabanan, 2003: 127-128).

Secara geografis, kabupaten Tabanan terletak pada posisi antara 8 derajat 14'' 30' – 8 derajat 30'' 07' Lintang Selatan dan 114 derajat 54'' 52' – 115 derajat 12'' 57' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 2.776 diatas permukaan laut. Perbatasannya meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng. Perbatasan ini ditandai dengan deretan pegunungan seperti Gunung Batukaru, yang merupakan gunung tertinggi di kabupaten ini (2.276 Meter), Gunung Sanghyang (2.023 meter), Gunung Pohen (2051), Gunung Penggilingan (2082 meter) dan Gunung Beratan (2.020).

Sebelah Timur : Kabupaten Badung. Perbatasan ini ditandai dengan Tukad Yeh Sungai, Tukad Yeh Ukun dan Tukad Yeh Penet.

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia, dengan panjang pantai sekitar 37 kilometer memanjang dari arah barat ke arah timur.

Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana. Perbatasannya ditandai dengan Tukad Yeh Let.

Tabanan terbagi menjadi sepuluh kecamatan, 113 desa/kelurahan dan 792 dusun/lingkungan/banjar dengan 323 desa adat. Pada umumnya di Bali, sebutan komunitas administratif, kumpulan keluarga di bawah desa disebut dengan banjar. Namun pada jaman Orde Baru, karena kebijakan penyamarataan terhadap sebutan bagi satuan administratif ini, banjar berubah sebutan menjadi dusun atau lingkungan. Bagi kesatuan administratif yang berlokasi paling dekat dengan kota, disebut dengan lingkungan dengan induknya disebut sebagai kelurahan. Satuan administrasi yang lebih tinggi dari kelurahan atau desa adalah kecamatan. Sedangkan komunitas yang berhubungan dengan budaya dan agama, disebut dengan desa atau banjar adat.

4.1. Adat dan Budaya

Seperti halnya daerah-daerah lain di Bali, kebudayaan masyarakat Tabanan tidak bisa dilepaskan dari agama Hindu. Keadaan geografis yang sebagian besar tanahnya merupakan lahan pertanian, juga ikut membentuk budaya masyarakat Tabanan. Karena itu, adat sebagai suatu wadah sosial mayoritas masyarakat Tabanan yang beragama Hindu memegang peran yang amat penting dalam kehidupan kebudayaan masyarakat Bali, dan tentunya demikian juga dengan masyarakat Tabanan. Adat ini kemudian yang memfungsikan masyarakat untuk berekja sesuai dengan yang tertuang dalam aturan atau *awig-awig* yang ada dalam masyarakat tersebut.

Dibentuknya desa adat adalah untuk mencapai suatu tujuan yang secara kodrati tidak mampu dicapai secara perorangan. Masyarakat sepakat secara bersama-sama mengkonsepkan tujuan dan upaya untuk mencapainya secara efektif dan efisien. Desa adat adalah suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepkan dan mengaktikan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Desa adat terikat oleh karena adanya karang desa, *awig-awig* desa dan Pura Kahyangan Desa. (Gorda, 1999: 34).

Di daerah kabupaten Tabanan, seluruhnya terdapat 323 desa adat yang secara struktural masing-masing desa adat itu mempunyai kepengurusan layaknya organisasi biasa, seperti memiliki ketua, sekretaris dan bendahara. Dalam penelitian ini, yang paling penting untuk dilihat adalah peran *awig-awig* desa. *Awig-awig* desa adat merupakan peraturan dan ketentuan dasar dibuat oleh anggota desa adat yang dijadikan pedoman perilaku mereka. Di dalamnya juga ada apa yang disebut dengan

perarem yang merupakan dari peraturan yang lebih rinci dari ketentuan yang ada dalam *awig-awig*.

Disamping segenap ketentuan untuk mengatur diri sendiri, *awig-awig* ini juga dilengkapi dengan sanksi. Sanksi yang bersifat profan dijatuhkan kepada anggota adat yang berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang tertulis. Sedangkan sanksi lain bersifat sakral, yang erat dengan hubungan keyakinan karmaphala. Anggota adat misalnya melakukan sumpah di tempat suci untuk menerapkan aturan ini terhadap pelaku pelanggaran norma yang dipercaya (Gorda, 1999: 17).

Dalam konflik partai politik yang terjadi di kabupaten Tabanan, baik pada tahun 2004, peran ketentuan-ketentuan yang ada dalam *awig-awig* atau *pereram* ini cukup besar untuk mengendalikan konflik agar tidak meluas.

Secara kultural, masyarakat Tabanan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Hindu dan agraris. Tabanan memiliki dua tempat sembahyang yang disucikan bukan saja oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat Hindu Bali, yaitu Pura Tanah Lot dan Pura Batukaru. Perpaduan antara budaya Hindu dengan agraris ini melahirkan budaya gotong royong serta kebersamaan. Budaya ini biasanya diungkapkan dengan simbol bahasa *segalak*, *seguluk*, *segilik*, *salulunglung* *sebayantaka*. Budaya inilah yang kelihatan manakala diselenggarakan berbagai upacara, baik dalam tingkat keluarga maupun masyarakat. Karena itu, jika misalnya tidak hadir dalam sebuah upacara tertentu yang digelar masyarakat, keluarga atau teman, ada perasaan bersalah dan memiliki utang atas ketidakhadiran tersebut.

4.2. Politik

Kabupaten Tabanan mempunyai dinamika politik menarik jika dilihat dari sejarahnya. Baik pada masa kerajaan maupun setelah merdeka, Tabanan mempunyai catatan penting. Kabupaten ini mempunyai seorang pejuang wanita, namanya Sagung Wah yang di jaman penjajahan sebelum abad ke-20 mengobarkan perlawanan menentang kekuasaan Belanda. Tabanan mempunyai dua makam pahlawan, yakni Taman Pujaan Bangsa Margarana di desa Marga serta Pancakatirta di kota Tabanan. Kesemuanya merupakan makam pahlawan sebagai simbol penentangan terhadap penjajahan Belanda.. Ini menandakan Tabanan mempunyai dinamika politik cukup tinggi d Bali.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, beberapa kejadian politik penting terjadi di kabupeten ini, sampai pula pada gejolak-gejolak politik pada masa reformasi.

4.2.1. Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, keadaan politik di Tabanan lebih banyak diominasi oleh kekuatan nasionalis pendukung Bung Karno. Meski demikian kekuatan-kekuatan lain juga ada seperti misalnya kekuatan dari PKI, PSI, serta Nahdlatul Ulama. Meski Tabanan mayoritas beragama Hindu, tetapi terutama di kota Tabanan juga terdapat kelompok masyarakat yang beragama Islam, yang merupakan pendatang dari luar Bali, seperti dari Jawa atau Makasar. Mereka menempati wilayah di Kampung Jawa, di pinggiran selatan kota Tabanan. Kekuatan politik mereka tersalurkan ke dalam organisasi massa Nahdlatul Ulama di jaman Orde Lama. Di

Tabanan juga ada pengikut Partai Sosialis Indonesia. Antara sekitar tahun 1956 sampai 1959, gerakan Logis, yaitu kependekan dari Lanjutan Organisasi Grilya Seluruh Indonesia juga tercatat di daerah ini. Logis merupakan gerakan yang merupakan dampak dari dibubarkannya Partai Sosialis Indonesia pada waktu itu. Cukup banyak pengikut Logis yang dideskreditkan di kabupaten ini. Partai Komunis Indonesia juga mempunyai kekuatan. Ketika terjadi pemberontakan G.30.S, cukup banyak anggota PKI di Tabanan yang menjadi korban di tahun 1965.

Di jaman Orde Lama Bali masih masuk bagian dari Propinsi Sunda Kecil. Pada Pemilu pertama tahun 1955 di propinsi ini bertarung sebanyak 19 peserta pemilu yang meliputi 13 partai dan 6 organisasi mengajukan 150 calon anggota DPR memperebutkan 8 kursi DPR. Partai Nasional Indonesia berhasil meraih suara terbanyak dengan perolehan 464.398 suara. Basis paling besar dari perolehan suara Partai Nasional Indonesia terletak di Bali. Figur Soekarno memegang peran penting dimana presiden pertama Indonesia itu mempunyai ikatan emosional primordial di Bali. Ibunya Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Bali, Singaraja. Kekuatan politik lain yang berpengaruh setelah PNI adalah Masyumi, PSI dan NU. Kekuatan politik ini berpengaruh kuat di luar Bali seperti di Pualau Lombok (Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah, 2003). Setelah itu, tidak ada lagi pemilu sampai pemerintahan Soekarno jatuh tahun 1967 (secara de jure, Soekarno masih presiden sampai tahun ini). Di Tabanan figur Soekarno amat berperan dalam membentuk kekuatan politik pada saat itu.

Pada akhir kekuasaan Orde Lama, yakni ketika meletusnya pemberontakan G.30 S, Tabanan juga tidak bebas dari peristiwa ini. Korban politik yang diakibatkan

oleh runtuhnya Orde Lama juga banyak terjadi di Tabanan. Para saksi mata yang masih hidup menyebutkan bahwa banyak diantara para korban itu digiring ke pekuburan. Tidak ada jumlah yang pasti berapa jumlah yang meninggal akibat peristiwa ini, tetapi menurut sespuh Partai Nasionalis Indonesia, dalam sebuah wawancara yang dilakukan tanggal 10 Agustus 2005, bapak I Gusti Ngurah Meregeg menyebutkan bahwa sekitar 30 orang yang menjadi korban di Tabanan. Tetapi jumlah ini mungkin terlalu kecil disebutkan oleh tokoh yang pada waktu wawancara telah berusia 83 tahun. Dalam cerita-cerita yang diungkap oleh beberapa saksi yang sempat melihat kejadian di tahun 1966 itu, kemungkinan jumlah yang tewas akibat kekerasan politik ini melebihi dari 30 orang. Robert Cribb, dalam bukunya *The Indonesian Killings, 1965-1966* menyebutkan bahwa jumlah korban tewas dalam peristiwa itu, di Bali dan Sumatera berkisar 100.000 orang. Dengan perkiraan jumlah sebanyak itu, kemungkinan besar korban tewas di kabupaten Tabanan jauh melebihi informasi diatas. Seorang saksi lain, yaitu Bapak I Putu Yadnya menyebutkan bahwa angka 30 orang itu terlalu kecil. Sebab ia mencatat bahwa di Penebel saja korbannya diperkirakan mencapai seratus orang. Belum lagi yang terjadi pada kecamatan-kecamatan lainnya di Tabanan yang pada waktu itu masih berjumlah delapan wilayah.

Benih-benih konflik antara PKI dengan kaum nasionalis sudah muncul dalam waktu yang cukup lama di Bali. Demikian juga halnya dengan di Tabanan. Seorang tokoh PNI yang berasal dari Tabanan menyebutkan bahwa melenyapkan orang-orang PKI mendapat persetujuan dari Tuhan. Pada tanggal 1 Maret 1965, tujuh bulan sebelum munculnya konflik politik, di daerah Jatiluwih, Penebel, ada kejadian yang

cukup menegangkan. Sepasang suami istri beserta dua anaknya yang sedang memetik kopi di kebun, tiba-tiba diserbu oleh sekitar 100 orang anggota BTI, yaitu Barisan Tani Indonesia, organisasi petani yang mendapat perlindungan dari PKI. Mereka dilukai dan disiksa. Mereka diancam bahwa akan bisa selamat kalau bergabung dengan BTI. Pada saat itu datang pihak polisi. Mereka terluka serius dan dibawa ke rumah sakit. (Kribb, 1999: 250)

Sejak jaman kemerdekaan sampai dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru, pemegang jabatan eksekutif di Tabanan, yaitu bupati, tidak seluruhnya berasal dari Tabanan. Sejak awal kemerdekaan sampai masa reformasi ini, hanya 4 bupati yang berasal dari Tabanan, yakni Cokorde I Gusti Ngurah Gede yang menjabat pada awal masa kemerdekaan, I Gusti Made Debot, I Komang Wijana dan Adi Wiryatama yang memegang kekuasaan eksekutif di jaman reformasi (sebanyak dua kali hingga sekarang). Ada 9 pejabat bupati yang memegang kekuasaan eksekutif di Tabanan sejak awal masa kemerdekaan hingga sekarang. Di luar mereka yang berasal dari Tabanan, para mantan bupati itu berasal dari Singaraja (Pak Oka dan I Wayan Stat Darmanaba), Gianyar (Ida Bagus Puja) dan Badung (I Wayan Sundria) dan dari Jawa (Sugianto). Fenomena ini disebabkan karena baik pada masa jaman Orde Lama maupun Orde Baru, kekuatan pusat di Jakarta, memegang peran amat penting dalam penunjukan bupati. Pemimpin eksekutif pada daerah tingkat II, tidak harus berasal dari daerah itu sendiri, sepanjang mereka mampu memahami daerah yang dipimpinnya tersebut. Pada jaman Orde Baru, para pejabat yang dekat dengan Partai Golkar mendapatkan posisi sebagai pemimpin eksekutif di kabupaten ini. Namun demikian, terdapat juga pandangan yang mengatakan bahwa kesulitan mencari figur

pemersatu di kabupaten Tabanan juga menjadi salah satu sebab dari terpilihnya orang luar Tabanan yang menduduki kursi eksekutif.

Pada jaman itu, setidaknya ada dua perundang-undangan yang memungkinkan berlangsungnya sentralisasi di Indonesia. Undang-undang itu adalah No.I/1957, yang mendasarkan diri pada sistem residu, dimana wewenang pemerintah daerah merupakan sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan UU 5/74 yang mengedepankan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, status otonomi hanya mengedepankan kewajiban ketimbang hak: daerah berkewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. (UU 22/1999) otonomi setengah hati. UU 32/2004 mengandung jerat politik (Pramono, 2005: 43).

4.2.2. Masa Orde Baru

Seperti juga perkembangan di kabupaten-kabupaten lainnya di Pulau Bali, perkembangan politik Tabanan mengikuti perkembangan politik propinsi bahkan politik nasional. Artinya, ketika dinamika politik tersebut secara mayoritas terpola seperti yang tergambarkan pada Propinsi Bali, di Tabanan pun demikian pula. Meski sebelumnya pada masa Orde Lama mayoritas masyarakat memilih Partai Nasionalis Indonesia dalam pemilihan umum, tetapi begitu Orde Baru tumbang masyarakat memilih Golkar sebagai pilihan politiknya. Jika di Bali yang memegang peran adalah pemerintahan Soekarno, maka dinamika yang berlangsung di Kabupaten Tabanan juga demikian. Apabila Orde Baru yang berkuasa, di Tabanan juga mengikuti pola demikian. Hal yang sama juga terjadi di jaman reformasi ini.

Fenomena politik di kabupaten Tabanan pada masa Orde Baru dikuasai oleh organisasi fungsional Golkar. Meski demikian catatan menarik yang terjadi pada waktu ini bisa dilihat pada fenomena masyarakat Desa Gubug. Desa ini terdiri dari 7 banjar dan membentang dari pinggiran kota sampai pantai di selatan. Meski pada saat itu iklim politik di Tabanan didominasi oleh Golkar tetapi untuk desa ini, sebagian besar masyarakatnya masih memilih partai nasionalis (Partai Demokrasi Indonesia) sebagai pilihannya. Meski isu politik yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang tidak memenangkan Golkar tidak akan mendapat bantuan pada masa itu, masyarakat tetap tidak beranjak dari pilihannya kepada Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Salah satu sebab yang mempengaruhi sikap politik masyarakat ini adalah adanya figur kharismatis tokoh kemerdekaan, yaitu Pak Belang yang memegang peran penting. Masyarakat di desa Gubug ini banyak yang berprofesi sebagai petani dan yang berdekatan dengan pantai berprofesi sebagai nelayan. Sepanjang desa ini dibelah oleh jalan yang menghubungkan kota Tabanan dengan obyek wisata pantai, Yeh Gangga. Pada sebagian besar kekuasaan Orde Baru, jalan-jalan di desa ini rusak berat yang seolah-olah membenarkan pendapat bahwa desa-desa yang tidak mampu memenangkan Golkar pada masa pemilu, tidak akan mendapatkan bantuan. Kendati demikian, dominasi partai nasionalis itu tetap tidak tergoyahkan dan masih memenangkan pemilu sampai jaman reformasi ini.

Pada pemilu tahun 1971 yang merupakan pemilu kedua Indonesia, Golkar memenangkan pemilu di kabupaten Tabanan. Gubernur Bali Sukarmen yang memegang pucuk pimpinan di Bali saat itu (pada waktu ini Bali sudah menjadi propinsi tersendiri) melantik I Gusti Made Debot menjadi bupati. Bupati ini

merupakan adik kandung dari I Gusti Debes, seorang pahlawan yang tewas bersama I Gusti Ngurah Rai saat melakukan perang Puputan dalam pertempuran Margarana di desa Kelaci. Dilihat dari posisi ini maka politik di Tabanan masih tetap melihat pada nilai-nilai historis perjuangan rakyat Tabanan. Artinya pucuk pimpinan eksekutif dipilih berdasarkan kaitan keluarga yang mempunyai peranan sejarah di Tabanan.

Perkembangan politik di kabupaten ini sejak pemilu pertama Orde Baru itu tidak bisa dilepaskan dari kemenangan partai Golkar sampai dengan pemilu terakhir di jaman Orde Baru tahun 1997.

4.2.3. Masa Reformasi

Meski tidak disebutkan secara resmi, yang dimaksud dengan masa reformasi adalah jaman dimana kekuasaan Orde Baru telah berakhir. Saat dimana kekuasaan Orde Baru itu berakhir dimulai dari turunnya kekuasannya pemerintahan Soeharto menuju kekuasaan pemerintahan BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak saat itu, sampai sekarang sring disebut sebagai jaman reformasi. Pemerintahan di masa inilah disebutkan sebagai pemerintahan di masa reformasi. Reformasi dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki segala penyimpangan yang dilakukan pada jaman Orde Baru. Salah satu yang paling menonjol adalah upaya mengembalikan pemilu ke dalam bentuknya yang paling hakiki, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu pertama di jaman reformasi ini terjadi pada tahun 1999.

Tahun 1999 merupakan pemilu reformasi pertama di Indonesia. Pada waktu itu jumlah pemilih di kabupaten Tabanan adalah: 276.600 orang. Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan memperoleh suara 230.643 dan Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 18.988 suara. Jumlah suara tersebut menghasilkan komposisi 28 orang dari PDI Perjuangan, 4 orang fraksi TNI/Polri dan 3 orang dari Partai Golkar (Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah, 2003)

Seperti juga daerah-daerah lain di Bali, melonjaknya suara PDI Perjuangan di kabupaten Tabanan ini tidak bisa dilepaskan dari masa reformasi dan penghujatan terhadap kekuatan-kekuatan yang memegang kekuasaan pada jaman Orde Baru. Keadaan perolehan suaranya seperti berbalik jika dibandingkan dengan tahun 1997 ketika Golkar menpatkan suaterbanyak dengan hanya belasan ribuan yang disisakan untuk Partai Demokrasi Indonesia.

Pada jaman Orde Baru, Golkar merupakan kekuatan politik di Tabanan. Kebijakan pemerintah yang condong dengan Golkar membuat birokrasi dan simpatisan partai Golkar menyebar tidak hanya di kota-kota sampai ke desa-desa. Setiap pegawai negeri mendapat kartu anggota Golkar sehingga birokrasi di setiap wilayah dikuasai oleh Golkar. Dari catatan sejak tahun 1992, Golkar selalu menang mutlak sampai tahun 1997. Suara Partai Demokrasi Indonesia jauh di bawah perolehan Golkar. Pemilu tahun 1992, dari 193.329 suara yang berhasil diraih Golkar, PDI hanya mendapatkan 60.205 suara. Lima tahun berikutnya jumlah suara PDI amat merosot. Partai ini hanya mendapatkan 14.081 suara berbanding dengan Golkar yang mendapatkan 230.323.

Meski demikian, seiaman Orde Baru boleh dikatakan tidak ada konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Ini disebabkan, sisamping politik represif dan penyamarataan yang dilakukan Orde baru, juga akibat dari perecekcokan yang

terjadi diantara tubuh PDI sendiri. Tahun 1997, ketika suara PDI amat meosot, ini dipengaruhi oleh konflik tubh PDI antara kubu Suryadi dengan Megawati Soekarnoputri. masyarakat Tabanan yang semula ikut PDI sepertinya merasa frustrasi yang kemungkinan membuat mereka ikut arus mainstream utama pada waktu itu, yakni Golkar. Cara Golkar yang berkampanye sampai ke desa-desa dengan memakai kabupaten tekad atau safari, membuat perolehan suara Golkar melonjak tinggi.

Salah satu indikator dari masa reformasi adalah dibukanya kebebasan mendirikan partai politik. Undang undang No .2 Tahun 1999 (sebelum kemudian diubah menjadi UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik) menyatakan bahwa ketentuan untuk membentuk partai politik itu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warganegara Indonesia yang telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini amat jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan masa Orde Baru yang hanya membolehkan dua partai politik dengan satu golongan fungsional, yaitu Golkar. Dengan adanya kebebasan membentuk partai politik tersebut, maka tahun 1999 terbentuknya 141 partai politik dengan 48 diantaranya dibolehkan ikut pemilu.

Tahun 2004 di kabupaten Tabanan, jumlah partai politik yang mendaftar adalah sebanyak 25 parpol. Tetapi hanya 24 partai politik yang kemudian dibolehkan ikut pemilu. Dari jumlah partai tersebut, lima besar yang mendapatkan jumlah suara terbanyak adalah Partai Golkar, PNI Marhaenisme, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan mengumpulkan suara terbanyak.

Meski situasi politik ketatanegaraan setelah reformasi telah memberikan kebebasan bagi partai politik untuk bergerak secara bebas dalam norma-norma yang

telah ada untuk memperlihatkan kegiatannya, menjelang pemilu 2004 tidak terlalu banyak partai politik yang ada di kabupaten Tabanan mampu memformulasikan kebijakan partainya, terutama untuk menghadapi pemilu. Hal ini bukan saja disebabkan oleh sarana-sarana yang masih belum lengkap dari partai itu, tetapi juga karena masyarakat Tabanan, sejarahnya hanya dikuasai oleh dua kekuatan politik, yaitu Golkar dan para pengikut Marhaen. Satu lagi dengan basis yang khusus, yaitu Nahdlatul Ulama yang ada di pinggiran kota Tabanan dan di desa Bajra. Karena itu kegiatan politik menjelang pemilihan umum 2004, secara lebih rinci hanya bisa diperlihatkan oleh tiga kekuatan ini.

Sebagai kekuatan lama dengan jaringan komunikasi yang masih terpelihara, Partai Golkar menyambut Pemilu legislatif 2004 dengan langkah-langkah yang telah diformulasikan. Langkah-langkah yang dilakukan partai Golkar dalam rangka menjaring suara dalam pemilu legislatif:

- Memantapkan konsolidasi organisasi dengan pimpinan Golkar seluruh kecamatan walaupun sulit melakukan karena adanya halangan dimana-mana.
- Memberi bantuan kepada warga Golkar di desa-desa yang sedang membangun baik itu membangun sarana umum ataupun tempat ibadah.
- Memohon restu kepada Tuhan melalui sembahyang bersama di pura-pura, khususnya di Pura Luhur Batukaru.
- Memberikan baju Golkar kepada kader, satgas, dan AMPG.
- Mengirim kader Golkar wanita untuk mengikuti pelatihan (diklat) ke DPD tingkat I.

- Mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia antara sesama kader, karena pertemuan resmi agak sulit dilakukan. Hal ini disebabkan adanya gangguan intimidasi dari pihak tertentu. (Bersumber dari catatan dari Sekretaris Partai Golkar Tabanan tahun 2004).

Meskipun mendapat hujatan sebagai partainya Orde baru, Golkar melalui aktivisnya tetap melaksanakan upaya tersebut, terutama di daerah-daerah basis dimana pemimpin-pemimpin partai tingkat kabupaten ini berasal.

Partai yang terbentuk pada masa reformasi, yaitu PDI Perjuangan sudah sejak awal mempersiapkan diri menghadapi pemilu legislatif 2004 ini. Yang paling mencolok adalah pemasangan atribut partai di pinggir-pinggir jalan, meskipun waktu kampanye belum dimulai. Tetapi ini dilakukan dengan dalih dalam kerangka menyambut pemimpin-pemimpin partai dari struktural lebih tinggi yang kebetulan melakukan kunjungan ke daerah Tabanan. Rapat-rapat antar anggota partai juga dilakukan sebagai strategi konsolidasi dan menghadapi pemilu. Beberapa strategi yang dilakukan, sering dengan mendeskreditkan partai lain, terutama Partai Golkar. Salah satu rapat yang dilakukan di kantor bupati Tabanan pada awal Januari 2003 misalnya secara jelas menghendaki bahwa masyarakat Tabanan harus berada dalam satu panji, yaitu PDI Perjuangan. Dalam rapat ini juga dicetuskan untuk membubarkan Partai Golkar. (Catatan dari Polres Tabanan).

Pada pemilu tahun 1999, partai-partai kecil di Tabanan seperti PKB atau PKP tidak mampu memperlihatkan kegiatannya secara mencolok. Ini disebabkan karena aktivitas maupun pengikutnya sedikit. Pada pemilu tahun 2004, aktivitas yang cukup kelihatan dari partai-partai baru ini nampak pada PNI Marhaenisme, PNBK, PKPB

serta Partai Indonesia Baru. Dua partai pertama, untuk memperlihatkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, mereka membangun beberapa sekretariat cabang dan ranting partai di Kabupaten Tabanan seperti yang ada di Banjar Bongan Lebah dan Penebel. Tetapi gangguan yang dilakukan oleh simpatisan partai lain, yaitu PDI Perjuangan membuat aktivitas itu mengerucut dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

PNI Marhaenisme dalam kegiatannya melakukan konsolidasi partai dan pertemuan kader-kader dengan memakai biaya urunan sendiri-sendiri disamping mengandalkan sumbangan sukarela dari simpatisan. Partai Karya Peduli Bangsa, sebagai partai baru, membuat terobosan mencari anggota dengan mengajak anggota kerabai puri (bekas keluarga kerajaan) yang ada di daerah Belayu, Kecamatan Marga. Elit partai ini dipegang oleh kerabat Puri Belayu. Sedangkan Partai Indonesia Baru mencoba memperkenalkan kehadirannya di tengah masyarakat dengan melakukan persembahyangan bersama. Tetapi ketika ada ancaman dari partai lain, acara ini dipindahkan ke Singaraja. Partai Indonesia Baru ini kelihatannya mengambil sikap torerasi untuk menghindari konflik yang lebih besar dengan partai lain.

Tabel Perolehan Suara Empat Partai Politik di Kabupaten Tabanan

Nama Partai	Tahun 1999	(%)	Tahun 2004	(%)
PDI Perjuangan	230.643 suara	85,41%	208.311 suara	75,38%
Partai Golkar	18.988 suara	7,05%	30.953 suara	11,20%
PNI Marhaenisme	-	-	5.890 suara	2,13%
PNBK	-	-	3.594 suara	1,30%

Sumber : Diolah dari KPUD Kabupaten Tabanan 2004

4.3. Kasus Konflik Antar Partai Politik

4.3.1 Konflik PDI Perjuangan dengan Partai Golkar

Minggu tanggal 19 Juli 2003, pukul 13.00 Wita. Upaya penghadangan terhadap kegiatan safari Golkar keliling Bali oleh massa simpatisan PDI Perjuangan Tabanan berjumlah kurang lebih 500 orang yang dipimpin oleh M.S., SH (anggota DPRD Tabanan). Massa berkumpul di perbatasan Tabanan dengan Jembrana di Dusun Selabih, Selemadeg, Tabanan.

Kamis, 6 Februari 2003 pukul 11.30 Wita, bertempat di kantor DPD Golkar Tabanan datang sekelompok orang mengendarai dua buah mobil jenis Kijang dan Suzuki Vitara dengan nomor polisi tidak diketahui. Mereka yang datang ke tempat tersebut mengeluarkan kata-kata bahwa setelah acara yang berlangsung di DPRD Tabanan selesai mereka akan datang untuk mengobrak-abrik kantor Golkar.

Selasa, 18 Maret 2003, pukul 20.30 Wita. Terjadi pengrusakan terhadap Kafe Joged serta merobohkan sebuah bangunan bale bengong milik kader Partai Golkar Selemadeg Barat yang dilakukan oleh kurang lebih 50 orang yang tidak dikenal. Kejadian berawal dari beberapa anak muda dengan mengendarai sepeda motor mendatangi kafe dan memesan minuman keras. Setelah beberapa saat tiba-tiba orang tersebut memecahkan botol dan melakukan pelemparan terhadap kafe dengan menggunakan batu kali dan pecahan batako serta merobohkan bale bengong. Diduga pelakunya adalah simpatisan PDI Perjuangan.

Rabu 16 Juli 2003 pukul.23.30 Wita, telah terjadi keributan di Dusun Tunjuk Kelod, Desa Tunjuk, Kecamatan/Kabupaten Tabanan sehubungan dengan adanya isu ninja dan dibunyikan kulkul bulus oleh masyarakat Desa Tunjuk. Selanjutnya berhasil

ditangkap antara lain WS., PS, MD, KS, KP., WP, MB., KY., dan WS. Menurut catatan Polres Tabanan, semua yang ditangkap ini adalah simpatisan PDI Perjuangan.

Rabu, 6 Agustus 2003, pukul 12.00 Wita. Telah terjadi pengancaman terhadap simpatisan PDI Perjuangan, MA yang dilakukan oleh ketua AMPG Desa Tunjuk, S W dengan memegang kerah baju dan siap melakukan pukulan. Akan tetapi pukulan tersebut tidak jadi dilakukan.

Senin, 1 September 2003, pukul 21.00 wita. Terjadi keributan antara massa PDI Perjuangan dengan massa Golkar di Br. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Tabanan sehubungan dengan acara syukuran dan peresmian Kelompok tani Mekar Sari PDI Perjuangan Tunjuk. Massa PDI Perjuangan dipimpin oleh MD.

Sabtu, 6 September 2003, pukul 20.00. Telah terjadi penganiayaan di jalan raya di depan rumah jorban di Dusun Tunjuk Selatan (Kelod), Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan. Penganiayaan itu dilakukan oleh beberapa orang simpatisan PDI Perjuangan saat datang dari menghadiri pelantikan anak ranting PDI Perjuangan Kecamatan Penebel. Salah satu rombongan kemudian berteriak dengan menyebutkan nama salah seorang simpatisan Partai Golkar G. Akibat teriakan tersebut beberapa penumpang kemudian turun dan memukuli korban G. Sampai jatuh dari kendaraan bermotor. Akibatnya kepala korban luka robek dan lecet di sekitar badan. Pihak kepolisian Tabanan kemudian menangkap beberapa orang pelaku, yakni MM. alias D., KS alias S, KS., AS, dan WS.

Sabtu tanggal 25 Oktober 2003 Pukul 11.00 Wita. Bertempat di rumah NR Banjar Pasekan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan telah terjadi pengrusakan empat buah mobil dan dua sepeda motor milik simpatisan Partai Golkar

yang akan mengikuti Hari Ulang Tahun Partai Golkar di Denpasar. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan. Menurut keterangan NR, jumlah simpatisan yang menyerbu rumahnya itu mencapai ratusan orang.

Sabtu, 25 Oktober 2003, pukul 11.15 Wita. Massa PDI Perjuangan yang berjumlah kurang lebih 150 orang dipimpin oleh A J Melakukan pembakaran baju Golkar dan melakukan pemukulan terhadap simpatisan Partai Golkar atas nama NS asal Banjar Kukuh Kerambitan Tabanan. Korban mengalami luka bengkak di kepala karena sabetan pipa besi. Korban yang lain MS 17 asal desa Belalang Kediri. Ia mengalami luka memar di bibir. Kejadian ini berlangsung di kota Tabanan. Masih berkaitan dengan kejadian ini, setengah jam kemudian pecah kerusuhan dan penghadangan massa Partai Golkar oleh PDI Perjuangan bertempat di simpang tiga Sakenan dan depan Pura Dalem Tabanan. Akibatnya empat kendaraan rusak berat.

Sabtu 25 Oktober 2003 sekitar pukul 12. 50. Terjadi penghadangan dengan aksi lempar oleh massa PDI Perjuangan Tabanan terhadap rombongan massa Partai Golkar Jembrana di jalan by pass Pesiapan, tepatnya di Perempatan Gubug yang akan menghadiri Hari Ulang Tahun Partai Golkar di Padanggalak, Denpasar. Massa PDI Perjuangan berusaha menerobos pasukan Brimob dan Polres Tabanan sehingga terjadi bentrok dan diberikan tembakan peringatan.

Sabtu, 25 Oktober 2003, pukul 19.00 Wita. Pada pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Megati, Selemadeg Massa Golkar yang pulang dari menghadiri HUT Partai Golkar berpapasan dengan massa PDI Perjuangan sehingga terjadi bentrok saling lempar diatas kendaraan yang mengakibatkan kantot PAC PDI Perjuangan Selemadeg Timur dilempari batu yang membuat kacanya pecah serta memecahkan dua

kendaraan mobil. Satu jam kemudian, massa PDI Perjuangan Selemadeg Barat melakukan pelemparan terhadap rombongan Golkar Jembrana sehingga massa Golkar turun dari kendaraan dan melakukan pengrusakan Kantor PAC PDI Perjuangan Selemadeg Barat yang mengakibatkan kaca jendela pecah. Melihat kantornya rusak, massa PDI Perjuangan melampiaskan marahnya dengan membakar sebuah warung kecil di depan rumah kader Golkar di Banjar Yeh Bakung, Desa Lalang Linggah, Selemadeg Tabanan.

4.3.2 Konflik PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme

Sabtu, 25 Januari 2003, pukul 21.00. Ketua PAC PDI Perjuangan SP melakukan intervensi dengan menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan kelengkapan partai sambil mengeluarkan kata-kata yang kurang enak di dengar pada saat dilaksanakan upacara pemelaspasan papan nama Sekretariat DPC PNI Marhaenisme di Jalan Batukaru 19 Tabanan, Dusun Tuakilang Belodan, Desa Denbantas tabanan. Sesaat kemudian datang simpatisan PDI Perjuangan menggunakan sepeda motor mencabut bendera kecil PNI Marhaenisme yang dipasang di pinggir jalan.

Sabtu, 2 Agustus 2003, pukul 14.00 Wita. Ditundanya pelaksanaan pemasangan papan nama PAC PNI marhaenisme di Dusun Bongan Lebah, Desa Bongan, Tabanan. Kemudian datang massa PDI Perjuangan yang dipimpin oleh MD dan KP yang menanyakan ijin pemasangan papan nama dari Kades setempat dan dari Kabag Linmas.

Minggu, 3 Agustus 2003, pukul 17.00 Wita. Terjadi pengrusakan papan nama Sekretariat PAC PNI Marhaenisme Tabanan di Banjar Bongon lebah, Desa Bongon, Tabanan oleh sekelompok massa kurang lebih sebanyak 50 orang dengan menggunakan empat kendaraan mobil. Diduga pihak yang melakukan pengrusakan ini adalah dari PDI Perjuangan. Menurut keterangan dari simpatisan dari PNI Marhaenisme setempat, pengrusakan itu tidak hanya dilakukan terhadap papan nama partai. Tetapi rumah aktivis PNI Marhaenisme juga dikepung oleh banyak pengikut PDI Perjuangan (dalam keterangannya disebutkan sampai ratusan orang). Baik rumah ketua partai WS maupun sekretarisnya M.S. juga didatangi dan dikurung. Mereka menyebutkan telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Sabtu, tanggal 6 September 2003 sekitar pukul 19.20 Wita, bertempat di Dusun Babahan Tengah, Desa Babahan, Penebel, Tabanan telah terjadi pengrusakan papan nama PAC PNI Marhaenisme yang dilakukan oleh sekelompok massa lebih kurang 20 orang menggunakan kendaraan hardtop warna merah dan satu kendaraan warna hijau tua, berbaju kaos hitam atribut PDI Perjuangan.

Jumat, 24 Oktober 2003, sekitar pukul 01.30 Wita telah terjadi penurunan bendera dan pencabutan papan nama PNI Marhaenisme bertempat di Banjar Cau, Desa Tua, Kecamatan Marga, tabanan oleh sekelompok orang tak dikenal.

4.3.3 Konflik PDI Perjuangan dengan PNBK

Minggu 10 Februari 2003 Pukul 17.30 Wita, telah terjadi pengrusakan kaca nako dapur, 4 unit mobil, 3 unit sepeda motor 1 tempat suci Padmasana di rumah milik W.W. di Dusun Tegalinggah Kaja, Desa Tegalinggah, Penebel, Tabanan pada

saat pertemuan pengurus DPC PNBK Tabanan dalam rangka konsolidasi partai untuk menyikapi pemilu tahun 2004. Pengrusakan itu dilakukan oleh sekelompok simpatisan PDI Perjuangan dengan menggunakan hardtop warna merah diduga milik KP dari Dusun Uma Diwang, Desa Batan Nyuh, Marga, Tabanan. Menurut keterangan WW jumlah penyerangnya mencapai ratusan orang.

Minggu 16 Maret 2003, pukul 20.30 Wita telah terjadi pengrusakan papan nama Sekretariat PNBK di Banjar Penebel Kaja, Desa/Kec. Penebel Kabupaten Tabanan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal sebanyak 30 orang menggunakan sepeda motor. Para penyerangnya juga menggunakan topeng ala ninja dengan plat kendaraan yang sudah dilipat.

Senin 5 Januari 2004 pukul 02.00 Wita telah terjadi pencurian papan nama PNBK yang dipasang di depan rumah WG (kader PNBK) di Banajar Rejasa Kelod, Desa Rejasa, Penebel.

4.4. Lokasi Konflik Paling Menonjol

4.4.1. Desa Tunjuk

Desa Tunjuk merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Tabanan dengan jarak 8 kilometer dari kota Tabanan ke arah utara. Luas wilayah desa ini 74,04 hektar dengan jumlah penduduk sampai dengan bulan Oktober 2003 tercatat 1155 KK (4383 jiwa). Dari luas wilayah itu, 64,03 hektar digunakan sebagai lahan pemukiman. Dalam catatan rekomendasi desa, tidak terdapat buta aksara di desa ini. Dari jumlah penduduknya, sebagian besar berpendidikan tamat SLTA (1328 orang)

yang kemudian diikuti dengan pendidikan SLTP (1324 orang). Di desa ini tercatat ada 132 lulusan sarjana serta 216 tamatan diploma.

Dari sisi profesi dan pekerjaan, Desa Tunjuk termasuk desa yang sudah maju. Di desa ini terdapat 8 dokter, 209 guru, TNI/Polri 23 orang PNS lainnya 131 orang. Profesi lainnya tercatat adalah pedagang (warung). Tetapi disini juga tercatat 400 penduduknya belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun profesinya demikian, penduduk juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti beternak dan bertani. Macam-macam ternak yang dipelihara penduduk setempat seperti sapi, babi, ayam serta kambing. Sedangkan pertanian yang aktif adalah pada dan perkebunan ladang.

Catatan pemilu tahun 1999, tidak berhasil ditemui oleh kepala desa. Pada tahun 2004, PDI Perjuangan memperoleh suara 1.888 suara berbanding dengan 883 suara yang diperoleh Partai Golkar. Sedangkan PNI Marhaenisme memperoleh 5 suara dan PNBK 41 suara. Kepala Desa Tunjuk, I Wayan Utatia percaya bahwa suara Partai Golkar dan PDI Perjuangan tidak berbeda signifikan jika dibandingkan dengan pemilu tahun 1999. (Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan Tabanan).

4.4.2. Desa Abiantuwung

Desa ini terletak di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, yang termasuk dalam Kecamatan Kediri, Tabanan. Lokasinya ada di bagian timur kita Tabanan, yang berjarak kurang lebih 3 kilometer. Sarana jalan menuju desa ini beraspal dan lokasinya terbelah oleh jalan raya Denpasar Gilimanuk. Penduduknya cukup padat. Dibandingkan dengan Desa Tunjuk, penduduk Abiantuwung dua kali lipat

jumlahnya, yaitu 8120 jiwa dengan komposisi agama yang beragam. Keragaman ini disebabkan karena berdekatan dengan kota Tabanan dan kota kecamatan.

Dilihat dari profesinya, pekerjaan penduduk abian tuwung cukup beragam. Sebanyak 207 penduduknya menjadi pegawai negeri, 52 orang berdinasi pada angkatan bersenjata dan sisanya membuka usaha warung serta pertanian. Data monografi dari desa ini tidak mencatat secara lengkap berbagai profesi dari penduduknya. Tetapi dari gambaran yang berhasil dilihat dari desa tersebut, profesi sebagai pedagang warung maupun pembuka warung, cukup banyak. Posisinya di pinggir jalan membuat banyak warga ini yang membuka pertokoan di pinggir jalan utama, seperti usaha wartel, cuci mobil serta toko lainnya. Warung kecil banyak dijumpai di areal dalam, yang tidak dilintasi jalan raya umum. Menurut keterangan kepala desa setempat, cukup banyak juga pemudanya yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga banyak yang nongkrong-nongkrong di perempatan jalan atau di balai desa.

Catatan hasil pemilu tahun 1999, di desa ini khusus didapat dari wilayah konflik, yaitu Banjar Balu, dan Pasekan. Tahun 1998, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan 1.361 suara berbanding dengan Partai Golkar yang memperoleh 80 suara. Tetapi pada pemilu legislatif 2004, jumlah perolehan suara Partai Golkar ini melonjak drastis menjadi 318 suara. Meskipun PDI Perjuangan masih unggul, tetapi suaranya jauh merosot yakni 666 suara. Sedangkan PNI Marhaenisme dan PNBK hanya memperoleh satu suara pada pemilu tersebut. (Sumber: Data Pada Kantor Desa Abiantuwung).

4.4.3. Desa Bongan

Desa ini juga terletak berdekatan dengan ibukota Kabupaten Tabanan, sekitar 4 kilometer ke arah Selatan. Desa ini masih dalam wilayah kecamatan Tabanan. Luas wilayah dari Bongan Lebah sekitar 445 hektar. Jumlah penduduknya mencapai 915 KK (5183 jiwa). Seperti juga dengan Abiantuwung, karena tempatnya berdekatan dengan ibukota kecamatan dan kabupaten, penduduknya majemuk dari sisi agama. Tetapi tetap dengan mayoritas beragama Hindu. Dari tingkat pendidikan, penduduk paling banyak berpendidikan tamat sekolah dasar (1440 orang), disusul dengan sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah atas. Di desa ini terdapat sebanyak 195 warga yang tamat pendidikan tinggi baik tingkat sarjana maupun diploma.

Dari sisi profesi, masyarakat Bongan kebanyakan hidup sebagai petani dan buruh tani. Dekatnya dengan kota kabupaten, membuat masyarakat ini juga ada yang berprofesi sebagai buruh diperkotaan. Tetapi jumlah pegawai negeri tercatat 374 orang dengan 40 TNI/ABRI. Tercatat juga yang menjadi pegawai swasta 260 orang yang kebanyakan bekerja di kota Tabanan. Sebagai mata pencaharian sampingan, banyak yang mengandalkan lahan pertanian sawah.

Dari penelusuran di tempat tersebut, banyak juga masyarakat yang membuka warung di pinggir-pinggir jalan. Sarana alan yang melintasi desa Bongan cukup baik, meski tidak sebaik jalan raya Denpasar-Gilimanuk. Tetapi karena menjadi jalan penghubung dengan desa-desa lainnya di kecamatan Tabanan, sarana jalan raya di tempat ini cukup baik untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pada pemilu tahun 1999, PDI Perjuangan mendapatkan suara terbanyak dengan 3247 suara, disusul dengan Partai Golkar 224 suara, PKP 29 suara dan PNI Massa Marhaen dengan 19 suara. Pada pemilu legislatif 2004, PDI Perjuangan tetap mendapatkan suara terbanyak, yaitu 2.152 suara, yang disusul dengan Partai Golkar sebanyak 1.106 suara, PNI Marhaenisme 306 suara. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan hanya memperoleh 4 suara di tempat ini. (Sumber: Catatan Pemilu Desa Bongan).

4.4.4. Desa Tegalingsah

Dibanding dengan desa lainnya, desa Tegalingsah terletak paling jauh dari ibukota Kabupaten Tabanan. Desa ini termasuk Kecamatan Penebel dan posisi geografisnya ada ke arah utara kota Tabanan dan baru berdiri pada awal tahun 2003. Jaraknya dari kota Tabanan 15 kilometer dan kurang lebih 8 kilometer dari kota kecamatan. Luas wilayahnya mencapai 244 hektar dengan jumlah penduduk tahun 2005 tercatat 1.524 jiwa atau 454 kepala keluarga.

Daerah ini berhawa sejuk karena berdekatan dengan Gunung Batukaru, dan mempunyai tinggi 450 meter dari permukaan laut. Sebagai daerah yang berada dalam posisi tersebut, disamping dijumpai persawahan, perkebunan juga subur di daerah ini. Karena itu jumlah terbanyak dari warga ini hidup daripertanian (sawah dan perkebunan). Disamping itu mereka juga memelihara ternak, dengan ternak sapi yang paling banyak (yaitu 287 orang). Tegalan dan rumput yang subur membuat ternak ini paling berkembang, yang kemudian diikuti ternak babi.

Meskipun demikian, di desa ini juga ada seorang dokter, 14 orang guru, PNS lainnya sebanyak 3 orang, dengan TNI/Polri sebanyak 3 orang.

Dari tingkat pendidikan, jumlah penduduk terbanyak adalah berpendidikan tamat sekolah dasar, disusul dengan sekolah lanjutan tas 361 orang dan sekolah lanjutan menengah 258 orang. Sedangkan yang tamat diploma/sarjana sebanyak 56 orang. Banyak warga yang tamat perguruan tinggi merantau, diantaranya ke kota Denpasar, Jakarta dan Bandung. Salah satu penduduk paling terkenal dari kampung ini adalah I Nyoman Nuarta, pematung yang berdomisili di kota Bandung.

Pada tahun 1999 tidak ada tercatat data perolehan suara pemilu karena desa ini merupakan pengembangan dan baru berdiri tahun 2003. Pada pemilu 2004, partai yang berhasil meraih suara terbanyak di desa ini adalah PDI Perjuangan dengan 918 suara, Partai Golkar 22 suara, PNBK, 88 suara dan PNI Marhaenisme 5 suara. (Sumber: Panitia Pemilihan Kecamatan Penebel).

Sedangkan wilayah Pesiapan terletak di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, dimana sekitar setengah kilometer dari jalan ini terletak sekretariat PDI Perjuangan. Pertigaan sakenan merupakan pintu masuk ke kota Tabanan dari arah Denpasar lewat jalur lama. Untuk menuju Lapangan Dangin Carik dari arah barat, akan melewati lokasi ini.

BAB 5

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK

ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif tahun 2004, penyebabnya bisa dijelaskan dari beberapa faktor.

Pada bab ini diuraikan penyebab konflik tersebut yang dibagi menjadi tiga bagian yakni yang bersifat politis, ekonomi-sosial dan budaya.

5.1. Politis

Munculnya konflik dengan dimensi politis dimaksudkan sebagai konflik yang muncul akibat strategi dan upaya partai dalam mempertahankan diri, atau disebabkan oleh hal politis lain di luar partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks ini, ada tiga faktor yang memunculkan konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan, yaitu adanya persepsi ancaman atas kegiatan partai lain, kemiripan ideologis serta kegagalan negara dan partai dalam mengendalikan massa.

5.1.1. Persepsi Ancaman Eksternal

Dalam pandangan Maurice Douverger, seperti yang dikutip oleh Maswadi Rauf, bahwa konflik antar partai politik itu bisa disebabkan oleh adanya upaya mempertahankan kekuatan diri dari suatu partai politik. Upaya konsolidasi seperti ini akan memancing reaksi dari kelompok lain karena dipandang sebagai ancaman dari luar. Dalam arti, upaya konsolidasi demikian dipandang sebagai adanya

ancaman dari luar oleh partai politik lain yang merupakan kompetitornya. (Rauf, 2001: 50)

Konflik antar partai politik yang terjadi di kabupaten Tabanan disebabkan oleh adanya sikap seperti yang diuraikan dalam pandangan diatas. Empat partai yang mempunyai pengaruh cukup besar di kabupaten ini melakukan serangkaian kegiatan menjelang berlangsungnya pemilu legislatif tahun 2004. Partai Golkar, PDI Perjuangan, PNBK serta PNI Marhaenisme melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat basis pendukungnya. Meskipun kampanye masih jauh tetapi partai politik tersebut telah melakukan kegiatan berupa pemasangan atribut partai seperti bendera maupun mendirikan posko di pinggir-pinggir jalan. Partai politik yang baru berdiri seperti PNBK dan PNI Marhaenisme mendirikan sekretariat di desa-desa Tabanan. Kondisi seperti ini sesungguhnya mirip dengan kampanye. Tetapi masa reformasi yang memberikan kebebasan pembentukan partai politik baru serta upaya pembangunan demokrasi, membuat batas-batas norma politik tersebut kabur. Pemerintah dan pihak yang berwenang memberikan izin kepada partai politik untuk memasang atribut tersebut, jika alasannya dipandang pantas, seperti misalnya meresmikan pembangunan sekretariat, menyambut kedatangan tokoh partai atau ulang tahun partai. Hampir semua partai politik yang ada di kabupaten Tabanan melakukan tindakan demikian.

PDI Perjuangan sebagai partai yang mengumpulkan suara paling banyak pada pemilu tahun 1999, melakukan tindakan demikian dengan cara melakukan berbagai safari ke berbagai tempat serta memasang bendera-bendera partai ditempat strategis di jalan umum untuk menyambut kedatangan tokoh partai. Hal yang sama

juga dilakukan oleh Partai Golkar. Sedangkan dua partai lainnya, yaitu PNBK dan PNI Marhaenisme melakukan konsolidasi, pertemuan-pertemuan dengan berbagai pengurus serta membangun sekretariat partai di tingkat kabupaten.

Dari peristiwa yang terjadi, PDI Perjuangan kelihatan sebagai aktor yang selalu hadir dalam konflik yang meletus dengan partai-partai lainnya. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai lain, kelihatan diganggu oleh aktifitas PDI Perjuangan. Meskipun tokoh dan elit partai ini tidak menyebutkan para pengganggu tersebut sebagai aktifitas partainya tetapi dari atribut-atribut yang digunakan seperti misalnya warna merah serta lambang partai PDI Perjuangan menandakan partai itu hadir dalam konflik-konflik antar partai yang terjadi. Ketika Partai Golkar menggelar acara ulang tahun di Padanggalak Denpasar, rombongan Partai Golkar yang berasal dari Kabupaten Jembrana mendapatkan hadangan dari para simpatisan PDI Perjuangan di wilayah Selabih, Kecamatan Selemadeg Barat. Wilayah ini merupakan perbatasan paling barat dari Kabupaten Tabanan.. Kejadian ini meletus pada tanggal 25 Oktober 2004. Peristiwa bentrokan antar dua partai itu tidak hanya terjadi di daerah Selabih tetapi juga terjadi lebih keras di kota Tabanan dan Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Kali ini melibatkan simpatisan PDI Perjuangan Tabanan dengan simpatisan Partai Golkar Tabanan. Dua tempat ini hanya berjarak sekitar 3 kilometer. Baik di Selabih, kota Tabanan maupun Abiantuwung, konflik tersebut melibatkan ratusan orang. Di kota Tabanan, tercatat beberapa orang terluka parah, dan di Abiantuwung beberapa mobil dan sepeda motor dirusak serta satu rumah dilempari dengan batu.

Meskipun tokoh PDI Perjuangan menyebutkan bahwa konflik itu disebabkan oleh kejadian temporer berupa akibat bertemunya pendukung kedua partai di jalan raya, tetapi jika dilihat dari frekuensi penyerangan oknum-oknum PDI Perjuangan terhadap rombongan Partai Golkar yang hendak menuju Padanggalak Denpasar, memperlihatkan adanya kekhawatiran dari PDI Perjuangan terhadap semakin banyaknya pengaruh partai ini di Kabupaten Tabanan di masa reformasi.

Tanggal 26 Oktober 2003, PDI Perjuangan Tabanan memang hendak melakukan acara relly sepeda motor yang dipusatkan di Soka. Wilayah Soka ini terdapat di Kecamatan Selemadeg, di bagian barat kabupaten Tabanan dan berdekatan dengan Selabih. Sehari sebelum acara berlangsung banyak aktivis PDI Perjuangan berdatangan menuju daerah Soka.

Dari kegiatan ini memang terlihat adanya potensi saling berpapasan simpatisan kedua partai di jalan raya di daerah Soka. Tetapi konflik dan penghadangan tersebut terjadi di Selabih, wilayah yang terdapat sekitar delapan kilometer di arah barat pantai Soka.

Disamping itu konflik dengan Partai Golkar pada waktu itu tidak hanya terjadi di Selabih tetapi juga berlangsung di tempat lain. Konflik juga meletus di pusat kota Tabanan. Sebelum berangkat menuju Denpasar, seluruh simpatisan Partai Golkar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tabanan yang jumlahnya puluhan truk berkumpul di lapangan umum dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh partai. Salah seorang tokoh Partai Golkar dari Kecamatan Kerambitan, N.S., menderita luka parah akibat kejadian ini. Sekitar tiga kilometer ke arah timur dari kota Tabanan, yaitu di Banjar Pasekan, Desa Abiantuwung, ratusan simpatisan PDI

Perjuangan menyerbu rumah tokoh Partai Golkar di tempat tersebut. Penyerangan ini dipancing oleh dipasangnya bendera besar di rumah itu. Akibat penyerangan ini kendaraan pribadi dan rumah tokoh rusak berat.

Banyaknya jumlah massa dari Partai Golkar menjadi sasaran dari PDI Perjuangan untuk melakukan serangan tersebut. Bagaimanapun jumlah massa yang banyak berkumpul di satu lapangan sepakbola, mencitrakan bahwa partai ini ternyata masih mempunyai pendukung yang banyak dan setia di kabupaten ini. Disamping itu, kedatangan tokoh-tokoh Partai Golkar juga memperlihatkan bahwa partai ini tetap mampu memperlihatkan eksistensinya di berbagai kecamatan sehingga bisa dipandang sebagai ancaman dari PDI Perjuangan di kabupaten Tabanan. Di Abiantuwung, bendera besar yang terpancang itu terletak di rumah tokoh yang juga merupakan calon anggota dewan dari Partai Golkar. Posisi rumah dengan bendera besar itu sangat kelihatan dari jalan raya Denpasar-Gilimanuk sehingga dilihat dari sisi pesan politik, bendera ini akan mampu menyampaikan pesan politik kepada masyarakat yang melewati jalan raya tersebut. Hari itu, konflik antara kedua partai ini kembali meletus sore harinya di Pesiapan dan Bajra.

Menurut keterangan tokoh Partai Golkar, P.Y., isu penyerangan itu sebenarnya telah di dengar sehari sebelum acara ulang tahun. Mendengar isu penyerangan itu, acara kumpul simpatisan yang sebelumnya hendak dipusatkan di Lapangan Debes (Stadion Sepakbola), kemudian dipindah menuju lapangan Dangin Carik, sebuah lapangan umum yang jaraknya sekitar dua kilometer dari rencana sebelumnya. Kendati lokasi sudah dipindah, serangan tetap juga dilakukan. Dengan

melihat keterangan ini, ada indikasi penyerangan itu dilakukan dengan sebuah perencanaan.

Perasaan terancam secara eksternal dari PDI Perjuangan ini juga bisa dilihat dari keberadaan calon anggota dewan di daerah yang bersangkutan. Di Abiantuwung misalnya, di daerah ini ada dua calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Golkar. Potensi untuk mendapatkan pengikut di wilayah ini cukup banyak. Dalam keterangan masyarakat setempat, tiga banjar di Abiantuwung ini, yaitu Banjar Balu, Banjar Tengah dan Pasekan, jumlah pengikut Partai Golkar kelihatan semakin banyak di jaman reformasi.

Ada beberapa hal yang mendukung kecenderungan naiknya potensi dukungan terhadap Partai Golkar di wilayah ini. Dilihat dari latar belakangnya, tokoh Partai Golkar di wilayah ini, yaitu N. R. merupakan figur kharismatik yang sudah masuk Golkar sejak tahun 1960-an. Meskipun tidak menduduki jabatan struktural yang penting di partai tersebut, N.R. pernah menjabat sebagai ketua KUD Kediri selama hampir satu dasawarsa. Ia juga berposisi *pemangku* (pemimpin upacara dalam sebuah pura Hindu), dan pernah menjabat sebagai pemimpin adat (kelihan adat di banjar tersebut). Pengalaman seperti ini membuat pengaruhnya cukup besar di masyarakat.

Disamping itu, bersebelahan dengan kampung ini secara kebetulan ada persoalan adat yang cukup pelik. Di Dusun Yangapi ada persoalan berupa pembagian kuburan yang masih belum jelas antara beberapa penduduk setempat. Masalah adat ini sempat menimbulkan kerusuhan fisik yang masih belum bisa terselesaikan hingga sekarang. Konflik internal di wilayah ini sudah berlangsung

hampir dua tahun. Meskipun ini bukan merupakan persoalan politik, tetapi diduga mempengaruhi sikap masyarakat. PDI Perjuangan yang berhasil memperoleh suara terbanyak pada pemilu tahun 1999, ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut sehingga berlangsung lebih dari setahun. Kendatipun demikian, tokoh PDI Perjuangan yang juga menjadi anggota legislatif yang berasal dari wilayah ini telah melakukan pendekatan dan berkunjung ke wilayah konflik adat tersebut. Kekecewaan terhadap berlarutnya masalah Yangapi ini kemungkinan mempunyai pengaruh besar terhadap sikap masyarakat. Dalam keterangan beberapa penduduk di wilayah ini memperlihatkan sikap bahwa konflik tersebut cukup menakutkan menyebar ke banjar-banjar lainnya. Mereka juga ketakutan dengan sikap beberapa simpatisan partai merah yang sering melakukan konvoi ramai-ramai dengan ugul-ugalan. Kedua pernyataan sikap ini bisa dikaitkan karena mereka sama-sama takut dengan kekerasan.

Di Banjar Pasekan tempat dari N.R. bermukim dan Banjar Balu di kelurahan Abiantuwung, terjadi peningkatan pengikut Partai Golkar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kebijakan Partai Golkar yang sering melakukan pengarahan kepada masyarakat membuat pengikut partai ini cukup meningkat. Hal ini setidaknya terlihat dari aktifitas pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh simpatisan partai tersebut. pada saat yang sama. Pada pemilu 2004 terbukti bahwa pengikut partai ini berlipat di wilayah tersebut. Menurut catatan panitia pemilihan tingkat kebendesaan Abiantuwung, tahun 1999 jumlah pemilih Partai Golkar sebanyak 80 orang. Tetapi pada pemilu legislatif 2004, jumlah pemilih partai ini meningkat lebih dua kali lipat, menjadi 218 suara. Pada waktu yang sama, jumlah pemilih PDI Perjuangan di banjar

ini merosot lebih dari setengahnya. Tahun 1999 pemilih PDI Perjuangan berjumlah 1.361 suara, tetapi pada pemilu legislatif 2004, jumlah ini merosot menjadi 666 suara. Melonjaknya suara Partai Golkar lebih dari 200% dan kemerosotan sampai melebihi 50% dari pemilu 1999 merupakan ancaman serius bagi PDI Perjuangan di banjar tersebut.

Dengan kondisi demikian, secara politik bisa dikatakan PDI Perjuangan merasa terancam posisinya untuk wilayah Desa Abiantuwung ini. Karena itu ketika melihat adanya bendera Partai Golkar yang besar berkibar, maka secara spontan massa PDI Perjuangan yang beriringan di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk pada waktu itu spontan berbelok menuju rumah tokoh ini menurunkan bendera Partai Golkar. Menurut N.R., tidak dijumpai adanya aktivis PDI Perjuangan setempat yang melakukan pengrusakan. Tetapi kata-kata ayang dikeluarkan penyerang yang jumlahnya ratusan tersebut menginginkan melenyapkan tokoh-tokoh Partai Golkar di daerah ini.

Jika dilihat ke belakang, persepsi ancaman eksternal ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya kesepakatan politis (wacana politis) yang pernah dikeluarkan PDI Perjuangan pada tanggal 19 Januari 2003. Pada waktu itu para simpatisan dan pentolan partai ini melakukan pertemuan di sebuah tempat di Tabanan yang mengeluarkan dua kesepakatan politik, yang pertama membubarkan Partai Golkar yang dinilai menyengsarakan rakyat. Kesepakatan kedua, membuat Tabanan ke dalam satu panji, yaitu PDI Perjuangan. Berkumpulnya simpatisan dan tokoh partai ini merupakan reaksi atas safari Partai Golkar yang dilakukan sehari sebelumnya,

yang melakukan perjalanan keliling Bali. Massa PDI Perjuangan asal daerah Selemadeg menghadang simpatisan Partai Golkar yang datang dari Jembrana.

Wacana politik kedua, yaitu upaya membuat seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan ke dalam satu panji PDI Perjuangan bisa ditafsirkan sebagai upaya mirip dengan apa yang dilakukan di jaman Orde Baru dulu, yaitu Golkarisasi atau Kuningisasi, yang mana dalam konteks pemikiran PDI Perjuangan seluruh masyarakat di kabuapten ini harus masuk ke dalam partai itu. Pernyataan politik, meskipun ini hasil cetusan PDI Perjuangan semata, tetapi mempunyai implikasi yang besar bagi simpatisan partai ini, baik yang ada pada tingkat akar rumput level menengah maupun elit-elit tertentu. Satu panji itu bisa dimaknakan sebagai Kabupaten Tabanan harus mutlak di bawah PDI Perjuangan sehingga tidak dibenarkan adanya partai-partai lain di luar partai tersebut. Beberapa simpatisan partai ini sempat menyebutkan bahwa dengan satu panjinya Tabanan ke dalam partai tersebut akan memudahkan pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Inilah yang bisa menimbulkan bahaya politis, seperti merebaknya kerusuhan atau gangguan terhadap aktivitas partai lain karena partai-partai itu dipandang sebagai ancaman eksternal.

Setelah ada kesepakatan tersebut, kelihatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Tabanan selalu mendapat gangguan dari PDI Perjuangan. Bulan April, upaya Golkar mensponsori bangunan bale banjar di Kutuh Kelod, Kecamatan Kerambitan juga mendapat gangguan dengan alasan ijin pertemuan tidak ada. Di Banjar Tunjuk Kelod, bendera Partai Golkar yang berdiri di

depan rumah tokoh diturunkan secara paksa. Seorang simpatisan partai ini juga dipukuli oleh simpatisan PDI Perjuangan.

5.1.2. Kemiripan Ideologis

Perasaan terancam PDI Perjuangan semakin kelihatan karena gangguan yang dilakukannya tidak saja terhadap Partai Golkar tetapi juga kepada partai-partai lain terutama Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Meskipun dua partai ini merupakan partai baru, yang tidak ikut dalam pemilu tahun 1999, tetapi kegiatan dua partai ini selalu mendapatkan pengawasan dan dirusak oleh simpatisan PDI Perjuangan.

Dalam pandangan Anthony Downs, seperti yang dikutip oleh Ketut Putra Erawan bahwa konflik antar partai politik bisa terjadi di suatu daerah apabila di daerah tersebut didominasi oleh partai politik yang mempunyai ideologi sejenis atau jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Ini terjadi karena partai-partai yang mempunyai ideologi yang berdekatan tersebut berupaya merebut massa pemilih dalam satu wilayah (Putra Erawan, 2004: 36).

Ideologi PDI Perjuangan, PNBK dan PNI Marhaenisme boleh dikatakan berdekatan karena sama-sama nasionalis dan mengandalkan kharisma Soekarno atau keluarga Soekarno sebagai upaya meraih massa. Karena adanya kemiripan seperti ini bukan tidak mungkin kemudian PDI Perjuangan merasa terancam dalam hal perolehan dukungan di Kabupaten.

Sebagai partai yang baru berdiri dan dimungkinkan baginya untuk mengembangkan diri, PNI Marhaenisme maupun PNBK juga melakukan langkah

untuk memperkenalkan diri dan mengkonsolidasi partai. Kegiatan-kegiatan seperti itulah yang mendapatkan gangguan. Dalam alasan yang dikemukakan oleh salah seorang pengurus PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah, M.S., konflik terhadap partainya terjadi karena partai inilah yang berani melakukan konvoi ketika hendak mendirikan sekretariat partai. Konvoi yang dilakukan secara terang-terangan itu, dengan mengusung nama Soekarno, dipandang mampu menggoyahkan eksistensi PDI Perjuangan, bukan saja di banjar yang bersangkutan tetapi juga di Kabupaten Tabanan. Dalam pandangan elit PDI Perjuangan, gangguan yang dilakukannya terhadap kegiatan PNI Marhaenisme tersebut semata-mata disebabkan oleh karena tidak dijalankannya prosedur secara benar dalam mendirikan sekretariat, seperti tidak memiliki gedung yang jelas, tidak memiliki alat-alat sekretariat (meja, kursi dan sebagainya), juga tidak memberitahukan kepada perangkat desa. Meskipun alasan ini benar, tetapi secara prosedural juga, bukan simpatisan PDI Perjuangan yang mestinya melakukan perusakan terhadap sekretariat partai, tetapi telah ada lembaga yang lebih berwenang, yaitu Kesbang Linmas (Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat). Menurut elit PNI Marhaenisme tersebut ijin itu sebenarnya sudah didapatkan. Tetapi banyaknya datang simpatisan partai yang memakai baju merah itu telah menghancurkan sekretariat yang telah didirikan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kehadiran PNI Marhaenisme, meskipun partai ini baru berkecimpung di kabupaten Tabanan, merupakan ancaman bagi PDI Perjuangan. Ancaman tersebut dipersepsikan besar karena partai ini mempunyai ideologi mirip dengan PDI Perjuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pimpinan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Konflik yang terjadi di Banjar

Tegalinggah Kaja pada bulan Februari 2003, disebabkan oleh ketersinggungan aktivis PDI Perjuangan karena dinilai masyarakat di wilayah tersebut telah beralih menjadi anggota PNBK. Ketika ada peresmian kantor kepala desa di banjar tersebut, tidak banyak masyarakat yang datang menghadiri peresmian yang dilakukan bupati. Bupati Tabanan adalah sokongan dari partai ini. Itulah yang menyebabkan ketika ada rapat konsolidasi PNBK di rumah W.W., pemimpin partai, rumahnya dilempari oleh simpatisan PDI Perjuangan, termasuk juga tempat sembahyang dari keluarga.

Secara historis, baik keluarga MS di Bongan Lebah maupun WW di Tegalinggah mempunyai riwayat kepartaian yang cukup lama. MS menyebutkan dirinya adalah bekas anggota PDI sejak jaman Surjadi dan keluarga WW adalah aktifis partai banteng sejak jaman Soekarno. Ketika ada berbagai intimidasi pada jaman Orde Baru keluarga W.W. juga pernah diancam dan mereka tidak surut membela partai banteng. Alasannya kemudian keluar dari PDI dan kemudian mendirikan cabang PNBK akibat dua hal, yaitu tidak menyukai simpatisan PDI Perjuangan yang banyak ugai-ugalan serta kepemimpinan PDI Perjuangan di tingkat pusat dinilai tidak mempunyai jiwa nasionalis. Beralihnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia disebutkan sebagai ketidaknasionalisan pemimpin partai ini di tingkat pusat.

5.1.3. Kegagalan Negara dan Elit Partai Mengontrol Massa

Konflik yang terjadi antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan juga bisa dilihat dari sisi lain, yakni bagaimana negara dalam menangani konflik tersebut serta upaya elit untuk mengontrol massanya ketika terlibat konflik. Pada

hekekatnya, jika dilihat dari strukturalnya, konflik antar partai politik ini merupakan konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara lapisan sosial masyarakat yang sejajar, yakni partisan kontestan pemilu. Kekerasan jenis ini bisa terjadi akibat campur tangan negara dalam memicunya tetapi negara sendiri tidak ikut terlibat dalam konflik yang terjadi. Kekerasan demikian juga bisa muncul akibat tidak dilakukannya fungsi negara sebagai penjamin diselesaikannya konflik secara damai. Lemahnya kekuatan negara menyebabkan terjadinya suatu situasi yang mengarah pada *anomi*, yaitu ketika nilai-nilai lama telah hilang, sementara nilai baru belum mapan. Lemahnya kekuatan negara juga menyebabkan lemah atau kurang berfungsinya hukum positif, yang memberikan sanksi kepada pelanggar hukum, dalam hal ini adalah pelaku tindak kekerasan. Dengan kata lain, negara mengabaikan tugas utamanya sebagai pemelihara keamanan masyarakat. Karena tidak berlakunya prinsip-prinsip yang mengandung sanksi seperti itu, maka berkembanglah apa yang disebut dengan prinsip *impunity*, yaitu berkembangnya kejahatan akibat tidak dihukumnya pelaku (Sulistyo, 2000: 60-61)

Dengan kata lain, negara mengabaikan tugas utamanya sebagai pemelihara keamanan masyarakat.

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, kelihatan semakin marak setelah adanya rapat deklarasi bersama dari simpatisan PDI Perjuangan yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati Tabanan. Rapat yang dihadiri oleh sekitar 300 simpatisan partai itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk front penyelamat dan pemersatu daerah Tabanan serta kesepakatan

politik berupa membubarkan Partai Golkar. Selanjutnya mengharuskan Tabanan ada dalam satu panji, yaitu PDI Perjuangan.

Disini yang perlu dilihat adalah keterlibatan simbol negara berupa kantor bupati Tabanan yang dipakai untuk rapat. Kantor tersebut merupakan milik negara yang bisa dipandang secara keliru oleh simpatisan partai sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap partai lain jika dikaitkan dari kesepakatan politik yang dihasilkan pada saat itu. Menurut elit politik PDI Perjuangan, I.S. yang terlibat dalam pertemuan, kesepakatan itu hanya merupakan seruan yang bersifat politis untuk perjuangan partai, tetapi massa yang beragam dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikan tersebut bisa berbuat menyimpang diluar kendali norma-norma hukum dan norma sosial yang ada. Dengan demikian, simbol-simbol negara ini bisa dikatakan ikut memicu munculnya konflik antar partai tersebut.

Disamping itu, sejak awal tahun 2003, konflik yang melibatkan beberapa partai politik, tidak mendapatkan penanganan secara maksimal dari pihak keamanan beserta pihak terkait di daerah kabupaten Tabanan. Menurut keterangan tokoh dan pimpinan partai politik yang terlibat dalam konflik, pihaknya telah melaporkan kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa partai serta sipmatisannya. Pimpinan partai yaitu W.W. yang merupakan ketua PNBK, dan M.S. tokoh PNI Marhaenisme, menyebutkan pihaknya telah melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya. Tetapi pengusutannya tidak tuntas. Memrang pihak kepolisian datang ke tempat jam setengah jam setelah kejadian. Tetapi proses hukumnya tidak berlangsung. Mereka ditahan di kantor polisi beberapa hari tetapi kemudian pelaku kekerasan tersebut bisa dilepaskan. Alasan senada juga diungkapkan oleh tokoh Partai Golkar yang ada di

Dusun Tunjuk Selatan, W.S., serta beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui alur peristiwa tersebut. Seorang anggota kepolisian resort Tabanan juga mengakui hal demikian. Pihak keamanan sebagai alat negara, dengan demikian, bisa dikatakan telah gagal dalam rangka menyelesaikan konflik secara damai dan justru memicu tumbuhnya konflik-konflik baru ke depan. Pelaku kerusuhan merasa tidak mendapat hukuman berat terhadap berbagai kekerasan yang dilakukan.

Kejatuhan Orde Baru dukungan Golkar pada tahun 1998 membuat PDI Perjuangan menjadi partai yang paling mendapatkan hati di sebagian besar masyarakat. Pada sisi lain, para pejabat partai ini kelihatan belum siap mengantisipasi lonjakan pengikut yang munculnya tiba-tiba. Setelah sebelumnya masyarakat terkena pengaruh Golkar baik karena institusi maupun kebijakan politik, pada waktu reformasi bergulir di Indonesia tiba-tiba hal itu menjadi berbalik.

Dalam bidang politik, kejatuhan Orde Baru dan berbagai kebijakan yang diterapkan selama berkuasa menimbulkan perasaan kecewa dan dendam bagi masyarakat. Akibatnya setelah reformasi muncul pembalasan-pembalasan politik, terutama dari masyarakat yang sebelumnya dikecewakan oleh kebijakan Orde Baru. Tetapi pada sisi lain, secara intelektual PDI Perjuangan belum siap menghadapi lonjakan pendukung yang demikian tiba-tiba. Hal seperti ini juga kelihatan pada kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan sampai pada kepengurusan tingkat cabang hingga pada tingkat ranting. Bahwa PDI Perjuangan kewalahan mengatur massa akar rumputnya, telah diakui oleh elit partai ini. Salah satunya oleh S.P. Meskipun demikian, ia telah mengutarakan bahwa dalam tingkat kabupaten, upaya mengendalikan akar rumput itu telah dilakukan dengan memberikan ceramah-

ceramah yang dilakukan oleh elit partai. Disebutkan jika elit partai tingkat kabupaten melakukan kunjungan ke desa, selalu mendapatkan sambutan meriah. Pada saat itulah ceramah dan program-program diperkenalkan kepada massa akar rumput. Tetapi tetap juga dikatakan selalu ada kesulitan untuk mengontrol massa akar rumput, terutama jika ada acara-acara seremonial yang digelar, seperti konvoi dalam rangka meresmikan posko tertentu, akan selalu dijumpai rombongan dengan jumlah yang melebihi dari yang diperkirakan.

Tetapi menurut elit partai ini, juga diakui bahwa seperti halnya dengan partai-partai lain, dalam tubuh PDI Perjuangan pun terdapat kelompok-kelompok elit yang bisa dikategorikan dengan kelompok radikal dengan kelompok moderat. Menurutnya, kendatipun dalam tubuh partai ada kelompok yang berpandangan radikal, tetapi mereka mempunyai sifat solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi. Akibatnya mereka-mereka yang bersifat radikal tersebut tetap mempunyai massa pengikut dengan kualifikasi yang sama (radikal juga). Kualifikasi itu misalnya berasal dari kelompok yang termarginalkan pada masa Orde baru (pernah ditahan dan sebagainya), pengangguran, kurang terdidik, penjudi dan secara ekonomi kurang mampu. Karena kurang terdidik itu, maka pemahaman mereka terhadap etika maupun politik juga kurang, sering bersikap beringas dan keras dalam menghadapi sesuatu masalah. Konflik-konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan partai lainnya lebih banyak disebabkan oleh sikap spontan oleh kelompok masyarakat dari golongan seperti ini. Golongan moderat dalam tubuh PDI Perjuangan dalam hal konflik partai ini, sering merasa kecolongan. Dalam strategi kebijakan partai, golongan moderat ini

menurut S.P. malah sering membela dan menghalangi upaya-upaya menghancurkan sarana partai lain.

S.P. menyebutkan bahwa ketika ada upaya untuk menghancurkan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Tabanan, pihaknya berupaya mencegah dan berhasil menghindarkan kehancuran kantor tersebut dari amukan massa akar rumput PDI Perjuangan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh I.S. salah seorang elit PDI Perjuangan yang tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi dan sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai pegawai bank. Tokoh ini secara diplomatis mengatakan bahwa pihaknya berhasil mencegah massa PDI Perjuangan yang berupaya membubarkan secara paksa pertemuan elit Partai Golkar yang hendak menyerahkan bantuan keuangan kepada masyarakat Kutuh Kelod tanggal 27 April 2003. Pertemuan berhasil dihentikan dan penyerangan tidak terjadi.

Dalam pandangan I.S. walaupun ada konflik antar partai yang disebabkan oleh tidak terkendalinya massa partai ini pada tingkat akar rumput, bisa dijelaskan dengan pemahaman bahwa pada tingkat akar rumput itu ada massa yang bisa dikualifikasikan dengan beberapa kelompok. Kelompok pertama disebutkannya sebagai massa yang rasional. Massa ini terdiri dari kelompok masyarakat yang secara edukatif, terdidik dan benar-benar memahami perjuangan partai termasuk tidak terlalu berambisi menjadi elit partai. Mereka memahami partai dengan akar historisnya dari pendiri bangsa, yaitu Soekarno. Mereka tidak akan membikin onar termasuk tidak melakukan bentrok dengan partai-partai lain. Kemudian ada massa fanatik. Massa seperti ini disebutkannya sebagai massa yang fanatik terhadap partai yang bisa bergerak secara serampangan terhadap partai dan terhadap tokoh partai yang menjadi

junjungannya. Kefanatikan itu akan membutakan norma-norma yang ada dan cenderung menimbulkan kerusuhan jika berhadapan dengan partai lain. Selanjutnya ada massa yang berkualifikasi ikut-ikutan. Kelompok ini sangat susah diantisipasi. Karena kelompok massa seperti ini bisa muncul secara tiba-tiba pada saat ada kegiatan partai dan sering menimbulkan nilai negatif terhadap citra partai.

Dalam pandangan I.S. massa seperti inilah yang paling ditakuti. Sebab, jika massa akar rumput PDI Perjuangan yang berkualifikasi fanatik bisa dikumpulkan dan diarahkan, massa ikut-ikutan seperti ini susah dilacak. Malah bisa dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu untuk mencoreng citra PDI Perjuangan. Sebaliknya massa seperti ini sering dipakai berkelit oleh elit PDI Perjuangan dengan mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di daerah tertentu, tidak dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan karena pelakunya tidak dikenali. Elit PDI Perjuangan yang lain, yaitu S.P. membenarkan adanya pengelompokan massa akar rumput seperti itu tetapi kemudian menambahkan bahwa ada juga massa bayaran. Artinya kelompok yang ikut melakukan kerusuhan tetapi dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu, baik itu oleh elit PDI Perjuangan maupun oleh partai lain dengan tujuan mencoreng citra PDI Perjuangan.

5.2. Ekonomi-Sosial

Penyebab konflik yang berdimensi ekonomi-sosial, dimaksudkan bahwa konflik tersebut disebabkan oleh adanya kesenjangan ekonomi diantara masyarakat. Tetapi juga termasuk upaya-upaya untuk meraih tujuan ekonomi dan sosial juga bisa

memicu konflik. Dalam konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, dua faktor yang mempengaruhi itu yaitu *deprivasi relatif* dan upaya memperebutkan posisi langka.

5.2.1. *Deprivasi Relatif*

Konsep *deprivasi relatif* dikeluarkan oleh Ted Gurr yang menegaskan bahwa pemberontakan politik dan pembangkangan lainnya terjadi bila rakyat merasa apa yang mereka terima kurang dari semestinya. Untuk mencapai perolehan yang lebih besar atau menebus kekecewaannya, kelompok yang bersangkutan mengambil jalan agresi dan kekerasan politik. Kondisi kemiskinan dan penindasan obyektif atau absolut, tidak langsung mengakibatkan pemberontakan. Melainkan tanggapan subyektif atau psikologis atas kondisi-kondisi itulah yang mengobarkannya. Studi statistik memperlihatkan bahwa kekerasan cenderung meningkat selama masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (Jones, 1993: 202).

Kondisi demikian dalam kerusuhan antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, lebih banyak terlihat pada bentrokan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Poin pertama dari kesepakatan politik yang dilakukan PDI Perjuangan pada tanggal 19 Januari 2003 memperlihatkan bagaimana kekecewaan simpatisan PDI Perjuangan terhadap Golkar yang memegang pemerintahan pada masa Orde Baru. Poin dalam kesepakatan politik partai itu menyebutkan bahwa Golkar mempunyai dosa terlalu besar yang membuat masyarakat Tabanan resah dan sengsara. Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kecewanya para simpatisan PDI Perjuangan terhadap perilaku Orde Baru.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu tokoh PDI Perjuangan, pernyataan tersebut hanyalah sebuah ungkapan politis yang sebenarnya hanya untuk simpatisan partai tersebut. Tidak ada maksud untuk menghilangkan eksistensi Partai Golkar di kabupaten ini. Namun demikian, dalam pernyataannya juga menyebutkan bahwa yang hadir dalam pertemuan itu ratusan kader PDI Perjuangan yang berasal dari daerah-daerah pertanian yang miskin dimana masyarakatnya juga terlihat kekurangan secara ekonomi, seperti dari daerah pantai yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.

Ketika terjadi penghadangan terhadap safari Partai Golkar maupun ketika menghadiri acara ulang tahun di Padanggalak, Denpasar, simpatisan yang mengenakan atribut PDI Perjuangan banyak yang berasal dari wilayah-wilayah seperti ini. Meskipun dalam pernyataan yang dikemukakan para elit politiknya bahwa pihaknya tidak ada mengerahkan massa, dari sisi lain bisa dilihat bahwa kehadiran massa lapis bawah yang hadir menghadang simpatisan Partai Golkar saat itu bisa menjelaskan bagaimana kecewanya mereka dengan janji-janji Partai Golkar.

Selama masa Orde Baru, wilayah pantai di bagian selatan kabupaten Tabanan, cukup menderita. Jalan raya menuju pantai Yeh Gangga, yaitu wilayah pantai tersebut, tidak pernah mendapat sentuhan perbaikan dari pemerintah. Pada masa Orde Baru, dimana Golkar menjadi pendukungnya janji-janji yang diberikan oleh pemerintah baik melalui media massa maupun oleh pejabat pemerintah akan perbaikan di desa, sudah menjadi lumrah. Tetapi jalan raya yang menghubungkan desa-desa pantai sangat jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan boleh dikatakan tidak pernah dilakukan perbaikan. Meski demikian, wilayah ini tetap

dipandang sebagai pendukung partai banteng. Karena itu, kekecewaan kepada Partai Golkar berupa bentrokan yang terjadi di Pesiapan saat ulang tahun itu, bisa dilihat dari pemikiran seperti ini. Malah dalam laporan pihak kepolisian, meski telah dijaga dengan pagar hidup (barisan kepolisian dengan tameng), massa PDI Perjuangan tetap merengsek menerobos barisan tersebut dan melempari simpatisan Partai Golkar yang lewat. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memperlihatkan bahwa pelaku-pelaku dari kerusuhan itu, banyak yang berasal dari kaum marginal.

5.2.2. Upaya Menguasai Posisi Langka

Dalam kebanyakan konflik antar partai politik yang melibatkan PDI Perjuangan, menurut catatan laporan kepolisian, elit-elit partai ini atau barang kepemilikan dari elit partai ikut terlibat di lapangan. Artinya mereka berada ketika konflik itu terjadi. Ini menandakan disamping elit tersebut menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan ancaman serta perkembangan partainya, ada alasan lain yang ikut mempengaruhi. Dilihat dari latar belakangnya, elit tersebut sesungguhnya telah menduduki jabatan politik sebagai anggota dewan atau sebagai tokoh dalam partai. Tetapi tidak semua dari tokoh itu yang mempunyai latar belakang ekonomi sosial yang mapan. Cukup banyak dari mereka yang berasal dari kalangan petani, penjudi, karyawan swasta ataupun pedagang kecil-kecilan. Karena itu kehadirannya saat menghadang aktivitas partai lain atau mempersoalkan keberadaan atribut partai lain, adalah sebuah upaya untuk memperlihatkan tanggungjawab dan loyalitas sebagai anggota PDI Perjuangan.

Tetapi jika dilihat dari sisi lain, bisa dikatakan sebagai upaya untuk merebut dan mempertahankan posisi struktural tersebut dalam partai maupun pemerintahan (sebagai anggota dewan). Posisi sebagai elit partai maupun anggota dewan jelas lebih baik dan menguntungkan dibanding dengan profesi sebelumnya.

Menurut Mack dan Snyder, sebagaimana dikutip oleh Tedd Robert Gurr, konflik itu bisa terjadi disebabkan adanya upaya-upaya untuk mendapatkan kontrol sumber-sumber dan posisi-posisi yang langka atau untuk mempengaruhi perilaku dengan tujuan-tujuan tertentu (Rauf, 2001: 6). Posisi sebagai elit partai maupun sebagai anggota dewan adalah posisi langka dalam masyarakat. Tetapi jika mendapatkan posisi tersebut, disamping mampu meraih penghasilan ekonomi yang lebih besar dari masyarakat pada umumnya di Indonesia, juga bisa dipakai untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh tertentu.

Dengan demikian, keberhasilan untuk menghalangi langkah partai lain agar tidak menjadi ancaman bagi partainya sendiri, akan mendapatkan nilai tertentu terhadap elit yang mampu menggerakkan massanya, meskipun hal itu menimbulkan kondisi konflik. Bisa juga dikatakan bahwa secara tidak langsung, hal itu merupakan upaya untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Dalam hal ini adalah uang, karena penghasilan anggota dewan lebih besar dan pasti. Berposisi sebagai elit partai maupun anggota legislatif akan mampu membuat pengaruh. Misalnya membuat jalan raya dan perbaikan kampung di daerah anggota partai yang bersangkutan. Atau membuat kebijakan pertanian tertentu, atau justru membela hak-hak kaum marginal. Setelah pemilu, tercatat kemudian tokoh partai seperti S tetap menjadi anggota

dewan dan kemudian terpilih dengan suara mayoritas untuk memimpin partai ini. Elit lain, DA terpilih menjadi anggota dewan untuk daerah tingkat I.

Ketika di peraturan daerah anti perjudian diundangkan di Bali, menurut keterangan beberapa pihak, anggota-anggota legislatif daerah Tabanan yang mempunyai latar belakang aktifitas judi, mencoba menghalangi pemberlakuan peraturan daerah tersebut.

5.3. Budaya

Dimensi budaya yang dimaksudkan disini adalah budaya-budaya atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di dalam masyarakat yang berpotensi memicu munculnya konflik. Meskipun budaya tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekerasan tetapi penafsiran yang keliru mampu mendorong terciptanya konflik. Di Tabanan, dijumpai adanya budaya tajan, minuman keras serta semboyan-semboyan kultural yang mampu menggerakkan solidaritas massa.

5.3.1. Budaya Kekerasan

Menjelaskan konflik antar partai politik di kabupaten Tabanan, juga bisa dilihat dari adanya unsur budaya yang mengandung unsur kekerasan di dalam masyarakat. Menurut Hermawan Sulisty dalam menjelaskan fenomena kekerasan antar partai politik bisa dilihat dari budaya yang mengandung unsur kekerasan di tingkat masyarakat. Misalnya yang terjadi di daerah Madura, Jawa Timur dalam pemilihan umum 1999 yang lalu, munculnya konflik bisa dilihat dari adanya budaya kekerasan dalam masyarakat setempat. Budaya carok misalnya akan

mendukung munculnya kekerasan yang terjadi antar kontestan partai politik pada kampanye tersebut. Dalam kaitan ini juga disebutkan adanya unsur yang mendukung budaya kekerasan tersebut, seperti membawa senjata tajam dan sebagainya (Sulistyo, 2000: 13)

Dalam kasus konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan ini, budaya kekerasan itu teradaptasi dari adu ayam jago (*tajen* dalam bahasa daerah Bali) dan kebiasaan minum-minuman keras. Jika dilihat dari upaya penyelesaian konflik, sabungan ayam sesungguhnya merupakan penyelesaian masalah yang bersifat *zero sum* konflik. Artinya penyelesaian dilakukan sampai salah satu pihak berhasil mencapai kemenangan dengan menghilangkan pihak yang lain.

Dikaitkan dengan fenomena demikian, dari keterangan-keterangan yang dikumpulkan di lapangan, baik dari masyarakat biasa, elit partai politik maupun tokoh politik sesungguhnya banyak dari para pelaku dari konflik ini berasal dari para bebotoh yang suka menggelar aduan ayam. Hal itu tidak saja terlihat dari simpatisan PDI Perjuangan tetapi juga simpatisan Partai Golkar serta beberapa simpatisan PNI Marhaenisme. Menurut keterangan masyarakat setempat serta perangkat desa yang dihubungi, konflik antar PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Tunjuk, dikenal konflik antara para penggemar sabungan ayam. Di sini yang dilihat adalah metode penyelesaian masalahnya yang dipakai, yakni berupaya mengalahkan atau bahkan menghilangkan salah satunya agar kemenangan berada di pihaknya. Cara demikian merupakan adaptasi permainan *tajen* dimana apabila salah satu ayam dikatakan menang, berarti yang lainnya mati. Seorang simpatisan Partai Golkar di wilayah

Tunjuk dikeroyok oleh massa PDI Perjuangan. Konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di daerah Selemadeg juga disebutkan banyak melibatkan simpatisan PDI Perjuangan yang sebelumnya dikenal sebagai bebotoh tajen. Sedangkan menurut tokoh Partai Golkar di Abiantuwung, N.R., ketika rumahnya diserbu oleh massa yang memakai baju merah dan hitam, disamping melempari rumahnya para penyerang itu mengacungkan senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata hendak membunuh tokoh Partai Golkar yang ada.

Menurut salah seorang saksi, pegawai pemda yang sering mengikuti perjalanan partai politik, J, disebutkan budaya kekerasan tersebut seolah sengaja diciptakan. Sebelum melakukan arak-arakan partai, massa partai akan berkumpul dulu dan kemudian meminum minuman keras. Jika kondisinya sudah dalam keadaan mabuk, mereka akan melakukan perjalanan konvoi dengan tujuan tertentu. Kondisi setengah sadar seperti ini akan membuat simpatisan partai ini akan berani melakukan apa saja, sesuai dengan arus emosi yang ada pada saat itu. Menurut J, saat dirinya melakukan tugas kantornya, ia pernah disodori kelewang oleh massa simpatisan partai yang sedang marah. Ini artinya dalam konvoi tersebut, senjata tajam juga dibawa.

Elemen kekerasan tersebut juga terlihat pada Partai Golkar. Beberapa simpatisan dan elit PDI Perjuangan menyebutkan bahwa ketika terjadi konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di daerah Selemadeg, simpatisan ini menemukan adanya batu yang sudah dipersiapkan untuk menghancurkan posko-posko PDI Perjuangan yang ada di daerah itu. Pengerusakan posko PDI Perjuangan oleh simpatisan Partai Golkar terjadi pada sore hari setelah partai tersebut selesai

menghadiri acara ulang tahun di Denpasar. Pelemparan dilakukan ketika kendaraan sedang berjalan. Ini artinya senjata-senjata untuk melakukan pelemparan, memang telah dipersiapkan sebelumnya.

Unsur budaya kekerasan yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu ini akan bertambah kuat penampakkannya apabila tokoh dan elit dari kelompok tersebut, secara psikologis juga memperlihatkan sifat demikian. Konflik politik pada hakekatnya merupakan konflik kelompok. Apabila kelompok-kelompok itu dipimpin oleh seorang tokoh yang mempunyai kebiasaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, maka kemungkinan sifat individu ini akan mampu menyeret anggota kelompoknya untuk ikut berkonflik dengan yang lain. Menurut Maswadi Rauf, sifat psikologis (seperti suka kekerasan) dari pemimpin disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan. Salah satunya akibat psikologis dari faktor lingkungan itu adalah frustrasi. Ini dipandang sebagai faktor psikologis (Rauf, 2001: hal 49).

Dilihat dari konteks demikian, kekerasan-kekerasan yang dimunculkan oleh simpatisan PDI Perjuangan ini disebabkan oleh beberapa elitnya yang mempunyai sifat demikian. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah konflik, juga dengan elit struktural PDI Perjuangan serta dengan elit dan simpatisan partai yang berkonflik dengan PDI Perjuangan, disebutkan bahwa beberapa elit PDI Perjuangan kabupaten Tabanan mempunyai latar belakang yang boleh dikatakan frustrasi. Ada tokoh yang sebelum reformasi berprofesi sebagai *bebotoh tajen* (penjudi adu ayam) tetapi kini menjadi elit partai. Ada juga tokoh yang sebelumnya berprofesi sebagai sopir truk, meski dia lulusan perguruan tinggi dan kini menjadi anggota dewan, ada juga yang menjadi calo kendaraan. Disebutkan juga ada elit yang

berlatar belakang pengangguran, dipandang berandalan oleh masyarakat yang membentuk kelompok sesama pengangguran. Ketika terjadi kerusuhan antar partai yang melibatkan partai PDI Perjuangan, beberapa pihak bisa mengenali bahwa simpatisan partai yang melakukan serangan itu merupakan anak buah atau berasal dari tokoh seperti yang dikatakan diatas.

Salah seorang anggota satuan Polres Tabanan, WT, menyebutkan bahwa dalam konflik antara PDI Perjuangan dengan PNBK di Tegalinggah unjuk berasal dari seorang pegawai swasta. Pegawai ini dikenal mempunyai pengikut yang secara sosial bisa disebut termarginalkan. Menurut catatan pihak kepolisian, pelaku-pelaku kerusuhan yang terjadi di Tunjuk serta Pesiapan, berasal dari golongan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, petani atau tidak memiliki pekerjaan. Demikian juga konflik antara Partai Golkar dengan PDI Perjuangan di Selabih dikenal sebagai konflik yang melibatkan anak buah anak buah elit partai yang sebelumnya berprofesi sebagai penjudi.

5.3.2. Budaya Simbolik

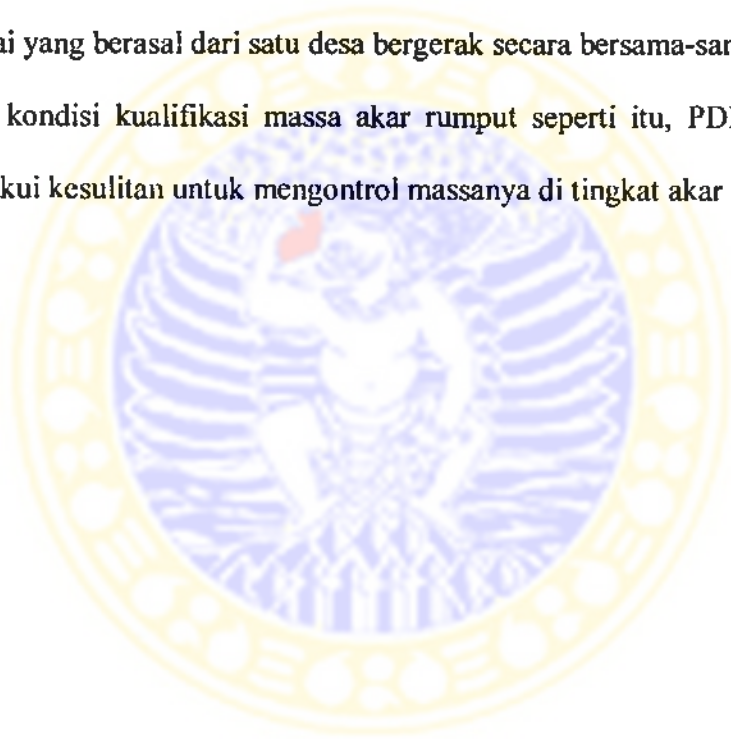
Dalam hubungan ini, perlu juga dimasukkan unsur budaya lokal simbolik yang mempengaruhi intensitas konflik. Secara kultural masyarakat Bali, terutama yang berada di pedesaan, masih memegang semboyan gotong royong yang disebut *dengan segala, segilik, seguluk salunglung sabayantaka*. Semboyan ini bisa diterjemahkan dengan saling asah-saling asih dan saling asuh, senasib sepenenderitaan bersama-sama. Melalui slogan tersebut., tindakan kebersamaan, gotong royong dan satu nasib tersebut diaktualisasikan. Hampir sama dengan itu, dalam budaya

pengambilan keputusan rapat adat, sering kali muncul kebiasaan negatif yang berupa *suryak siu* yang bisa dimaknai sebagai persetujuan secara serempak tanpa mengetahui makna kesepakatan yang diutarakan. Asal temannya sepakat, rekan yang lain juga langsung menyatakan persetujuan. Slogan seperti ini seolah mendapatkan penguat dengan semboyan “pantare” yang dipakai oleh simpatisan PDI Perjuangan dalam melakukan tindakannya. “Pantare” ini merupakan slogan yang mengidentifikasikan perjuangan partai mirip dengan aliran air. Perjuangan tidak hanya dilakukan di lapisan tertentu saja tetapi juga dilakukan pada lapisan-lapisan lain. Solidaritas kemudian menjadi bentuk tindakan dari perjuangan PDI Perjuangan.

Dengan perpaduan antara konsep gotong royong tersebut dipadukan dengan “pantare”, dan *suryak siu* maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh massa akar rumput PDI Perjuangan menjadi serempak dan cepat. Penafsiran keliru dari budaya lokal ini akan mampu memicu konflik. Setiap gangguan yang dilakukan oleh massa partai ini, di berbagai tempat di kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum 2004 tersebut, dilakukan secara bersama-sama dan serempak dari berbagai daerah. Menurut satu aktivis partai yang berasal dari kelompok akar rumput, asal mendengar adanya gangguan yang diterima oleh partai atau tokoh partai, mereka akan serempak datang ke tempat bersangkutan. Informasi ini bisa didengar melalui mulut ke mulut, kabar angin maupun melalui media elektronik dan media komunikasi modern seperti telepon seluler. Hal ini pula yang membuat simpatisan yang melakukan tindakan kekerasan tersebut bisa berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Tabanan. Bahkan ada kesan bahwa ada perputaran pengerahan massa jika hal itu harus digunakan untuk menghadapi hal yang dipandang mengganggu eksistensi partai. Perputaran ini

bisa berupa giliran untuk mengelabui lawan. Artinya tidak mungkin massa PDI Perjuangan dari desa tertentu akan bergerak untuk menghadapi persoalan partai pada desa yang bersangkutan. Hal inilah yang membuat bahwa hampir semua elit partai yang menjadi korban kekerasan PDI Perjuangan tidak mengenal orang-orang yang datang melempari rumahnya atau mencabut bendera partai kompetitornya. Jikapun mengenal hampir dipastikan orang tersebut berasal dari wilayah yang jauh dari wilayah konflik. Slogan budaya seperti yang disebutkan diatas, banyak membuat simpatisan partai yang berasal dari satu desa bergerak secara bersama-sama

Dengan kondisi kualifikasi massa akar rumput seperti itu, PDI Perjuangan memang mengakui kesulitan untuk mengontrol massanya di tingkat akar rumput.



BAB 6

PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN MENJELANG PEMILU LEGISLATIF 2004

Konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang diselenggarakannya pemilu legislatif 2004, cukup mengkhawatirkan masyarakat, dan berbagai komponennya. Konflik yang terjadi termasuk cukup tinggi. Kalau dilihat ke belakang, ketegangan-ketegangan politik bisa dilacak mulai dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Sejak saat itu sering selalu dijumpai arak-arakan sepeda motor di jalan dengan perilaku pengendara yang ugal-ugalan. Atau ada persaingan pemasangan spanduk partai politik di pinggir-pinggir jalan. Tahun 1999, Kabupaten Tabanan merupakan salah satu daerah yang dilanda kerusuhan berupa penghancuran gedung-gedung pemerintah, setelah Megawati gagal menjadi presiden.

Karena itulah kemudian, ketika terjadi rentetan konflik partai politik yang berlangsung sporadis di berbagai wilayah di kabupaten ini menjelang pemilu legislatif masyarakat termasuk partai politik berupaya mengatasinya. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni resolusi banyak jalur (*multitrack*), upaya formal serta pendidikan politik.

6.1. Resolusi *Multitrack*

Penyelesaian konflik model *multitrack* ini melibatkan para elit dan tokoh-tokoh maupun lembaga yang hidup dan diakui perannya dalam masyarakat. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai komponen ini juga

beragam, sesuai dengan kemampuan dan inisiatif mereka seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase sampai dengan upaya negosiasi informal antara simpatisan partai maupun elit partai. Mekanisme inilah menciptakan proses akomodasi berupa kompromis dan konsensus yang pada akhirnya mampu meredam konflik antar partai..

Pada setiap langkah perlu dibangun resolusi konflik tanpa kekerasan berupa langkah-langkah diplomasi, negosiasi dan dialog-dialog pemecahan masalah. Melalui dialog-dialog informal secara intensif di tingkat komunitas, maka konflik bisa dikurangi, ketegangan diturunkan, prasangka dikikis dan selanjutnya konflik bisa ditransformasikan menuju kerjasama antar komunitas (Triyono, 2001: 154-157).

6.1.1. Peran Elit Lokal

Dalam penyelesaian konflik antar partai di kabupaten Tabanan ini, langkah-langkah yang dilakukan elit lokal memegang peranan cukup penting. Yang dimaksudkan dengan elit lokal disini adalah tokoh-tokoh yang menduduki jabatan sentral formal di kabupaten ini yang mempunyai pengaruh dalam hal hubungannya dengan pemilihan umum. Mereka-mereka itu adalah bupati, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Panwaslu, serta Kapolres. Dalam tindakannya, elit-elit ini berperan sebagai konsiliator yang mampu menghasilkan konsensus dan kompromis terhadap konflik-konflik tersebut.

Konsiliasi diartikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dengan intervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini bertindak secara aktif. Konsiliator mengambil inisiatif dan menyusun langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat

putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang berkonflik sendiri (Sutrisno, 2001: 219).

Konsensus (dalam hal ini konsensus pendapat gabungan) artinya disamping masing-masing pihak bersedia mengurangi tuntutan dan pandangannya semula, pihak yang berkonflik juga memakai pendapat pihak yang berada di luar konflik untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Itu artinya pendapat-pendapat pihak yang berkonflik tetap dipakai tetapi tidak sampai menghilangkannya secara maksimal. Sedangkan kompromis (*compromise*), artinya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersedia saling mengurangiuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian dari perselisihan yang ada. Dalam sosiologi, kompromis ini merupakan salah satu bentuk dari akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses dimana orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, saling mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Dengan demikian, dalam menyelesaikan konflik ada kesamaan antara konsensus gabungan dengan upaya kompromis ini. (Soekanto, 2003: 77)

Penyelesaian konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan bisa diredam melalui upaya konsensus dan kompromis dengan teknik konsiliasi. Artinya konsensus dan kompromis itu terjadi melalui upaya konsiliasi. Pihak ketiga yang membantu melahirkan kompromis ini adalah bupati, pejabat KPU, Panwaslu dan kapolres.

Ketika konflik antar partai politik bertambah panas, bupati Tabanan membuat langkah mengundang pimpinan partai politik yang ada pada pertengahan bulan Agustus. Dalam catatan pihak kepolisian, sejak awal tahun sampai bulan

Agustus 2003 konflik antar partai yang terjadi sudah melibatkan partai-partai yang dipandang mampu meraih suara signifikan, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK.

Di sektor wilayah kecamatan, konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar telah pecah di Kecamatan Selemadeg, Tabanan, Kerambitan serta Marga. Sedangkan konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme terjadi di Kecamatan Penebel dan Tabanan. Konflik antara PDI Perjuangan dengan PNBK terjadi di Kecamatan Penebel. Semua konflik itu terbuka, artinya terjadi benturan antara simpatisan maupun pengrusakan papan nama serta pembubaran secara paksa pertemuan yang dilakukan partai lain (di luar PDI Perjuangan).

Dari kondisi itulah kemudian muncul upaya penyelesaian konflik di kantor Bupati Tabanan tanggal 13 Agustus 2003. Pertemuan ini, disamping dihadiri oleh bupati dan elit partai juga oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu dan Kapolres. Tujuan dari pertemuan itu mengajak para pimpinan partai politik dan semua komponen organisasi politik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Hasil dari pertemuan dituangkan dalam kesepakatan yang isinya:

1. Disepakati untuk mempermaklumkan dalam mengadakan setiap kegiatan partai dengan aparat setempat sesuai dengan tingkatan kegiatan, yaitu;
 - Tingkat desa, dengan kepala desa dan aparatnya,
 - Tingkat kecamatan dengan camat dengan unsur muspikanya,
 - Tingkat kabupaten dengan bupati cq kepala kantor Kasbang Linmas dan Trantib Kabupaten Tabanan dan unsur Forum Pimpinan daerah.

- Dalam setiap kegiatan agar tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
2. Pemasangan atribut partai dalam setiap kegiatan ditoleransi selama 3 hari.
 3. Untuk pendirian sekretariat partai politik, sebelumnya agar mendapatkan surat rekomendasi atau keterangan domisili dari kepala desa dan diketahui oleh camat dimana sekretariat itu dibangun.
 4. Setiap partai politik wajib ikut memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban di kabupaten Tabanan.
 5. Tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti:
 - Kantor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah,
 - Pada perempatan Jalan Pahlawan ke timur sampai dengan depan kantor DPRD Tabanan.
 6. Menyatakan tidak berlaku lagi instruksi Bupati Nomor: 300/096/KBL Trantib tanggal 24 Februari 2003.

Jika dilihat lebih jauh, poin-poin persetujuan diatas merupakan bentuk konsensus gabungan dan kompromis karena merupakan hasil kesepakatan semua pihak yang ikut pertemuan tersebut. Sebagai pemimpin yang membawahi daerah kabupaten Tabanan, Bupati Tabanan ikut ambil bagian dalam pertemuan tersebut dan sebagai pejabat perangkat pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Panwaslu Tabanan juga ikut serta. Dalam pertemuan itu, bupati meminta agar pihak partai politik mampu menjaga ketertiban di Kabupaten Tabanan menghindari konflik, agar tidak menimbulkan korban jiwa atau materi seperti yang pernah terjadi di kabupaten lain. Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu memberikan

penjelasan tentang aturan-aturan yang semestinya ditaati oleh partai politik menjelang diselenggarakannya pemilu (2004).

Surat edaran dari Bupati Tabanan ini juga ditembuskan kepada para camat dan perangkat desa, yang merupakan bawahan administratif dari bupati. Sehingga penegasan itu juga menjadi acuan bagi camat dan kepala desa beserta perangkatnya mengetahui bagaimana upaya penertiban keamanan di kabupaten ini.

Jika dilihat dari latar belakang munculnya konflik sebelum diadakannya pertemuan lintas partai tersebut, alasan yang muncul dari kubu PDI Perjuangan dalam melakukan gangguan terhadap aktifitas partai lain terletak pada persoalan ijin. Pencabutan bendera PNI Marhaenisme serta kata-kata pedas yang dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan di Dusun Tuakilang tanggal 25 Januari 2003, disebabkan oleh kecurigaan terhadap kelengkapan surat-surat tersebut. Demikian pula halnya dengan konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme yang terjadi di Bongan Lebah, Tabanan pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003. Menurut pihak PDI Perjuangan pencabutan dan perusakan papan nama itu diakibatkan karena partai politik yang bersangkutan tidak mempunyai ijin dalam memasang atribut maupun memasang papan nama.

Dengan demikian, kesepakatan yang tercantum dalam butir-butir dalam pertemuan lintas partai tersebut, disamping merupakan bentuk konsensus juga bisa dikatakan sebagai upaya akomodasi untuk mengatasi konflik. PDI Perjuangan yang meminta agar segala ketentuan-ketentuan tersebut bisa dipenuhi oleh partai-partai politik lain, seperti PNI Marhaenisme dan PNBK. Butiran tersebut merupakan hasil konsensus pertemuan antar para pemimpin partai di kabupaten Tabanan.

Dilihat dari sisi kompromis, kesepakatan lintas partai ini mencerminkan adanya kesediaan pengurangan tuntutan dari partai-partai utama yang ada di kabupaten Tabanan. Yang dimaksud dengan partai utama itu adalah partai yang mempunyai pengaruh paling banyak di Tabanan yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PNI Marhaenisme dan PNBK. Wujud kompromis yang diperlihatkan oleh PDI Perjuangan berupa diterimanya tenggang waktu tiga hari dalam pemasangan atribut partai, manakala ada kegiatan partai. Sebelumnya, partai ini terlihat memasang atribut-atribut lebih dari tiga hari jika mengadakan kegiatan. Partai ini sering melakukan kegiatan kepartaian, dalam bentuk penyambutan petinggi partai yang berkunjung ke daerah yang bersangkutan, meresmikan kelompok kegiatan yang dibentuknya, atau meresmikan pembukaan anak cabang.

Partai Golkar merupakan partai yang boleh dikatakan sebagai pihak yang paling mengalah. Kesepakatan kelima dalam pertemuan lintas partai itu menyebutkan bahwa tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti: kantor pemerintah, tempat ibadah dan sekolah; pada perempatan Jalan pahlawan ke timur sampai dengan kantor DPRD Tabanan. Sesungguhnya jika dilihat dari pandangan strategis partai, Jalan Pahlawan ini merupakan posisi yang paling strategis bagi Partai Golkar untuk memasang atribut kepartaian. Ini disebabkan karena kantor sekretariat Partai Golkar ada di jalan ini. Tetapi Partai Golkar tetap bersedia menerima hal tersebut. Padahal, jalan ini merupakan arus penghubung antara jalur kota Tabanan menuju Denpasar, yang sesungguhnya merupakan lokasi strategis untuk memasang atribut, seperti misalnya balon udara yang bergambar lambang Partai Golkar.

Setelah peristiwa pencabutan-pencabutan atribut PNI Marhaenisme di Bongan Lebah itu, pihak PNI Marhaenisme kemudian melakukan koordinasi dengan pihak desa dan kemudian meminta perijinan kepada linmas. Koordinasi dengan aparat desa merupakan langkah kompromis dari PNI Marhaenisme. Tetapi dalam keterangan sekretaris partai ini, meski telah mendapat ijin dari Linmas, pemasangan tidak jadi dilakukan karena papan nama keburu dihancurkan oleh simpatisan PDI Perjuangan.

Pada tingkat wilayah yang lebih kecil, upaya konsensus gabungan dan upaya kompromis juga terjadi antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme dan Partai Golkar di desa Sanda. Kedua kejadian ini berlangsung pada saat waktu kampanye pemilu legislatif. Pihak ketiga yang membantu terjadinya kompromis ini adalah Kapolsek Pupuan dengan mekanisme penyelesaian mediasi. Disini pihak ketiga aktif memberikan arahan atau bimbingan atau arahan guna penyelesaian konflik.

Kejadian di Desa Sanda terjadi pada tanggal 24 Maret 2004. Pada pukul 06.00 telah terjadi pencabutan sebuah bendera Partai Golkar dan bendera PNI Marhaenisme. Pelakunya adalah rombongan massa PDI Perjuangan asal Pupuan yang lewat di jalan tersebut. Rombongan ini hendak mengikuti kampanye di Gianyar, kabupaten yang jaraknya hampir 90 kilometer dari kota kecamatan Pupuan. Akibat pencabutan atribut partai tersebut, masyarakat desa Sanda bereaksi dan mengancam akan menghadang rombongan PDI Perjuangan sepulang dari kampanye di Gianyar.

Masalah ini kemudian bisa diatasi karena kapolsek Pupuan turun tangan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Sanda dan tokoh-tokoh partai yang ada di Pupuan untuk meredakan suasana. Upaya konsensus

berdasarkan pembicaraan yang berlangsung kemudian, menghasilkan kesepakatan bahwa bendera yang dicabut tersebut akan diganti dan dipasang kembali, dan masyarakat Sanda bersedia menjaga seluruh atribut partai yang ada di desa tersebut.

Hasil ini merupakan bentuk konsensus gabungan karena disamping merupakan hasil pembicaraan dan usulan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah (kapolsek), juga hasil pembicaraan tokoh-tokoh partai yang ada. Pada sisi lain, kompromis juga berlangsung antara pihak PDI Perjuangan dengan masyarakat Sanda. PDI Perjuangan tidak mempersoalkan jika bendera partai-partai tersebut dipasang kembali, yang artinya secara tidak langsung merupakan pengurangan tuntutan (tidak menginginkan lagi agar bendera-bendera itu dicabut), sedangkan pada pihak lain, masyarakat Sanda akan bersedia menjaga keamanan semua bendera partai yang terpasang di desanya. Tidak hanya menjaga bendera Partai Golkar atau PNI Marhaenisme tetapi juga partai-partai lain yang memasang bendera di sepanjang jalan di desa tersebut, termasuk juga bendera PDI Perjuangan.

6.1.2. Peranan Lembaga Adat dan Dinas

Adat merupakan lembaga yang amat melekat dalam praktik sosial masyarakat Bali. Meskipun secara umum lembaga ini lebih banyak mengacu kepada masyarakat beragama Hindu tetapi di beberapa wilayah juga bisa mengatur masyarakat yang bukan beragama Hindu. Praktik ini bisa terjadi pada daerah atau *banjar* yang mempunyai penduduk dimana masyarakatnya tidak hanya sekedar beragama Hindu saja. Misalnya umat yang beragama Kristen bisa menolong kegiatan-kegiatan umat yang beragama Hindu. Praktik ini dijumpai di daerah Dalung, Kabupaten Badung.

Dalam sistem sosial di Bali, ada dua lembaga yang mengatur tata sosial tersebut, yaitu lembaga adat dan lembaga dinas. Lembaga adat lebih mengatur hubungan sosial yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, agama dan budaya. Sedangkan lembaga dinas mengatur hubungan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan serta tata-tertib yang menyangkut administrasi kependudukan. Di Bali bisa saja terjadi dua atau tiga bahkan lebih lembaga dinas yang tergabung ke dalam satu lembaga adat. Hal ini amat terkait dengan sejarah berdirinya dari lembaga adat tersebut.

Lembaga adat memiliki perangkat normatif yang ampuh untuk mengatur kehidupan sosial, budaya dan religius yang disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* ini merupakan seperangkat tata-krama, patokan-patokan perilaku yang harus ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah naungan lembaga adat tersebut. Didalamnya disamping diatur perilaku sosial juga diatur perilaku budaya dan dalam hubungan dengan agama. Anggota masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari ketentuan ini akan mendapat hukuman sosial yang akibat psikologisnya cukup berat. Misalnya mendapatkan denda materi yang telah ditetapkan dalam *awig-awig*, atau mendapat hukuman tidak dibantu dalam upacara-upacara adat keluarga dalam kurun waktu tertentu. Inilah yang membuat lembaga ini amat ditakuti oleh masyarakat Bali. *Awig-awig* ini dibuat oleh *paruman* (rapat musyawarah) antar anggota masyarakat adat.

Karena itu, lembaga adat mempunyai peranan yang cukup besar dalam menjaga ketertiban atau mengembalikan keadaan disharmoni yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Meski demikian, dalam langkah mengamankan suasana, lembaga

adat juga melakukan tindakan secara bersama-sama dengan lembaga dinas. Demikian pula halnya pada konflik dan kekerasan antar partai politik yang terjadi pada masa pemilu di Kabupaten Tabanan antara tahun 2003 sampai menjelang pemilu legislatif 2004.

Ada beberapa upaya yang dipakai lembaga adat melalui tokoh-tokohnya untuk meredakan ketegangan yang terjadi, maupun dalam mencegah munculnya kembali konflik antar partai yang terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Tabanan. Mekanisme awal yang dilakukan oleh lembaga adat dan dinas ini untuk meredakan konflik itu adalah melalui mediasi.

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang memerlukan intervensi pihak ketiga, dimana pihak ketiga ini aktif memberikan bimbingan atau arahan untuk mencapai penyelesaian masalah, tetapi pihak ketiga ini tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan (Sutrisno, 2001: 219)

Setelah mediasi berhasil meredakan konflik antar partai itu, lembaga adat kemudian membuat langkah menciptakan instrument untuk mengamankan lingkungan. Instrumen itu berupa perangkat normatif yang berisi aturan-aturan yang bisa mengikat masyarakat secara internal maupun eksternal demi terciptanya ketertiban sosial di lingkungan tersebut. Perangkat normatif ini bisa merupakan kesepakatan bersama atau merupakan bagian dari *awig-awig* yang disebut dengan *perarem*.

Dalam konteks pendekatan adat ini, kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan, Kecamatan Tabanan, upaya mediasi dilakukan dengan mempertemukan para wakil-wakil partai yang

terlibat konflik di daerah itu bersama dengan warga setempat.. Di banjar ini memang ada dua partai politik dominan yaitu PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Pihak kepala adat memanggil para tokoh-tokoh partai itu di balai pertemuan dan mengadakan kesepakatan. Menurut tokoh adat yang ada di daerah itu, pemanggilan ini dilakukan untuk bisa melakukan pendekatan pribadi dan dari hati kehati, berbicara secara terus terang guna menjaga keamanan wilayah. Pendekatan dengan mempertemukan tokoh-tokoh partai tersebut mampu meredakan ketegangan yang telah terjadi sebelumnya. Di balai desa semua persoalan yang muncul dalam konflik antar partai dikemukakan agar permasalahannya diketahui oleh masyarakat. Tokoh adat dan dinas kemudian memberikan petunjuk-petunjuk dan saran untuk menjaga ketertiban di lingkungannya. Cara terbuka seperti ini diperlukan untuk menjelaskan persoalan kepada masyarakat, sebab sebelumnya masyarakat Banjar Tunjuk Selatan cukup tegang dengan peristiwa yang terjadi.

Upaya kedua dilakukan dengan mengadakan kesepakatan bersama antara adat, dinas dan masyarakat termasuk juga tokoh-tokoh dan simpatisan partai di desa Tunjuk Selatan berdasarkan atas pertemuan bersama itu. Kesepakatan yang dibuat dengan bentuk perundang-undangan itu, diantaranya berbunyi:

Pasal 2

- 1). Setiap warga Desa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menciptakan rasa aman dari dirinya sendiri.
- 2). Rasa aman yang dimaksud dalam ayat 1) pasal ini dikembangkan dalam bentuk kelompok kecil maupun kelompok besar.

- 3). Rasa aman yang dimaksud pada ayat 2) pasal ini dikembangkan dalam masyarakat banjar Adat, banjar Dinas, dan selanjutnya dikembangkan dalam masyarakat Desa.

Pasal 3

Setiap warga masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok hendaknya dapat saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain.

Pasal 4

- 1). Setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menjaga keamanan anggota kelompok masing-masing.
- 2). Dalam setiap kegiatan kelompok yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk dilarang adanya minum-minuman keras.

Pasal 5.

- 1). Dalam setiap kegiatan organisasi yang melibatkan orang dari luar Desa hendaknya melapor kepada Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa.
- 2). Dalam laporan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan jadwal, acara, jumlah peserta yang hadir.

Pasal 6.

- 1). Bagi warga masyarakat Desa pekraman Tunjuk yang melanggar kesepakatan ini akan dikenai sanksi.

- 2). Sanksi yang dimaksud pada ayat 1) pasal ini disesuaikan dengan sanksi yang berlaku pada awig-awig Desa Pekraman Tunjuk.
- 3). Sanksi yang berhubungan dengan masalah kriminal akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan aparat keamanan.

Pasal 7

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya dari Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa Tunjuk.

Agar setiap warga mengetahuinya, kesepakatan ini disebarluaskan melalui Desa Pekraman Tunjuk dan Desa Dinas Tunjuk.

Bentuk kesepakatan ini merupakan antisipasi tegas dari Lembaga Adat yang bekerjasama dengan Lembaga Dinas Tunjuk untuk mencegah terulangnya kembali konflik politik yang terjadi di desa tersebut. Kesepakatan itu tidak hanya memberikan peringatan dan ikatan secara internal untuk warga Tunjuk tetapi juga warga luar. Kesepakatan ini tidak pernah dibuat sebelum terjadinya konflik politik itu.

Untuk lebih memantapkan dalam pelaksanaannya, kesepakatan untuk menjaga keamanan tersebut kembali disosialisasikan oleh aparat desa adat dan dinas ke seluruh banjar-banjar yang ada di lingkungan desa adat dan dinas Tunjuk. Banjar yang menjadi anggota desa adat Tunjuk ada tujuh, yaitu Banjar Bungan Kapal, Banjar Legung, Banjar Tunjuk Kaja, Banjar Tunjuk tengah, Banjar Tunjuk Kelod, Banjar Beng Kaja dan Banjar Beng Kelod. Di setiap banjar ini, tokoh-tokoh adat dan dinas

mengumpulkan masyarakat untuk menjelaskan segala kesepakatan yang telah berhasil dicapai untuk menjaga keamanan masyarakat menjelang pemilu. Sanksi-sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap kesepakatan ini juga dijelaskan.

Upaya yang dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh-tokohnya itu cukup mendatangkan hasil karena sampai dengan hari pencoblosan dalam pemilu legislatif 2004 yang berlangsung pada tanggal 5 April, tidak terjadi keributan-keributan politik lagi di Desa Tunjuk Selatan itu. Keamanan yang kondusif pada masyarakat Tunjuk malah telah berhasil diyakinkan sebelum kampanye pemilu legislatif 2004 dilakukan, sehingga menjelang maupun pada masa kampanye masyarakat Tunjuk tidak memerlukan lagi adanya ronda malam untuk menjaga keamanan.

Dalam kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah, mekanisme mediasi dilakukan dimana tokoh adat langsung berbicara saat terjadinya konflik antara kedua partai, dengan menghimbau agar pihak-pihak yang datang ke sekitar rumah tokoh PNI Marhaenisme tidak melakukan hal-hal yang merusak dan mengganggu ketenangan warga desa Bongan Lebah. Dalam melakukan pendekatan tersebut, kepala adat dengan didampingi oleh beberapa perangkat adat lainnya langsung berbicara kepada pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, pada saat terjadinya ketegangan identitas adat juga memegang peran penting. Saat memberikan imbauan tokoh-tokoh adat itu memakai pakaian adat Bali. Pada saat itu, kepala Litbang Linmas Tabanan, datang memberikan penjelasan tentang kasus pemasangan papan nama PNI Marhaenisme dengan memakai pakaian adat pula.

Seperti juga halnya di Desa Tunjuk, untuk mengantisipasi agar konflik antar partai tidak berkelanjutan serta demi menjaga keamanan ketertiban lingkungan, Banjar Adat Bongan Kaja (II) desa Bongan membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan *perarem* yang isinya menekankan pada tekad masyarakat untuk menjaga keamanan. Isi kesepakatan itu adalah:

- 1). Menjaga stabilitas keamanan demi terciptanya suasana yang amat dan kondusif di lingkungan Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II).
- 2). Krama Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) sepakat menindak tegas bagi siapa saja yang mencoba melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harta benda atau jiwa (menciptakan suasana keruh/tidak kondusif).
- 3). Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) sepakat mengamankan/melindungi segala aset apapun bentuknya yang ada di Lingkungan Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II).
- 4). Mengacu pada poin 1,2 dan 3 diatas,Banjar Adat Bongan Lebah kaja (II) tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keamanan dari Polsek, Polres dan Koramil.

Kesepakatan diatas bertujuan mengikat baik pihak internal maupun eksternal yang mengganggu keamanan dari lingkungan banjar tersebut.

Upaya kesepakatan ini ternyata efektif untuk menjaga keamanan karena tidak lagi terjadi konflik antar partai di desa tersebut, hingga Berlangsungnya pemilihan umum legislatif bulan April 2003.

Pada kasus ketegangan antara PDI Perjuangan dengan PNBK di Desa Tegalinggah, Kecamatan Penebel, pihak adat tidak langsung mengeluarkan pernyataan pada saat terjadinya peristiwa tetapi kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan menjelang digelarnya kampanye dan pemilu legislatif 2004. Upaya menjaga keamanan itu dilakukan dengan melakukan ronda setiap malam yang melibatkan masyarakat adat di lingkungan wilayah Desa Tegalinggah. Konflik di desa ini terjadi setelah beberapa rombongan simpatisan PDI Perjuangan melakukan pengrusakan terhadap tempat suci dan bagian rumah dari simpatisan PNBK. Saat itu sedang diselenggarakan rapat konsolidasi partai dalam rangka menghadapi pemilu 2004.

6.1.3. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Partai Politik

Dalam konsep penanganan konflik dengan upaya banyak jalur (*multitrack*), peranan seorang tokoh masyarakat termasuk tokoh dan simpatisan partai untuk meredakan konflik cukup penting. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh tokoh ini serta inisiatif-inisiatif yang dilakukannya akan mampu memberikan sumbangan dalam meredakan konflik. Termasuk juga di dalamnya negosiasi dan diplomasi informal.

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif 2004, peranan tokoh ini tidak bisa dianggap remeh. Pada peristiwa yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar misalnya, inisiatif dari tokoh masyarakat, dalam hal ini kepala desa, mampu memberikan suasana ke arah peredaan konflik. Atau mampu mencegah agar konflik

antar partai tersebut tidak terulang lagi di wilayah tersebut.. Kepala Desa Tunjuk, WU mengeluarkan inisiatif berupa pelarangan adanya kampanye yang digelar di seluruh Kebendesaan Tunjuk, yang meliputi tujuh banjar. Dalam pandangannya kampanye hanya akan membangkitkan lagi perasaan-perasaan persaingan antar simpatisan partai politik yang ada di desa tersebut dan membangkitkan sentimen konflik yang terjadi di masa lalu. Ternyata ajakan ini diterima oleh seluruh masyarakat di kebendesaan Tunjuk. Di desa ini simpatisan PDI perjuangan dan Partai Golkar cukup banyak. Kesepakatan ini memang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama antara Bendesa Adat dengan Dinas yang ditandatangani sebelumnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kepala Desa Abiantuwung, GW.

Dengan upaya pelarangan ini, keadaan Desa Tunjuk dan Abiantuwung pada masa kampanye, aman dan tertib. Konflik-konflik yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi dan pada hari pencoblosan, pemilu berlangsung aman dan lancar.

Ketika terjadi konflik antar partai di Banjar Bongon Lebah, inisiatif MS Bsc datang pada saat konflik terjadi. Tokoh ini dalam pekerjaannya sehari-hari menjabat sebagai kepala Kesbang Linmas dan Trantib Tabanan. Cara ini merupakan upaya positif karena secara langsung mampu meredam suasana amarah antara dua pihak. Pada waktu itu, rumah sekretaris PNI Marhaenisme Tabanan yang ada di Bongon Lebah, didatangi oleh simpatisan PDI Perjuangan yang mempertanyakan ijin pemasangan papan nama sekretariat PNI Marhaenisme. Persoalan ini menjadi perdebatan panjang antara dua pihak. Bagi pihak PNI Marhaenisme, tidaklah pantas jika persoalan pemasangan papan nama itu ditanyakan oleh pihak PDI Perjuangan karena kewenangan itu ada pada Kasbang Linmas.

Satu hal positif lain yang bisa dilihat dari upaya MS adalah uniform yang dikenakannya. Saat mendatangi wilayah konflik, dia memakai pakaian adat. Dengan simbol-simbol adat itu situasi tegang bisa reda karena disamping memberikan penjelasan, simbol pakaian adat yang dipakai mampu membuat pihak PDI Perjuangan meredakan tuntutananya. Pakaian adat ini mampu memberikan suasana kesamaan sosial diantara simpatisan partai politik sebagai orang Bali, disamping juga kekhawatiran akan tindakan adat yang diterimanya jika melakukan keonaran di tempat lain. Beberapa desa di Tabanan juga menerapkan cara berupa pemakaian pakaian adat madya saat melakukan pencoblosan pemilihan umum.

Pada konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar dan PNI Marhaenisme di Desa Sanda, Kapolsek Pupuan mengambil inisiatif untuk mempertemukan antara tokoh partai dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk membicarakan persoalan yang terjadi pada pagi harinya. Cara mempertemukan para tokoh partai dengan tokoh masyarakat yang ditengahi oleh kapolsek ini, ternyata tidak saja mampu meredakan ketegangan politik tetapi mampu membuat masyarakat bersedia menjaga aset-aset partai yang dipasang di desa tersebut.

Yang tidak bisa dihilangkan perannya adalah hubungan persahabatan antara simpatisan-simpatisan partai politik. Ini terjadi pada kasus konflik antara PDI Perjuangan dengan PNI Marhaenisme di Banjar Bongan Lebah. Tokoh partai yang ada di desa Bongan Lebah ini sebelumnya merupakan aktivis PDI Perjuangan. Setelah konflik pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003 itu, tokoh PNI Marhaenisme ini sering melakukan kontak-kontak persahabatan dengan simpatisan PDI Perjuangan dalam acara-acara informal. Kesempatan berbincang-bincang dalam suasana

informal ini dipakai untuk memasukkan upaya-upaya meredakan ketegangan, seperti menghimbau agar persahabatan tidak dihilangkan dan tidak lagi mengulangi upaya-upaya konflik seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Malah menurut pengakuan tokoh PNI Marhaenisme Bongan Lebah, MS salah seorang rekannya saat masih aktif di PDI Perjuangan mengaku secara terus terang, bahwa merekalah yang melakukan penyerangan di Banjar Bongan Lebah. Pengakuan secara jujur oleh temanya ini dipakai untuk menanamkan upaya agar tidak melakukan cara-cara anarkhis seperti itu.

Tokoh PNI Marhaenisme di desa lain, yaitu Pandak juga melakukan sikap yang sama. Tokoh ini memelihara hubungan baik dengan simpatisan PDI Perjuangan. Upaya yang dilakukannya untuk menghindari konflik adalah dengan mendekati teman-temannya di PDI Perjuangan menjelang dilakukannya kampanye oleh PNI Marhaenisme. Cara memberitahukan waktu kampanye dan rute yang akan dilalui ternyata efektif mencegah konflik. Dalam keterangan tokoh PNI Marhaenisme Desa Pandak ini, NG, selama kampanye pemilu legislatif PNI Marhaenisme yang melakukan kampanye di lingkungan Pandak tidak mendapat gangguan dari partai manapun.

Sikap dan himbauan tokoh parta politik untuk tidak melawan segala macam provokasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga menunjang konflik tidak semakin meruncing. Ketika terjadi konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di kota Tabanan, saat diselenggarakannya hari ulang tahun Golkar tanggal 25 Oktober 2003, tokoh Partai Golkar Bapak PY, berupaya menenangkan anak buahnya agar tidak melakukan aksi balas dendam. Menurut pengakuan PY yang juga

menjabat sekretaris Partai Golkar Tabanan, dirinya sampai mondar mandir berjalan kaki antara kota Tabanan dengan Lapangan Daging Carik yang berjarak sekitar dua kilometer untuk menghimbau massanya tidak membalas. Ia juga menjenguk kader-kader Partai Golkar yang cedera di rumah sakit. Korban yang luka berat, yaitu WS, tokoh Partai Golkar Kerambitan, dalam keadaan sakit dan terluka, tetap juga menyarankan agar massa Golkar tidak melakukan pembalasan terhadap simpatisan PDI Perjuangan yang melakukan intimidasi dan kerusuhan. Tokoh Partai Golkar lain, yang menjadi ketua panitia dalam penggalangan masa saat ulang tahun partai itu, yaitu DPG juga menghimbau hal yang sama.

Dalam kasus ini, terutama untuk meredam konflik pendukung Partai Golkar dan PDI Perjuangan wilayah Kerambitan., upaya diplomasi yang dilakukan oleh tokoh PDI Perjuangan amat memegang peran. Tokoh Partai Golkar yang sedang menderita sakit akibat dikeroyok massa PDI Perjuangan, yaitu WS, dijenguk oleh tokoh PDI Perjuangan asal Kerambitan MA. Dua tokoh ini sebenarnya bersahabat dan sebelum terjadi reformasi, pernah tokoh PDI Perjuangan ini ditawari masuk Partai Golkar oleh WS. Upaya MA untuk menjenguk ini bisa dikatakan sebagai langkah diplomatis, yaitu seni untuk mencapai tujuan, yang mampu menahan gejolak kemarahan antara simpatisan dua partai tersebut di Kecamatan Kerambitan.

Pihak PDI Perjuangan pun setelah mendapatkan sorotan terhadap perilaku sebelumnya, tokoh-tokoh PDI Perjuangan menghimbau massanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkhis pada masa kampanye pemilihan umum.

6.2. Penyelesaian Melalui Upaya Formal

Penyelesaian konflik antar partai politik, tidak saja bisa dilakukan secara informal melalui tindakan konsensus, akomodasi atau kompromis tetapi juga bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga formal. Dalam pandangan Muhaimin A. Ruslan, konflik itu bisa diatasi melalui dua jalan, yakni jalan atas yang menurutnya merupakan jalan formal dengan memakai saluran hukum yang ada. Dan yang kedua, jalan bawah, yakni jalan informal dengan mengikuti mekanisme yang hidup dalam masyarakat.

Resolusi dengan memakai jalan atas, yakni jalan formal itu memerlukan sejumlah syarat, yakni adanya instrument hukum yang bisa dijadikan alat untuk penyelenggaraan proses penyelesaian, lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas dan pelaksana (penegak hukum) yang tidak bisa diragukan. (Ruslan, 2001: 61-62).

Dalam konteks demikian, meskipun dalam masa transisi ini masih terlihat banyak kekurangan-kekurangan aparat penegak hukum Indonesia dalam menjalankan fungsinya, tetapi dalam upaya menyelesaikan dan menekan konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan menjelang Pemilu Legislatif 2004, langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta lembaga formal yang berwenang untuk menyelesaikan konflik pemilu, cukup mempunyai pengaruh. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan pemilu ini adalah Panwaslu, yang menurut UU dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi pada pemilu.

Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Banjar Tunjuk Selatan misalnya, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, telah melakukan penangkapan

terhadap beberapa pelaku dan melakukan penahanan di Resort Kabupaten Tabanan. Pada kasus keributan di Dusun Tunjuk Kelod (Selatan), Kecamatan Tabanan, yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2003, masyarakat di wilayah ini rebut dengan dipukulnya kentongan akibat adanya isu ninja yang berkeliaran pada malam hari. Akibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian Kabupaten Tabanan, menangkap sembilan orang yang kesemuanya simpatisan PDI Perjuangan. Sebagian dari mereka-mereka yang ditangkap ini boleh dikatakan sebagai tokoh-tokoh penting partai tersebut. Penangkapan kembali dilakukan terhadap beberapa simpatisan partai ini setelah kembali terjadi keributan di wilayah yang sama tanggal 6 September 2006.

Tindakan aparat kepolisian Kabupaten Tabanan yang cukup besar adalah pada saat menangani keributan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2003. Pada tanggal ini, DPP Partai Golkar seluruh Indonesia mengadakan perayaan ulang tahunnya di Pantai Padanggalak, Denpasar. Pemusatan perayaan ulang tahun Partai Golkar se Indonesia dilangsungkan di Bali. Di Tabanan, untuk menyambut perayaan tersebut, simpatisan Partai Golkar juga hendak melakukan pemberangkatan bersama dengan kumpul terlebih dahulu di lapangan umum Daging Carik di Tabanan, sebelum berangkat ke Denpasar. Seluruh rombongan yang berasal dari kabupaten Tabanan, dikumpulkan dulu di lapangan tersebut.

Pada saat inilah kemudian terjadi bentrokan antara massa PDI Perjuangan dengan massa Partai Golkar. Bentrokan itu tidak terjadi di satu tempat saja tetapi di empat tempat, masing-masing di Lapangan Daging Carik, Kota Tabanan, perempatan Pesiapan serta di Abiantuwung, Kecamatan Kediri. Dalam bentrokan di Lapangan

Dangin Carik, tidak menimbulkan korban cedera tetapi simpatisan Partai Golkar, terutama yang wanita meminta perlindungan menuju kantor Kodim, yang kebetulan tempatnya berdekatan dengan lapangan tersebut. Pada bentrokan di kota Tabanan, satu orang simpatisan Partai Golkar, yaitu NS luka parah dan dibawa ke rumah sakit di Denpasar. Sedangkan pada konflik di Abiantuwung, empat mobil simpatisan Partai Golkar rusak. Sedangkan pada bentrokan di Pesiapan, terjadi pelemparan terhadap rombongan Partai Golkar. Di daerah ini terjadi saling dorong antara simpatisan PDI Perjuangan dengan pagar pembatas yang dibentuk oleh satuan Brimob dan polisi.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tabanan selanjutnya adalah menangkap para pelaku kerusuhan itu, lima hari setelah peristiwanya. Karena beberapa kejadiannya terjadi di jalan propinsi, yaitu di Pesiapan dan Abiantuwung, pihak kepolisian Tabanan dalam melakukan tugas penangkapan itu dibantu oleh satuan buru sergap Polda Bali. Ada enam orang yang ditangkap dan dibawa ke Polres Tabanan dalam kasus tersebut, yang semuanya merupakan simpatisan PDI Perjuangan.

Setelah peristiwa ini, benturan antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar tidak pernah lagi ada, khususnya di kota Tabanan dan di Abiantuwung. Tidak berulangnya lagi peristiwa kekerasan ini bisa dikatakan karena peran dari pihak kepolisian Tabanan yang bertindak dengan menahan pihak-pihak yang dipandang paling bertanggung jawab. Meskipun jarak antara peristiwa dengan penangkapan cukup lama, yaitu lima hari, pihak kepolisian Tabanan tetap bisa menangkap

pelakunya dan ini menandakan ada upaya pihak kepolisian untuk menegakkan ketertiban di masyarakat.

Yang dilihat dalam penanganan diatas adalah tindakan pihak kepolisian untuk menanggulangi peristiwa tersebut agar tidak meletus menjadi peristiwa yang lebih besar lagi. Tetapi kelemahan dari upaya ini terletak pada proses kelanjutannya. Dalam kasus seperti yang diuraikan diatas, tidak ada pelaku-pelaku yang ditahan itu diproses sampai ke pengadilan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan berbagai tokoh partai dan masyarakat di Tabanan, kurang maksimalnya penanganan ini yang menjadi sorotan negatif.

Pada masa kampanye, konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan tidak saja ditangani oleh pihak kepolisian tetapi juga oleh Panwaslu. Lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang (sesuai dengan ayat 1 pasal 122 UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. Lembaga ini mulai aktif sebelum pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum. Pihak kepolisian bertugas dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban, sesuai dengan tugasnya. Sedangkan yang menyangkut sengketa pemilu, ditangani oleh panwaslu.

Kejadian persengketaan yang cukup mendapat perhatian dari Panwaslu terjadi di Banjar Tuakilang, Kecamatan Tabanan. Persengketaan tersebut sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai masalah antara pihak Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan aparat desa setempat. Tetapi dalam laporan yang disampaikan oleh pihak PNBK, juga disebut-sebut adanya sejumlah simpatisan PDI Perjuangan yang memancing munculnya kejadian tersebut.

Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Maret 2004 di lingkungan Banjar Tuakilang Belodan Tabanan. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu oleh AW, seorang elit Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan, pada tanggal tersebut sekitar jam 19.00 malam datang lima lima orang pengurus ranting PDI Perjuangan Denbantas yang menanyakan tentang pemasangan bendera PNBK di desa tersebut. Oleh palapor, dikatakan bahwa pemasangan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi pengurus ranting PDI Perjuangan kemudian mengatakan bahwa pemasangan bendera partai itu harus didasarkan kesepakatan bersama Desa Denbantas. Sekitar pukul 22.35 datang kepala lingkungan Denbantas memberitahukan kepada pelapor (AW) bahwa bendesa adat Kubontingguh akan mencabut bendera PNBK.

Kasus ini kemudian ditangani oleh panwaslu. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada (pasal 129, UU No. 12/2003 ayat 1), pihak Panwaslu memanggil semua pihak, baik pelapor maupun terlapor (Bendesa Adat Kubontingguh) pada tanggal 1 April 2004 dengan mempertemukan mereka. Dalam keputusannya, Panwaslu menyatakan bahwa kasus itu berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Pihak terlapor menyadari kekeliruannya dan mengatakan bahwa

pencabutan bendera PNBK tersebut dilakukan semata-mata untuk mengamankan wilayahnya dari kekhawatiran akan terjadinya benturan antar partai pada saat kampanye. Dasar tindakan yang dipakai untuk mencabut sekitar 60 bendera itu adalah kesepakatan bersama antara Bendesa adat Kubontingguh, Kepala Desa Denbantas dan Ketua BPD Denbantas yang menyatakan bahwa untuk pemasangan bendera dan atribut partai harus memenuhi ketentuan bahwa partai yang bersangkutan mestinya memiliki kepengurusan pada tingkat desa maupun banjar, serta mendapat rekomendasi dari kelian adat dan dinas se desa Denbantas. Nampaknya rekomendasi inilah yang tidak didapatkan oleh PNBK, yang kemudian dipakai oleh aparat desa adat untuk menurunkan bendera-bendera tersebut. Kesepakatan bersama itu, memang didasarkan atas pertemuan lintas partai tanggal 6 September 2003 yang ditandatangani oleh bupati. Tetapi kesepakatan ini nampaknya hanya berlaku sampai dengan sebelum kampanye, sebab dalam undang-undang pemilu sebenarnya diberikan kebebasan untuk memasang bendera partai.

Berdasar inilah kemudian termohon (terlapor) yaitu bendesa adat Kubontingguh mengakui kesalahannya dan diterima oleh pemohon (AW), yang membuat permasalahan selesai. Panwaslu berhasil membuat keputusan ini tanggal 12 April.

Masalah lainnya yang sempat mendapat penanganan oleh panwaslu adalah penembakan yang dilakukan terhadap balon Partai Golkar. Atribut partai yang dipasang di sekretariatnya, ditembak oleh orang tidak dikenal tengah malam pada masa kampanye. Tetapi terhadap kasus ini, Panwaslu tidak menindaklanjuti karena saksi-saksi yang memberatkan tidak mampu ditampilkan oleh Partai Golkar.

Terhadap sikap Panwaslu ini, Partai Golkar ternyata menerima sehingga kasusnya tidak menjadi panjang.

Dengan demikian, sikap tegas dan cepat yang dilakukan oleh Panwaslu yang menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan ikut membuat suasana konflik antar partai dikabupaten Tabanan ini, tidak sampai berkelanjutan.

6.3. Upaya Pendidikan Politik

Pendidikan politik sebenarnya bisa disebutkan sebagai sebuah instrumen untuk menyelesaikan konflik. Ini dilihat dari makna pendidikan politik itu sebagai sebuah usaha untuk menanamkan pengertian tentang etika dan perilaku berpolitik. Di dalamnya juga termasuk penanaman upaya tentang hak asasi manusia serta pemahaman dari konflik dan demokrasi.

Ada banyak manfaat dari pendidikan politik seperti misalnya mengembangkan wacana mengenai hubungan demokratik antara massa rakyat dengan pemerintah, mengembangkan wacana hak asasi manusia, mendorong terjadinya proses dekonstruksi sistem pengetahuan, mengembangkan ketrampilan politik di kalangan massa rakyat, dengan maksud untuk membiasakan terjadinya kontrol efektif dari rakyat. Ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pola dialog dan negosiasi dalam penyelesaian konflik. (Ruslan, 2001. 196-198).

Diantara unsur masyarakat yang melakukan upaya meredakan ketegangan itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Common Ground Indonesia. Lembaga ini melalui cabangnya yang ada di kabupaten Tabanan melakukan advokasi-advokasi, pencerahan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Dalam kegiatannya, lembaga

ini menggelar ceramah-ceramah dengan tema Pencegahan Tindak Kekerasan Politik Menjelang Pemilihan Umum. Kegiatan itu dilakukan secara acak di beberapa desa di Tabanan, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Disamping tokoh masyarakat seperti pemimpin adat dan dinas, juga diundang tokoh-tokoh partai politik, anggota veteran, pemuda serta ibu-ibu. Mereka dilibatkan dalam ceramah tentang partai politik dan penjagaan keamanan. Di Kabupaten Tabanan, kegiatan itu dilakukan di dua tempat, yaitu daerah Bajra dan Kota Tabanan.

Kegiatan demikian, disamping bertujuan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang makna politik, pemilu dan demokrasi, juga mempertemukan secara informal para tokoh partai yang ada di kabupaten Tabanan. Melalui pertemuan seperti ini secara tidak langsung mereka akan melakukan pendekatan pribadi yang bisa mencairkan hubungan-hubungan kaku antar partai politik. Disamping itu, para tokoh partai yang berbeda ini akan dapat berinteraksi langsung, mengemukakan posisi dan pendapat partainya kepada tokoh masyarakat yang hadir dalam diskusi tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat ini juga menjadi fasilitator dengan cara mengundang masyarakat mendengarkan ceramah-ceramah dari pemimpin spiritual yang ada di Bali, misalnya dengan Pedanda Gunung. Tokoh spiritual yang naik daun di Bali ini misalnya diundang memberikan ceramah ke Desa Bajra, kecamatan Selemadeg. Masyarakat diberikan secara gratis mendengarkan ceramah pendeta ini, memberikan pengarahan-pengarahan untuk menjaga stabilitas di masyarakat masyarakat. Daerah Selemadeg, memang merupakan wilayah dimana potensi konflik antar partainya cukup tinggi. Di wilayah ini, persaingan antara PDI Perjuangan

dengan Partai Golkar cukup sengit dan setelah reformasi, mobilisasi massa antar partai sering dijumpai di daerah ini.

Disamping Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran cukup besar dalam mendinginkan suasana panasnya suhu politik di Kabupaten Tabanan.

Secara fungsional, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban (sesuai dengan pasal 32) memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat; menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU Propinsi; menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota; mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Tabanan ikut terdorong melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya konflik yang dipandang cukup tinggi. Dalam hal ini pihak KPU Kabupaten melakukan dua strategi, yaitu pendekatan kepada elit politik dan pendekatan kepada masyarakat pendukung partai (akar rumput). Upaya ini bisa dikatakan sebagai strategi mengelola konflik di kabupaten Tabanan, yang dilakukan berseiring dengan elit formal lain di kabupaten.

Pada tingkat elit politik, KPU Kabupaten Tabanan melakukan tindakan berupa mempertemukan pimpinan-pimpinan seluruh partai yang ikut pemilu di

kabupaten ini, yakni sebanyak 24 pemimpin/tokoh partai politik. Menurut keterangan ketua KPU Kabupaten Tabanan GB, pertemuan antar pejabat partai politik ini dilakukan sampai sebanyak tiga kali. Dalam pertemuan ini diberikan kesempatan kepada seluruh pemimpin partai untuk memaparkan sikap dan pendiriannya masing-masing selama 15 menit. Dalam pandangan ketua KPU disimpulkan bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu terlihat adanya dua pandangan besar yang menggambarkan suasana politik yang terjadi di kabupaten tabanan. Dua gambaran itu adalah bahwa partai yang besar (yaitu PDI Perjuangan) merada terkepung oleh partai-partai kecil. Sebaliknya partai-partai yang kecil, merasa ditekan oleh partai yang besar. Perasaan ini tidak lain tergambarkan dari peristiwa-peristiwa kekerasan politik yang terjadi selama tahun 2002 maupun tahun 2003. Pada masa kekerasan tersebut, sebagian besar konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya tindakan yang dilakukan oleh simpatisan PDI Perjuangan kepada partai-partai lainnya. Inilah yang membuat munculnya perasaan tertekan atau tertindas dari partai-partai kecil. Sedangkan akibat adanya kekerasan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu, banyak yang menyalahkan sikap PDI Perjuangan yang pada kelanjutannya memberikan perasaan terkepung oleh partai ini dari partai-partai kecil.

Berdasarkan adanya dua arus penggambaran tersebut, KPU Kabupaten Tabanan kemudian mengambil strategi berupa mempertemukan kepentingan yang besar dengan yang kecil, yang dalam bentuk penjabaran, bahwa partai yang besar harus melindungi dan menaungi yang kecil sedang yang kecil memberikan penghormatan kepada yang besar. Dua hal inilah yang menjadi pegangan dalam memelihara ketertiban dalam iklim politik dikabupaten Tabanan. Bentuk-bentuk

perwujudan saling penghargaan itu diantaranya adalah membuat kesepakatan tentang bagaimana ukuran bendera yang kelak bisa dipasang pada masa kampanye dan di wilayah-wilayah mana saja atribut partai politik tersebut bisa dipasang.

Menjelang kampanye, KPU Kabupaten Tabanan bersama dengan seluruh partai politik yang ada melakukan tindakan simpatik berupa pemasangan bendera partai secara bersama-sama di beberapa tempat strategis di kabupaten Tabanan. Demikian pula halnya setelah masa kampanye, penurunan bendera antar partai juga dilakukan secara bersama-sama. Awal kampanye pemilu di Kabupaten Tabanan juga dilakukan dengan tindakan kampanye bersama. Keberhasilan KPU membuat kesepakatan ini merupakan wujud dari kewajibannya yang memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama kepada seluruh partai politik yang ikut kampanye di kabupaten Tabanan.

Strategi akar rumput KPU Kabupaten Tabanan, dilakukan dengan menggelar tindakan turun ke bawah. Artinya melakukan pendekatan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat. Ceramah tersebut, tidak saja menghadirkan nara sumber dari kalangan intelektual tetapi juga aparat kepolisian. Secara material ceramah itu menggarisbawahi tentang apa makna pemilihan umum, demokrasi serta konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi apabila terjadi kerusuhan. Sanksi-sanksi pidana juga dijelaskan jika ada pelanggaran dalam kampanye. Dalam penjelasan ketua KPU Kabupaten Tabanan, jumlah ceramah yang dilakukan meliputi sebanyak 123 desa di seluruh kabupaten. Jumlah ini cukup maksimal dan relevan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Baik dalam melakukan pertemuan antar ketua parpol maupun dalam melakukan ceramah-ceramah ini sekaligus juga pihak KPU Tabanan mampu melaksanakan kewajibannya yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat. Ketika misalnya berlangsung pertemuan antara para elit partai di kantor KPU Tabanan, KPU mampu memberikan solusi tentang ukuran bendera serta ketinggian pemasangan bendera partai saat hendak berkampanye. PDI Perjuangan kerap mendapatkan protes dari partai-partai lainnya yang memasang bendera terlalu tinggi dan terlalu besar. Kesepakatan kemudian dicapai dengan memberikan batas tertentu ketinggian pemasangan bendera dan ukuran panjang lebar maksimal yang diperbolehkan. Dalam kunjungan ke desa-desa banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhasil dijawab oleh para pejabat KPU seputar tentang kampanye dan pemilihan umum legislatif.

Upaya KPU tersebut sebenarnya juga merupakan pendidikan politik yang diberikan, baik kepada masyarakat luas maupun kepada elit politik. Dalam masa reformasi yang mendadak, banyak tokoh-tokoh politik yang masih belum mengetahui tentang makna politik. Demikian juga dengan masyarakat. Karena itu penjelasan-penjelasan yang diberikan KPU bertujuan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat.

Strategi ganda yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini paling tidak telah mampu memberikan suasana konflik lebih mereda pada masa kampanye ketimbang misalnya dengan konflik-konflik antar partai yang terjadi sebelum kampanye.

BAB 7

KESIMPULAN

Setelah melihat fenomena dalam konflik partai politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu legislatif tahun 2004, ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik.

Jika dilihat lebih jauh, ada tiga dimensi yang menyebabkan meletusnya konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilu. Ketiganya itu dimensi politik, sosial ekonomi dan budaya.

Pada dimensi politik, terdapat tiga faktor sebagai penyebab yaitu pertama adanya persepsi ancaman eksternal PDI Perjuangan dari partai-partai lain, kedua adanya kemiripan ideologi partai (perebutan simbol) serta kegagalan negara dan elit dalam mengontrol massa. Sebagai partai yang berusaha meraih kembali dukungannya, Partai Golkar mencoba melakukan berbagai langkah populis. PNI Marhaenisme dan PNBK juga berupaya melakukan konsolidasi karena mereka merupakan partai baru. Kegiatan partai inilah yang dipersepsikan PDI Perjuangan sebagai ancaman eksternal. Kemiripan ideologi antara PDI Perjuangan, PNBK, dan PNI Marhaenisme juga mengkhawatirkan PDI Perjuangan. Ketiga partai itu memakai nama Soekarno atau keluarga besarnya untuk menggali basis dukungan massa. Ketiga, ikut dipakainya simbol negara dalam aktivitas partai serta tidak maksimalnya penanganan terhadap para pelaku kerusuhan membuat konflik-konflik tersebut cenderung terulang. Dalam hal ini elit PDI Perjuangan mengakui gagal mengantisipasi beragam corak dari simpatisannya.

Dari dimensi Sosial-ekonomi, konflik itu disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terutama yang berposisi marginal atas janji-janji pemerintah di masa lalu (*deprivasi relatif*). Ini lebih banyak mengacu kepada konflik antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Partai Golkar masih diidentikkan dengan Orde Baru. Sedangkan massa PDI Perjuangan yang kecewa banyak yang berasal dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelas menengah ke bawah. Dalam dimensi ini konflik juga disebabkan karena adanya upaya memperebutkan posisi-posisi sosial dan ekonomi. Posisi sosial itu bisa berupa jabatan struktural partai atau negara (anggota dewan), yang memberikan jaminan penghasilan ekonomi lebih mapan. Upaya mencapai posisi ini dilakukan dengan pengerahan anak-buah agar terlihat membela eksistensi partai. Pengerahan inilah yang memancing konflik antara satu partai dengan partai lainnya.

Dari dimensi kebudayaan, faktor yang menyebabkan konflik adalah dijumpainya budaya kekerasan yang ikut ke dalam pengerahan massa. Budaya kekerasan itu muncul dari para penjudi sabungan ayam yang terlibat dalam konflik ini. Di lapangan cukup banyak simpatisan PDI Perjuangan yang berkecimpung pada sabungan ayam, ikut terlibat konflik. Demikian pula dengan partai lainnya. Disamping itu dijumpai juga aktivitas berupa minum minuman keras sebelum melakukan kegiatan partai. Penafsiran yang keliru terhadap simbol-simbol budaya lokal seperti *segalak*, *seguluk*, *segilik*, *salunglung sebayantaka* yang artinya senasib seperjuangan, *suryak siu* (setuju bersama tanpa memikirkan lebih cermat) serta konsep "pantare" yang artinya berjuang di segala lapisan dari PDI Perjuangan, ikut memegang peran sebagai penyebab konflik.

Dengan demikian persepsi ancaman eksternal, kemiripan ideologi, kegagalan negara serta partai dalam mengontrol massa, *deprivasi relatif*, upaya meraih posisi-posisi strategis, budaya kekerasan dan penafsiran yang keliru terhadap budaya lokal merupakan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, PNI Marhaenisme, serta PNBK menjelang dilangsungkannya pemilu legislatif 2004 di Kabupaten Tabanan, Bali.

Tetapi konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan tidak berlangsung hingga masa pemilihan umum. Artinya hari pencoblosan berlangsung dengan aman tanpa gangguan. Upaya penyelesaian konflik ini dilakukan dengan mekanisme resolusi banyak jalur (*multitrack*) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun pemerintah. Unsur-unsur yang terlibat itu adalah lembaga lokal seperti adat dan dinas, elit lokal seperti bupati, Kapolres, Ketua KPU maupun Panwaslu. Termasuk juga lembaga swadaya masyarakat, elit partai dan simpatisan partai politik.

Upaya yang dilakukan segenap komponen itu dalam menekan konflik adalah dengan berupaya menciptakan konsensus maupun kompromis antar partai politik dengan teknik-teknik mediasi, konsiliasi termasuk juga diplomasi dan negosiasi informal yang bisa meredakan suasana panas. Pendidikan politik juga merupakan salah satu teknik yang dipakai meredakan konflik. Sedangkan pihak kepolisian bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga ketertiban.

Di daerah-daerah yang dilanda konflik, lembaga adat merespon konflik dengan upaya mediasi serta kesepakatan bersama, yang disebut dengan *perarem*. Kesepakatan ini berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penduduk

setempat maupun penduduk luar yang berada di wilayah yang bersangkutan. *Perarem* juga memuat sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelanggar ketentuan yang ada. Dengan ketentuan yang ketat demikian, baik warga setempat yang menjadi simpatisan partai tertentu maupun warga luar yang datang, tidak berani melakukan pelanggaran. Situasi kondusif terhadap keamanan dan ketertiban cepat pulih dengan adanya ketentuan seperti ini.

Secara individual, tokoh-tokoh adat di daerah setempat juga memegang peranan penting untuk mencegah kembali terulangnya konflik. Di Banjar Bongan Lebah misalnya kepala adat datang langsung saat terjadinya konflik dan memberikan pengarahan, baik kepada warga setempat maupun warga luar yang terlibat. Pendekatan bahasa daerah dengan memakai lambang adat (seperti pakaian adat) pada saat memberikan imbauan, berhasil meredakan konflik yang terjadi. Sedangkan di tempat-tempat lain, masyarakat efektif melakukan penjagaan menjelang pemilu yang mengatasnamakan adat untuk melakukan ronda. Inisiatif untuk melarang kampanye juga memberikan sumbangan berarti mencegah terulangnya konflik. Ini terjadi di Desa Tunjuk, yang berasal dari Kepala Desa, yang disetujui oleh kepala adat.

Konflik antar partai politik di Kabupaten Tabanan bisa dicegah melalui konsensus dan kompromis antara partai politik dengan mediator elit lokal. Setelah berlangsung berbagai konflik di kabupaten ini, tanggal 13 Agustus 2003 digelar pertemuan lintas partai di kantor Bupati Tabanan. Disini disepakati beberapa ketentuan yang mencerminkan adanya pengurangan tuntutan dari masing-masing partai politik untuk menciptakan suasana aman di kota Tabanan. Upaya ini kemudian disebarluaskan oleh bupati Tabanan di setiap daerah bawahannya guna

menekan konflik antar partai politik. Upaya konsensus juga dicapai pada masa kampanye pemilu, seperti yang terjadi di Desa Sanda yang tidak saja melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh partai politik tetapi juga pihak kepolisian. Disini kesepakatan berupa pemasangan kembali bendera yang dicabut serta upaya penjagaan bendera partai merupakan sintesa berbagai pendapat yang terjadi pada saat pertemuan.

Upaya lembaga-lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum, serta Panwaslu berpengaruh terhadap situasi keamanan di Tabanan. Komisi Pemilihan Umum menerapkan strategi berupa strategi pada tingkat elit dan akar rumput, dengan memfasilitasi pertemuan antar pemimpin partai politik (pada tingkat elit) dan melakukan ceramah-ceramah ke ratusan desa yang ada di Kabupaten Tabanan (pada tingkat akar rumput). Upaya ini dilakukan jauh hari menjelang hari kampanye. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pencegahan dengan melakukan strategi mirip dengan apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, yaitu dengan memfasilitasi ceramah ke desa-desa. Lembaga Swadaya Masyarakat juga memfasilitasi mendatangkan tokoh-tokoh spiritual. Sedangkan Panwaslu menerapkan strategi berupaya menangani laporan persengketaan pemilu dengan cepat dan adil.

Jadi, konflik antar partai politik yang terjadi di Kabupaten Tabanan itu bisa diselesaikan melalui upaya rekonsiliasi *multitrack* yang melibatkan segenap komponen masyarakat untuk mencapai konsensus dan kompromis melalui teknik rekonsiliasi, mediasi, serta pendidikan politik. Sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa akan terjadi kerusuhan besar pada saat hari pencoblosan, tidak terbukti.

Hal yang Direkomendasikan

Satu hal yang mesti harus dipertimbangkan ke depan adalah bahwa karena sifat politik di Indonesia itu masih musiman, yakni muncul lima tahun sekali menjelang dan pada saat pemilihan umum, perlu langkah-langkah untuk mencegah konflik antar partai ini muncul kembali. Seperti yang diungkapkan oleh Paul B.Horton dan Chester L. Hunt bahwa kompromis itu akan dihargai sepanjang kekuatan keseimbangan tersebut tidak berubah. Jika kemudian keseimbangan itu berubah, kemungkinan kesepakatan-kesepakatan dalam kompromis itu dikhianati yang bisa memicu munculnya konflik.

Dalam kasus konflik politik di Kabupaten Tabanan menjelang pemilihan umum legislatif 2004 yang lalu, kompromis itu terjadi karena adanya kekuatan perantara yang mendukung, seperti adanya mediasi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh politik yang membuat kelompok politik yang lebih besar bersedia mengurangi tuntutan mereka dan menyepakati kompromis. Munculnya perantara ini bisa dipandang sebagai unsur penguat yang membantu kekuatan politik yang lebih lemah sehingga mempunyai kekuatan seimbang dalam mencapai kompromis itu.

Karena itu, tokoh-tokoh perantara yang ikut membantu tercapainya kompromis ini tidak boleh lengah dalam perjalanan waktu ke masa depan. Artinya konsistensi dan sikap mereka harus tetap konsekuen untuk menjaga ketertiban politik di kabupaten Tabanan.

Demikian pula, pihak lembaga adat beserta tokoh-tokohnya harus mempunyai sikap yang konsisten, konsekuen dan ajeg dalam menjaga keamanan lingkungannya. Dalam konflik partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan, lembaga ini amat berperan.

Karena kesepakatan dan sanksi yang dihasilkannya ampuh untuk meredam pengulangan konflik di daerah yang sebelumnya terlanda konflik. Karena itu hal paling penting yang harus dilakukan pihak lembaga adat adalah dengan membuat *awig-awig* dan *perarem* yang bersifat tetap dan disahkan oleh paruman banjar atau desa adat dan diberlakukan ke dalam lingkungannya. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Tabanan harus secepatnya menyelenggarakan sosialisasi atau membuat perda yang mengharuskan setiap desa adat membuat *awig-awig* dan *perarem* yang memuat tentang pencegahan keributan, mengikat secara internal maupun eksternal. Meski demikian aturan-aturan ini mesti tetap mendapat pembaruan, disesuaikan dengan perkembangan jaman dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Konflik yang terjadi di Kabupaten Tabanan, banyak disebabkan oleh situasi insidental seperti arak-arakan simpatisan partai, perasaan balas dendam serta perasaan terancam oleh eksistensi partai lain yang dipandang sebagai kompetitor. Kemunculan konflik seperti ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang makna dan arti berpolitik bagi para simpatisan partai politik. Karena itu di masa depan, setiap partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik kepada para simpatisannya agar memahami makna politik dan kompetisi. Forum lintas partai juga perlu didirikan di kabupaten Tabanan dengan kegiatan periodik tertentu, agar mampu menggelar diskusi-diskusi serta mempertemukan para kader antar partai politik. Cara seperti ini akan mampu mempertemukan antar kader partai politik dan saling menambah wawasan tentang kegiatan politik. Tidak keliru jika bupati Tabanan sebagai pembina politik daerah tingkat II, memelopori pembentukan forum seperti ini atau akan lebih baik jika mensponsori pembentukan lembaga swadaya masyarakat yang bisa

memberikan pendidikan politik kepada para kader partai politik. Ini demi memberikan suasana yang mendukung ke arah rekonsiliasi politik di kabupaten Tabanan.

Dalam perjalanan ke depan, lembaga formal yang tugasnya memang menjaga keamanan, harus sigap menghadapi konflik-konflik politik yang mungkin terjadi. Kesigapannya sangat membantu penyelesaian konflik politik. Sedangkan lembaga yang memang terkait dengan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Panwaslu harus mampu membaca situasi lapangan, setidak-tidaknya seperti yang telah dilakukan oleh dua lembaga ini menjelang pemilu legislatif 2004, demi meminimalisir konflik yang terjadi

Penelitian di Depan

Ke depan, penelitian menarik yang kiranya perlu dilakukan adalah tentang kaitan antara kemerosotan pertanian dengan munculnya konflik antar partai ini. Dalam kasus konflik antar partai yang terjadi di Kabupaten Tabanan ini, konflik dengan frekuensi yang cukup intens, terjadi di basis-basis pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tabanan, seperti di Penebel, Marga, Pupuan dan Selemadeg. Secara umum Tabanan merupakan wilayah produk pertanian dan perkebunan paling unggul di Bali. Tetapi konflik politiknya juga tinggi. Karena itu perlu diteliti apakah konflik di Tabanan yang cukup tinggi itu disebabkan oleh adanya penurunan produksi di sektor pertanian atau ada faktor lain yang mempengaruhi.

Kedua, dari konflik-konflik antar partai yang terjadi itu, terlihat cukup banyak tokoh-tokoh partai (terutama dari PDI Perjuangan) yang ikut terlibat bersama massa

di dalamnya. Perlu kajian yang bersifat psikologis tentang bagaimana latar belakang dan situasi kejiwaan elit partai politik tersebut agar bisa menjelaskan fenomena konflik di Kabupaten Tabanan yang lebih lengkap. Tujuannya tentu di masa depan agar pencegahan terhadap konflik antar partai di daerah ini lebih mudah diatasi.*****



DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I Gusti Ngurah, 1954, *Riwayat N.V. Gabungan Dagang Rakyat Tabanan*. 1954
- Black, James A., Champions, Dean J. (terj) 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pres.
- Chadwick, Bruce A., Howaró M. Bahr, Stan L. Albrecht (terj.) 1991. *Metode Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Pres.
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1999, *Manajemen dan Kepemimpinan Desa Adat di Propinsi Bali dalam Perspektif Era Globalisasi*, Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Horton, Paul B., Chester L. Hunt, 1976, *Sociology: Fourt Edition*, USA: McGraw-Hill Inc.
- Ibnu Hadjar, 1996. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones, Walter S., 1993, *Logika Hubungan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia.
- Manoppo, Piet G.et al. , 2004, *Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Pemilu*, Jakarat: Common Ground Indonesia.
- Pramono, Sidik "Pilkada Langsung Awal dari Sebuah Akhir". dalam *Kompas* 16 Agustus 2005, hal.43.
- Putra Agung, 2001. "Konflik Komunal: Konflik Internal Etnis Bali. Kasus di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng". Dalam, *Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal Sub Tema: Konflik Komunal dan Ketersingkiran Sosial I*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Putra Erawan, Ketut 2004. "Peta Kekuatan Politik dan Konflik Lokal di Indonesia 1999- 2004". Dalam, Faried Cahyono, Lambang Triyono, eds. *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*. Yogyakarta: CSPA Book).
- Rauf, Maswadi, 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajajaran Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

- Singarimbun, Masri., Sofian Efendi. 1985, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sparinga, Daniel, 2004, *Pemilu 2004, Taksonomi Tema dan Isu Relevan, dalam Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan* (M. faried Cahyono, Lambang Triyono, ed), Jakarta CSPS Books.
- Sudarta, I Wayan, et al, 2001, *Puputan Margarana an Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana*, Denpasar: Markas daerah Pemuda Panca Marga.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sulistyo, Hermawan, 2000. "Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999: Acuan Teoritik Pengalaman Masa Transisi." Dalam, *Kekerasan Politik dalam Pemilu 1999: Laporan dari Lima Daerah*. Jakarta: KIPP Indonesia.
- Suroto, Doddy Rudianto, 2003. *Partai Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Citra Mandala Pratama.
- Sutrisno, Nandang, 2001, "Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif" dalam Muahaimin A. Ruslan (Peny.), *Kekerasan dan Konflik: Tantangan bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM.
- Triyono, Lambang, 2001. "Konflik Horizontal dan Rekonsiliasi Multitrack". Dalam Muahaimin A. Ruslan. peny. *Kekerasan dan Konflik: Tantangan Bagi Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM.

Terbitan Berkala

- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah, 2003, *Buku Peta Politik Pemerintah Propinsi Bali*.
- Bagian Bina Sosial Kabupaten Tabanan, 2001, *Profil Wanita Kabupaten Tabanan*
- Bappeda Kabupaten Tabanan, 2003, *Tabanan dalam Angka 2003*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2001, *Potensi Kepariwisata di Kabupaten Tabanan*.

Catatan:

Semua peristiwa konflik antar partai tersebut bersumber pada catatan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tabanan, 2003 tentang *Data Politik di Wilayah Kabupaten Tabanan, Bulan Januari S/D September 2003* dan *Daftar Kasus/Peristiwa Menonjol Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu tanggal 23 Maret 2004*. Sedangkan data tentang desa wilayah konflik yang menonjol, diambil dari monografi desa yang bersangkutan.





LAMPIRAN A
KESEPAKATAN DAN PERAREM

BUPATI TABANAN

Tabanan, 8 September 2003

Nomor : 300 / 611 / KBL. Trantib
Lampiran : -
Perihal : **Penegasan Kembali Hasil
Pertemuan Lintas Parpol**

Kepada
Yth. Para Pimpinan Partai Politik
Kabupaten Tabanan
di -
Tempat.

Menindaklanjuti pertemuan kami dengan para Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Tabanan yang juga dihadiri oleh KPU dan Panwas Pemilu Kabupaten, Rabu, 13 Agustus 2003 di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, intinya mengajak para Pimpinan Partai Politik dan semua komponen Organisasi Politik menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tabanan, untuk segera bersama - sama menciptakan dan menjaga kondisi dan situasi keamanan yang kondusif untuk tetap terlaksananya program pembangunan dan roda perekonomian secara baik.

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi sebagaimana maksud di atas, kiranya perlu adanya saling pengertian dan kesepahaman terhadap hal yang terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi politik di Kabupaten Tabanan akhir - akhir ini, maka atas dasar masukan dari hasil pertemuan tersebut dengan ini perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disepakati untuk memperlakukan dalam mengadakan setiap kegiatan partai dengan aparat setempat sesuai dengan tingkatan kegiatan, yaitu :
 - Tingkat Desa dengan Kepala Desa dan aparatnya.
 - Tingkat Kecamatan dengan Camat dan unsur Muspikanya.
 - Tingkat Kabupaten dengan Bupati Cq Kepala Kantor Kesbang Linmas dan Trantib Kabupaten Tabanan dan unsur Forum Pimpinan Daerah.
 - Dalam setiap kegiatan agar tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat.
2. Pemasangan Atribut Partai dalam setiap kegiatan ditoleransi selama 3 hari.
3. Untuk pendirian Sekretariat Partai Politik sebelumnya agar mendapatkan Surat Rekomendasi atau Keterangan Domisili dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dimana sekretariat tersebut dibangun.
4. Setiap Partai Politik wajib ikut memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan.
5. Tidak diperkenankan memasang atribut partai politik di tempat umum seperti :
 - Kantor Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Sekolah.
 - Pada Perempatan Jalan Pahlawan ke timur sampai dengan depan Kantor DPRD Tabanan.
6. Menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi Bupati Nomor : 300 / 096 / KBL Trantib tanggal 24 Pebruari 2003.

Demikian kami sampaikan untuk mendapat perhatian dalam pelaksanaannya dan atas kerja sama yang baik selama ini disampaikan ucapan terima kasih.

BUPATI TABANAN

ttt

N. ADI WIRYATAMA, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan.
2. Kapolres Tabanan.
3. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan.
4. Ketua KPU Kabupaten Tabanan.
5. Ketua Panwas Pemilu Kabupaten Tabanan.
6. Para Camat Se – Kabupaten Tabanan, untuk maksud yang sama dan disampaikan kepada Kades dan aparatnya.
7. Arsip.

Keterangan : dikutip sesuai dengan aslinya

BANJAR ADAT BONGAN LEBAH KAJA (II) DESA BONGAN

KESEPAKATAN / PARAREM

NO: 01 / 08 / BA BLK / 2003

Mendengar, melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang telah terjadi di beberapa wilayah / lingkungan beberapa Desa di daerah Tabanan, maka perlu adanya peningkatan keamanan di masing-masing Banjar Adat demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif.

Mengantisipasi hal tersebut diatas **KRAMA BANJAR ADAT BONGAN LEBAH KAJA (II)** telah mengadakan rapat pada tanggal, 9 Agustus 2003 dengan hasil kesepakatan atau Pararem sebagai berikut :

1. Menjaga stabilitas keamanan demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di lingkungan Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II).
2. Krama Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II) sepakat menindak tegas bagi siapa saja yang mencoba melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harta benda atau nyawa (menciptakan suasana keruh / tidak kondusif).
3. Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II), sepakat mengamankan / melindungi segala aset ataupun bentuknya yang ada di lingkungan Banjar Adat Bongon Lebah Kaja (II).

4. Mengacu pada Poin 1, 2 dan 3 diatas Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keamanan dari Polsek, Polres dan Koramil.

Demikian hasil kesepakatan yang di sepakati oleh Krama Banjar Adat Bongan Lebah Kaja (II) yang selanjutnya disahkan sebagai PARAREM.

Mengetahui
Kelian Dinas Bongan Lebah
ttd
I Ketut Sugita

Bongan, 9 Agustus 2003
Kelian Adat Bongan Lebah II
ttd
I . G . Made Sujana Yasa

Tembusan :

1. Seluruh Banjar Adat Desa Bongan.
2. Kepala Desa Bongan di Bongan.
3. Kapolsek Tabanan di Tabanan.
4. Kapolres Tabanan di Tabanan.
5. Koramil Tabanan di Tabanan.

Keterangan : dikutip sesuai dengan aslinya

**KESEPAKATAN BERSAMA LEMBAGA DESA PEKRAMAN
TUNJUK DAN DESA DINAS TUNJUK**

TENTANG

**KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DESA PEKRAMAN TUNJUK**

**JRO BENDESA ADAT PEKRAMAN TUNJUK
DAN KEPALA DESA TUNJUK**

- Menimbang :**
- a. bahwa Desa Pekraman di Propinsi Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan.
 - b. bahwa Desa Pekraman sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama, sosial budaya, sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan ;
 - c. bahwa untuk menciptakan rasa aman dan tenram serta kondusif masyarakat Desa Pekraman Tunjuk ;
 - d. untuk melaksanakan Kesepakatan antara Jro Bendesa Adat Pekraman Tunjuk dan Kepala Desa Tunjuk untuk terciptanya suasana seperti yang dimaksud pada point (c) maka perlu dibuatkan kesepakatan ;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Lembaga-Lembaga Desa Tunjuk pada tanggal 9 September 2003 tentang masalah Keamanan dan Ketertiban masyarakat Desa Pekraman Tunjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KESEPAKATAN JRO BENDESA ADAT DESA PEKRAMAN TUNJUK
DAN**

**KEPALA DESA TUNJUK TENTANG KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DESA PAKRAMAN TUNJUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun tumurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Banjar Pakraman adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian Desa Pakraman.
3. Krama Desa / Krama Banjar adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman / Karang Banjar Pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa / Banjar Pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga Desa Pakraman / Banjar Pakraman.
4. Paruman Desa / Banjar Pakraman adalah paruman permusyawaratan / pemufakatan Krama Desa Pakraman / Banjar Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam Desa Pakraman / Banjar Pakraman.

BAB II ISI KESEPAKATAN

Pasal 2

- (1) Setiap warga Desa Pakraman Tunjuk hendaknya dapat menciptakan rasa aman dari dirinya sendiri.
- (2) Rasa aman yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembangkan dalam bentuk akelompok kecil maupun kelompok besar.
- (3) Rasa aman yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikembangkan dalam masyarakat Banjar Adat, Banjar Dinas dan selanjutnya dikembangkan dalam masyarakat desa.

Pasal 3

Setiap warga masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok hendaknya dapat saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain.

Pasal 4

- (1) Setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah desa Pekraman Tunjuk hendaknya dapat menjaga keamanan dan ketertiban anggota kelompok masing – masing.
- (2) Dalam setiap kegiatan kelompok yang ada di wilayah Desa Pekraman Tunjuk dilarang adanya minum – minuman keras.

BAB III KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 5

- (1) Dalam setiap kegiatan organisasi yang melibatkan orang dari luar Desa hendaknya melapor kepada Jro Bendesa Adat dan Kepala Desa.
- (2) Dalam laporan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan jadwal, acara, jumlah peserta yang hadir.

BAB IV SANKSI – SANKSI

Pasal 6

- (1) Bagi warga masyarakat Desa Pekraman Tunjuk yang melanggar kesepakatan ini akan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan sanksi yang berlaku pada awig – awig Desa Pekraman Tunjuk.
- (3) Sanksi yang berhubungan dengan masalah kriminal akan diserahkan kepada pihak berwajib atau aparat keamanan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya dari jro Bendesa Adat dan Kepala Desa Tunjuk.

Agar setiap warga mengetahuinya, kesepakatan ini disebarluaskan melalui desa Pekraman Tunjuk dan Desa Dinas Tunjuk.

Ditetapkan di : Tunjuk.

Pada tanggal :

Jro Bendesa Adat
Pekraman Tunjuk

Kepala Desa Tunjuk

ttd

ttd

(I Nengah Jelada)

(Drs. I Wayan Utatia Warsana)

Keterangan : dikutip sesuai dengan aslinya



**DATA KASUS POLITIK DI WILAYAH KABUPATEN TABANAN
BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2003**

NO 1	HARI, TGL, JAM 2	KEJADIAN 3	KORBAN 4	PELAKU 5	KET 6
1.	Sabtu, 11 Jan 2003 Pkl. 12.00 wita	Telah terjadi pelemparan rumah milik TW (Sekretaris DPC Golkar) oleh sekelompok massa PDIP Desa Tiyang Gading, Selamadeg, Tabanan menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda 4 jenis willis terbuka memakai atribut merah (PDIP) akibat kejadian rumah dan dapur mengalami kerusakan	TW	Simpatisan PDIP Tiyang Gading, Selamadeg, Tabanan	
2.	Selasa, '4 Jan 2003 Pkl. 22.00 wita	Terjadi pengrusakan pintu gerbang stil Bali milik TW oleh massa simpatisan PDIP, hal itu berawal dari seorang kader PDIP NS hendak pulang kerumahnya namun didepan rumah sudah ada beberapa mobil pengurus partai Golkar sehingga membuat macet, hal tersebut kemudian dilaporkan kepada anggota DPRD (fraksi PDIP Tabanan) MS sehingga massa PDIP datang dan melakukan pengrusakan dan pengancaman kepada MY Komisararis Kecamatan partai Golkar Selamadeg.	TW	MA alias L., 32 th, Hindu, Bali, Swasta, Alamat Dsn/Ds Lalang Linggah, Selamadeg Tabanan Pak J, 45 th. Hindu, Bali, Swasta, alamat Dsn. Lumbang, Kec. Selamadeg Tabanan	
3.	Minggu, 19 Jan 2003 Pkl. 13.00 wita	Upaya penghadangan terhadap kegiatan safari Golkar keliling Bali oleh massa simpatisan PDIP Tabanan berjumlah kurang lebih 500 orang yang dipimpin oleh MS (anggota DPRD Tabanan) massa berkumpul di perbatasan Tabanan dengan Jembrana di Dsn. Selabih, Selamadeg, Tabanan.			
4.	Minggu, 19 Jan 2003 Pkl 21.00wita	Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Tabanan telah berlangsung rapat deklarasi rakyat Tabanan dengan membentuk fron penyelamat dan pemersatu daerah Tabanan yang diikuti oleh 300 orang massa kader PDIP dengan hasil kesepakatan : 1. Membubarkan P Golkar di Tabanan karena dinilai Dosa Golkar terlalu besar dan menyengsarakan masyarakat, meresahkan rakyat Tabanan dan dengan adanya safari Golkar yang disinyalir kampanye terselubung. 2. Tabanan harus 1 panji yaitu PDIP		Massa simpatisan PDIP Tabanan	

5.	Selasa, 21 Jan 2003 Pkl. 22.00 wita	Pemasangan spanduk didepan Kantor Bupati tabanan oleh masa PDIP PAC Marga yang bertuliskan „Jika ibu Mega terus diusik kami masyarakat Bali lebih memilih merdeka“ spanduk tersebut berwarna merah dan berisi lambang PDIP dan PAC Marga		Sekelompok anak muda 15 orang menggunakan kaos merah PDIP mengendari Spm.	
6.	Sabtu, 25 Jan 2003 Pkl. 21.00 wita	Telah datang melakukan intervensi oleh ketua PAC PDIP Tabanan SP alias S yang menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan kelengkapan partai sambil mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar pada saat dilaksanakan upacara pelepasan papan nama sekretarian DPC PNI Marhaenisme di Jln. Batukaru No. 19 Tabanan, Dsn. Tuakilang Belodan, Desan Debantas, Tabanan. Sesaat kemudian datang simpatisan PDIP menggunakan Spm mencabut bendera kecil PNI Marhaenisme yang dipasang di pinggir jalan.	PNI Marhaenisme Tabanan	Ketua PAC PDIP Tabanan	
7.	Kamis, 6 Februari 2003, Pkl. 11.30 wita	Bertempat di kantor DPD Golkar Tabanan telah datang sekelompok orang mengendarai 2 buah mobil Jenis Kijang dan Suzuki Vitara yang nomor polisi tidak diketahui dengan mengeluarkan kata-kata setelah acara di DPRD Tabanan selesai mereka akan datang untuk mengobrak abrik Kantor Golkar.		Kemungkinan sipatisan PDIP, Vitara Abu-abu milik MS (anggota PDRD Tabanan fraksi PDIP)	
8.	Minggu, 10 Februari 2003, Pkl. 17.30 wita	Telah Terjadi Pengrusakan Kaca Nako Dapur, 4 Unit Mobil, 3 Unit Spm Serta 1 Tempat Suci Padmasana Di Rumah Milik WW Di Dsn Tegalinggah Kaja, Ds Tegalinggah, Penebel, Tabanan Pada Saat Pertemuan Pengurus DPC PNBK Tabanan Dalam Rangka Konsolidasi Partai Untuk Menyikapi Pemilu Tahun 2004 Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Simpatisan PDIP Dengan Menggunakan Hartop Warna Merah Diduga Milik KP Dari Dsn Uma Diwang, Ds Batanyuh, Marga, Tabanan.	WW dan pemilik Spm dan Mobil dari PNBK	Massa simpatisan PDIP Tabanan	
9.	Senin, 10 feb 2003 Pkl. 17.00	Adanya rencana ramah tamah dan dialog partai PIB di Pura Agung Tabanan yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai DR. S namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan karena adanya ancaman melalui telepon shg kegiatan dilaksanakan di Singaraja.			
10.	Minggu, 16 Maret 2003, Pkl. 20.30 wita	Telah terjadi pengrusakan papan nama sekretarian PNBK di Br Penebel Kaja, Desa/Kec Penebel, Kab. Tabanan oleh	PNBK Penebel	Sekelompok orang bertopeng ala ninja	

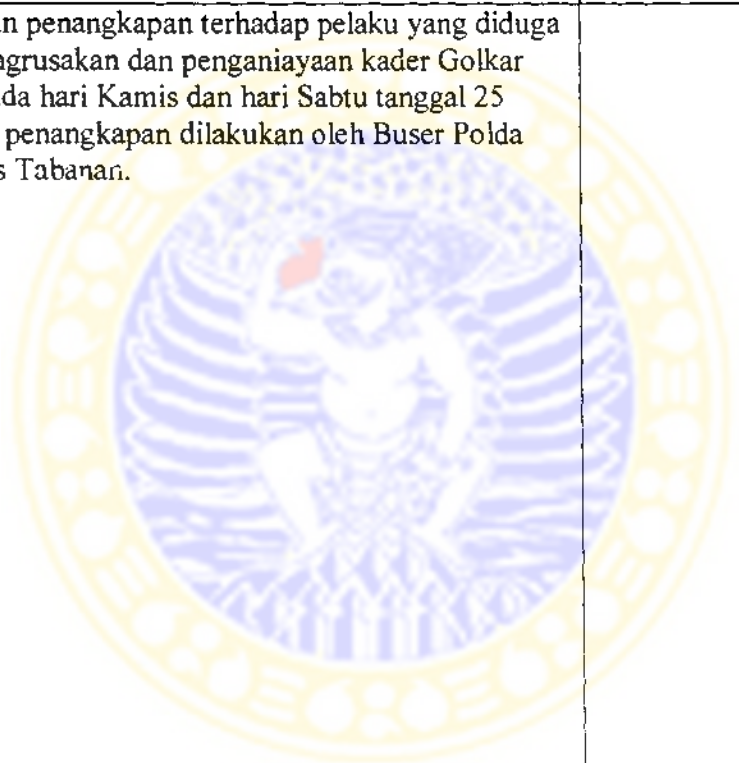
		sekelompok orang yang tidak dikenal sebanyak kurang lebih 30 orang menggunakan sepeda motor menggunakan topeng ala ninja dengan plat nomor sudah dilipat.		
11.	Selasa, 18 Maret 2003, Pkl. 20.30 wita	Telah terjadi pengrusakan kafe Joged serta merobohkan sebuah bangunan bale bengong milik kader partai Golkar Selamadeg Barat yang dilakukan lebih kurang 50 orang yang tidak dikenal, kejadian berawal dari beberapa anak muda dengan mengendarai Spm mendatangi kafe dan memesan miras setelah beberapa saat tiba-tiba orang tersebut memecahkan botol dan melakukan pelemparan terhadap kafe dengan menggunakan batu kali dan pecahan batako serta merobohkan bale bengong.	NY	Masih lidik diduga simpatisan PDIP
12.	Minggu, 20 April 2003, Pkl. 24.00 wita	Telah terjadi tindak pidana pencabutan dan pengrusakan bendera Partai PNI Marhaenisme di sepanjang jalan di Br. Bongan Lebah, Desa Bongan, Kec/kab tabanan oleh sekelompok orang dengan mengendarai mobil sedan warna gelap dan mobil jeep terbuka warna merah serta beberapa buah Spm dengan menggunakan cadar (topeng).	PNI Marhaenisme Tabanan	Sekelompok orang tak dikenal
13.	Minggu, 27 April 2003 Pkl. 21.15 wita	Pembubaran rapat oleh sekelompok massa yang dipimpin IS dari fraksi PDIP Tabanan di Br. Kutuh Kelod, Desa samsam, Kerambitan, Tabanan saat membahas tentang sumbangan yang diberikan oleh ketua Kadin Bali JS dalam rangka pembangunan balai banjar.	Masyarakat Kutuh Kelod	Simpatisan PDIP
14.	Senin, 16 Juni 2003, Pkl. 23.45 wita	Telah terjadi pengrusakan papan nama sekretariat PNBK Tabanan di Jl. Diponegoro Tabanan yang dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal setelah papan nama tersebut dirusak selanjutnya dibuang disimpang empat Jl. Diponegoro Tabanan.	PNBK Tabanan	Sekelompok orang tak dikenal
15.	Selasa, 1 Juli 2003 Pkl. 07.00 wita	Telah terjadi pencoretan papan nama sekretariat PKP dengan mempergunakan cat pilox warna ungu di Kec Marga Tabanan.	PKP Tabanan	Lidik
16.	Rabu, 16 Juli 2003 Pkl. 23.30 wita	Telah terjadi keributan di Dsn. Tunjuk Kelod, Kec/Kab tabanan schubungan dengan adanya isu ninja dan dibunyikan kulkul bulus oleh masyarakat Desa Tunjuk, selanjutnya berhasil ditangkap antara lain : WS, PS, MD, KS, KP, WP, MB, KY dan WS.		9 orang ditangkap dan diperiksa di Polres Tabanan namun belum memenuhi unsur pidana kesemuanya simpatisan PDIP Tabanan

17.	Sabtu, 2 Agustus 2003, Pkl. 14.00 wita	Ditundanya pelaksanaan pemasangan papan nama PAC PNI Marhaenisme di Dsn. Bongan Lebah, Desa Bongan kemudian datang massa PDIP Tabanan yang dipimpin oleh MD dan KP yang menanyakan ijin pemasangan papan nama dari Kades setempat dan dari Kebang Linmas.	PNI Marhaenisme Tabanan	Simpatisan PDIP Sudimara	
18.	Minggu, 3 Agustus 2003, Pkl. 17.00 wita	Telah terjadi pengrusakan pemasangan papan nama PAC PNI Marhaenisme di Dsn. Bongan Lebah, Desa Bongan Tabanan oleh sekelpompok massa lebih kurang 50 orang menggunakan 4 buah ranmor roda 4 jenis hartop	PNI Marhaenisme Tabanan	Diduga simpatisan PDIP	
19.	Rabu, 6 Agustus 2003 Pkl. 12.00 wita	Telah terjadi pengancaman terhadap simpatisan PDIP, MA yang dilakukan oleh ketua AMPG Desa Tunjuk SW dengan memegang kerah baju dan siap memukul namun tidak jadi dilaksanakan.	EP	SW	
20.	Rabu, 27 Agustus 2003, Pkl. 14.30 wita	Bertempat di Br. Megati Kelod, Desa Megati, Selamadeg Timur, Tabanan akan dilaksanakan peresmian Sekretariat Partai PIB tetapi batal dilaksanakan yang disebabkan datangnya masa PDIP yang menyatakan keabsahan PIB belum disosialisasikan kepada aparat setempat. Secara mayoritas masyarakat setempat belum bisa menerima keberadaan PIB.	Partai PIB	Massa simpatisan PDIP Megati	
21.	Senin, 1 September 2003, Pkl. 21.00 wita	Telah terjadi keributan antara massa PDIP dengan massa Golkar di Br Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk Tabanan sehubungan acara syukuran dan peresmian kelompok Tani Mekar Sari PDIP Tunjuk massa PDIP dipimpin oleh MD	Tidak ada korban	Kedua belah pihak	
22.	Kamis, 4 September 2003, Pkl. 21.00 wita	Bertempat di Br. Jaba Jero, Desa bajera, Selamadeg tengah, Tabanan telah ditangkap MD (anggota DPRD fraksi PDIP Tabanan) oleh AR beserta kader PDIP Selamadeg Barat sehubungan yang bersangkutan diduga melakukan perselingkuhan dengan SB mantan karyawan kafe.	MK dan SB	MK dan SB	
23.	Sabtu, 6 September 2003, Pkl. 16.15 wita	Pengrusakan papan nama DPAC Partai Demokrat Kec. Penebel. Papan nama DC Partai Demokrat Tabanan dan PAC PNI Marhaenisme Kec. Penebel serta pencabutan bendera partai Golkar kronologi kejadian :			
		Pada hari Sabtu tanggal 6 September 2003 pkl. 16.15 wita bertempat di DsnPoh Gending Kawan, Desa Pitra, Penebel, Tabanan di depan rumah milik NS (pengurus DPD Partai Demokrat Bali) telah terjadi pengrusakan papan nama	Partai Demokrat	Sekelompok massa yang tidak dikenal	

		Partai Demokrat oleh sekelompok massa dengan memakai baju kaos warna hitam berjumlah kurang lebih 30 orang dengan kendaraan roda 4 jeniskijang. Akibat kejadian papan nama partai Demokrat rusak dan 1 bh bendera partai demokrat hilang.		
		Bertepatan dengan kejadian tersebut diatas sekira pkl. 16.30 wita bertempat di Dsn. Karadan, Desa/Kec Penebel, Tabanan telah terjadi pencabutan 4 buah bendera partai Golkar, 2 bh umbul-umbul, 1 bh spanduk oleh sekelompok massa 30 orang dengan memakai baju kaor warna merah menggunakan kendaraan jenis kijang DK 70 GB, 2 bh kendaraan jenis hartop open cup warna merah yang tidak diketahui identitasnya serta membawa senjata tajam sejenis parang/kapak.	Partai Golkar	Skelompok massa yang tidak dikenal.
		Sekira pkl. 19.00 wita bertempat di Dsn. Soka, Desa Senganan, Penebel, Tabanan telah terjadi pencabutan bendera partai Golkar dan penganiayaan terhadap kader Golkar An WS yang dilakukan oleh beberapa massa PDIP dengan menggunakan kendaraan hartop warna hitam srem, jenis jancas warna merah.	WS	Sekelompok massa yang tidak dikenal kemungkinan massa PDIP sebab sebelumnya dilaksanakan pelantikan anak ranting PDIP Kecamatan Penebel.
		Sekira pkl 19.20 wita bertempat di Dsn. Babadan tengah, Desa Babadan, Penebel, Tabanan telah terjadi pengrusakan papan nama PAC PNI Marhaenisme yang dilakukan oleh sekelompok massa lebih kurang 20 orang menggunakan kendaraan hartop warna merah dan 1 bh warna hijau tua, berbaju kaos hitam atribut PDIP	PNI Marhaenisme	Sekelompok massa yang tidak dikenal kemungkinan massa PDIP sebab sebelumnya dilaksanakan pelantikan anak ranting PDIP Kecamatan Penebel.
24.	Sabtu, 6 September 2003, Pkl. 20.00 wita	Telah terjadi tindak pidana penganiayaan di jalan raya di depan rumah korban di Dsn. Tunjuk Selatan, Desa Tunjuk, Kec/Kab Tabanan oleh beberapa orang massa PDIP Kec Penebel yang salah satu dari rombongan berteriak dengan bahasa Bali mengatakan dia itu G (korban) kemudian beberapa orang penumpang turun dan memukul korban sampai korban jatuh dari sepeda motornya yang mengakibatkan kepala korban luka robek dan lecet disekitar badan.	NP alias G, laki, 41 th, Hindu, Bali, tani alamat sda TKP	Para pelaku telah ditangkap Polres Tabanan pada hari Minggu tanggal 7 September 2003 berjumlah 5 orang : 1. MM alias D, 34 th. Hindu, Bali, alamat Dsn/Ds Buruan,

				<p>Penebel, Tbn</p> <p>2. KS alias S, 25 th, Hindu, Bali, Buruh, alamat Dsn/Ds wanasari Kec/Kab Tabanan</p> <p>3. KS, 31 th, Hindu, Bali, swasta, alamat Dsn Sandan Dauh Yeh, Ds. Wonosari, Kec.Kab Tabanan</p> <p>4. AS alias G, 25 th, Hindu, Bali, swasta, alamat Dsn Wanasari Belodan, Desa Wanasari, Kec/Kab Tabanan</p> <p>5. WS, 46 th, Hindu, Bali, alamat Dsn Subamia Ambal-Ambal, Desa Subamia, Kec.Kab Tabanan</p>	
25.	Jumat, 24 Oktober 2003, Pkl. 01.30 wita	Telah terjadi pengrusakan papan nama partai PKPI Kecamatan Marga di Dsn Tengah, Desa/Kec. Marga Tabanan oleh sekelompok orang yang tak dikenal.	Partai PKPI		
26.	Jumat, 24 Oktober 2003, Pkl. 01.30 wita	Telah terjadi penurunan bendera dan pencabutan papan nama PNI Marhaenisme bertempat di Br. Cau, Desa Tua, Kec. Marga, Tabanan oleh sekelompok orang tak dikenal.	PNI Marhaenisme		
27.	Sabtu, 24 Oktober 2003, Pkl. 14.12 wita	Telah terjadi pencabutan bendera partai Golkar oleh 7 orang yang mengendarai kendaraan hartop B 2420 ZH bertempat di Desa Tua, Desa Kukuh dan Desa Marga, Kec. Marga, Tabanan.	Partai Golkar		
28.	Sabtu, 25 Oktober 2003, Pkl. 11.00 wita	Bertempat di depan rumah NR, Br. Pasekan, Desa Abiantuwung Kediri, Tabanan telah terjadi pengrusakan 4 buah mobil dan dua buah Spm milik simpatisan partai Golkar yang akan mengikuti Hut Golkar di Denpasar yang	Simpatisan partai Golkar : Jeep taf DK 964 GA Jeep Taf merah DK		

		dilakukan oleh simpatisan PDIP Tabanan.	611 GA Jeep Hartop DK 693 BN Land Rover DK 913 AL Spm Shogun DK 2177 GG Sp Suzuki RC 100 DK 4444 GJ		
29.	Sabtu, 25 Oktober 2003, Pkl. 11.15 wita	Massa PDIP kurang lebih 150 orang yang dipimpin AJ melakukan pembakaran baju Golkar dan melakukan pemukulan terhadap simpatisan Golkar An. NS, 32 th, Hindu, Bali, alamat Br/Desa Kukuh, Kerambitan, Tabanan mengalami luka bengkak di kepala karena sabetan pipa besi dan MS, 17 th, Hindu, Bali, alamat Desa Belalang, Kediri mengalami luka memar pada bibir.	Simpatisan Golkar		
30.	Sabtu, 25 Oktober 2003, Pkl. 11.12.50 wita	Massa PDIP melakukan penghadangan dan pengrusakan di simpang tiga Sekenan dan depan Pura Dalem Tabanan yang mengakibatkan 4 ranmor rusak.	Truk diesel DK 8107 GE Truk engkel DK 8167 JH Jeep Willis DK 88 GR Spm F1 DK 5773 GI		
31.	Sabtu, 25 Oktober 2003, Pkl. 19.00 wita	Telah terjadi penghadangan dengan aksi lempar oleh massa PDIP Tabanan terhadap rombongan massa Golkar dari Jembrana di Jln. By Pass tepatnya diperempatan Gubug yang akan menghadiri HUT Golkar di Padang Galak Denpasar, massa PDIP berusaha menerobos pasukan Brimob dan Polres Tabanan sehingga terjadi bentrok dan diberikan tembakan peringatan.	Beberapa kendaraan Golkar mengalami pecah kaca akibat lemparan batu. Dan 3 buah kendaraan PDIP rusak/kaca pecah.		
32.	Sabtu, 25 Oktober 2003, Pkl. 20.00 wita	Pada pkl 19.00 wita bertempat di Desa Megati, Selamadeg, massa Golkar yang pulang dari menghadiri HUT Golkar berpapasan dengan massa PDIP sehingga terjadi bentrok saling lempar diatas kendaraan yang mengakibatkan kantor PAC PDIP Selamadeg Timur dilempari batu sehingga kaca pecah, 1 unit kijang DK 21 BG pecah kaca depan, 1 unit hartop DK 792 YC seluruh kaca pecah.	2 buah mobil dan kantor PAC PDIP Selamadeg Timur rusak		
33.	Sabtu, 25 Oktober	Pada pkl. 20.00 wita massa PDIP Selamadeg Barat			

	2003, Pkl. 11.15 wita	<p style="text-align: center;">ADLN - Perpustakaan Unair</p> <p>melakukan pelemparan terhadap rombongan Golkar Jembrana sehingga massa Golkar turun dari kendaraan dan melakukan pengrusakan kantor PAC PDIP Selamadeg Barat yang mengakibatkan kaca jendela pecah. Melihat kantornya rusak massa PDIP melampuiaskan marahnya dengan membakar sebuah warung kecil di depan rumah kader Golkar di Br. Yeh Bakung, Desa Lalang Linggah, Selamadeg, Tabanan.</p>			
34.	Kamis, 30 Oktober 2003, Pkl. 04.00 wita	<p>Telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pengrusakan dan penganiayaan kader Golkar yang terjadi pada hari Kamis dan hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2003. penangkapan dilakukan oleh Buser Polda Bali dan Polres Tabanan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. KS alias AJ, 41 th, Hindu, Bali, Waker Gapensi alamat Br Jambe Baleran, Ds Dauh Peken, Tabanan 2. PP als. N 31 th, Hindu, Bali, swasta, alamat Jln. MT Haryono 20 Tabanan 3. SA als J 37 th, Hindu, Bali, alamat Br/Ds baturiti, Kerambitan, Tabanan 4. KY als GR 46 th, Hindu, Bali, SPBU Persiapan, alamat Br/Ds Pangkung Karung, Kerambitan, Tabanan 5. NM als G, 40 th, Hindu, Bali, alamat Br Tengah Ds/Kec Kerambitan, Tabanan 6. WD als P 20 th, Hindu, Bali, alamat Br Bajera Kaja, Ds 	

				Bajera, Selamadeg Tabanan	
35.	Minggu, 16 Nopember 2002, Pkl. 10.00 wita	Telah terjadi pelemparan gudang milik SP alias S oleh orang yang tak dikenal di Jln. Rajawali No. 9X Tabanan termasuk Dsn Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan yang mengakibatkan 2 atap terbuat dari Asbes pecah. Selanjutnya massa yang menggunakan atribut pakaian warna hitam mengendarai 20 Spm, 3 bh mobil melaku ke arah utara serta melakukan pengrusakan Posko PDIP ranting Subamia yang mengakibatkan beberapa genteng pecah dan lampu rumah milik WW alias R mengalami pecah.	SP dan WW	Pelaku menggunakan 4 bh mobil dan 20 menggunakan atribut PDIP warna hitam	
36.	Rabu, 18 Februari 2004, Pkl 03.00 wita	Terjadi pengrusakan papan nama PKPB dan kaca nako Sekretariat PKPN di Jln. Ngurah Rai No. 54 Kediri oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya berjumlah 8 orang menggunakan sepeda motor.	PKPB Tabanan		
37.	Senin, 5 Januari 2004, Pkl. 02.00 wita	Telah terjadi pencurian papan nama PNBK yang dipasang di depan rumah WG (kader PNBK) di Br. Rejasa Kelod, Ds Rejasa, Penebel, Tabanan.	PNBK Penebel		
38.	Senin, 5 Januari 2004, Pkl. 04.00 wita	Telah terjadi pengrusakan papan nama partai Golkar Kec Penebel yang dipasang didepan ruah MD alat Br. Poh Gending, Ds Pitra, Penebel, Tabanan	Partai Golkar		

Sumber : Polres Tabanan

Keterangan : Identitas nama diringkas

**DAFTAR KASUS / PERISTIWA MENONJOL
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU
TANGGAL 23 MARET 2004**

NO	KASUS/MASALAH	URAIAN	PARPOL PENANGGUNG JAWAB	TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL
1.	Pengrusakan (Pelemparan rumah)	Pada tanggal 11 Maret 2004 sekira pkl 15.15 wita telah terjadi pelemparan/pengrusakan warung di Br. Kedewatan, Ds. Mundeh Kauh, Kec. Selamadeg, Kab. Tabanan milik PG, 30 th, Hindu, Tani (kader partai Golkar), akibatnya beberapa genteng pecah dan pintu warung rusak, kerugian Rp. 100.000. Sedang pelaku tidak diknal masih dalam lidik. M.O. pelaku mendatangi warung dan langsung melempar dengan batu. Latar belakang kejadiannya diduga adanya sikap korban tidak mau sebagai kader/simpatian PDIP		Ditangani Polsek Selamadeg - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
2.	Pengrusakan (Pelemparan rumah)	Pada tanggal 11 Maret 2004 pkl 20.30 wita telah terjadi pelemparan rumah di Br. Semojo, Ds/Kec. Pupuan, Tabanan milik KS, 63 th, Hindu, Pensiunan PNS, (Kader partai Merdeka), pelaku sekelompok orang tidak dikenal menggunakan batu dan batang kayu kopi, akibatnya beberapa genteng pecah, 4 kaca jendela pecah dan kaca belakang mobil sedan pecah, kerugian Rp. 3.000.000. MO pelau mendatangi rumah langsung melempar dengan batu.		Ditangani Polsek Pupuan - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
3.	Pengrusakan (Pelemparan rumah)	Pada tanggal 11 Maret 2004 pkl 21.30 wita telah terjadi pengrusakan rumah di Br/Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Tabanan milik GS, 29 th, Hindu, Swasta (kader partai Golkar), pelaku sekelompok orang tidak dikenal, menggunakan batu, akibatnya kaca jendela pecah, kerugian Rp. 50.000. MO pelaku mendatangi rumah langsung melempar dengan batu.		Ditangani Polsek Pupuan - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
4.	Pengrusakan mobil kijang dan perobekan bendera PNI Marhaenisme	Pada tanggal 11 Maret 2004 pkl 21.30 wita telah terjadi pengrusakan mobil Kijang DK 1451 YC dan pengrobekan bendera PNI Marhaenisme di Br. Bongan Awa, Ds. Bongan, Kec/Kab Tabanan miliki NM, 43 th,		Ditangani Polsek Tabanan - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik

		Hindu, Sopir, pelaku seorang tak dikenal memakai tutup muka dari iring-iringan sekitar 25 Spm, melakukan pengrusakan terhadap mobil kijang, akibatnya mobil mengalami peyok pada bagianbelakang kanan dan menendang korban sebanyak 2 kali hingga terjadi. MO pelaku melempar mobil dengan batu dan merobek bendera PNI yang terpasang depan rumah serta melakukan penganiayaan.		dan lidik
5.	Pencabutan bendera partai Golkar dan bendera PNI Marhaenisme	Pada tanggal 12 Maret 2004 pkl. 05.00 wita telah terjadi pencabutan sebuah bendera partai Golkar dan bendera PNI Marhaenisme di jalan umum Desa Sanda, Kec. Pupuan, tabanan. Pelaku dari massa PDIP Pupuan yang akan mengikuti kampanye di Kab.Gianyar. Akibatnya masyarakat Desa Sanda bermaksud akan menghadang massa PDIP sepulang dari kampanye.		Kapolsek Pupuan melakukan pendekatan dengan Tomas sanda dan pengurus parpol guna mencegah penghadangan, kemudian melakukan pertemuan diperoleh kesepakatan : a. Bendera yang telah dicabut diganti dan dipasang kembali secara bersama-sama b. Masyarakat Desa Sanda secara bersama-sama akan menjaga keamanan semua bendera parpol yang dipasang
6.	Pengrusakan patung Logo PDIP	Pada tanggal 12 Maret 2004 sekira pkl. 09.45 wita telah terjadi pengrusakan patung logo PDIP di depan rumah milik AB, Br. Sakenan Belodan, oleh massa simpatisan PDIP yang akan berangkat kampanye menuju Kab.Gianyar. Dimana sebelumnya AB pernah menjadi kader PDIP, sedangkan sekarang sebagai Ketua Partai Merdeka. Pelaku tidak dikenal.		Ditangani Polsektif Tabanan - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan lidik
7.	Pemasangan Bendera PDIP di halaman rumah Caleg Partai Golkar	Pada tanggal 12 Maret 2004 pkl 19.00 wita telah terjadi pemasangan bendera PDIP di halaman rumah caleg partai Golkar An. Drs. KS oleh sekelompok massa PDIP sekira 10 orang di Dsn. Yeh Bakung Desa		Ditangani Polsektif Selamadeg - Menerima laporan - Mendatangi TKP

		Lalanglinggah. Kcc. Selamadeg, Tabanan		- Melakukan sidik dan lidik
8.	Pemotongan tali balon PKPB	Pada tangga; 13 Maret 2004 sekira pkl 23.35 wita telah terjadi pemotongan tali balon udara PKPB bergambar SHR (Mbak Tutut) di Dsn. Belayu, Ds. Peken. Kec. Marga, Tabanan oleh orang yang tidak dikenal dengan cara memotong tali yang dipasang di pekangan rumah milik NW di Jero Anyar Ds. Peken Marga. Akibat kajadian tersebut PKPN mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.500.000,- MO : Pelaku memotong tali balon udara diduga menggunakan senjata tajam.		Ditangani Polsek Marga - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
9.	Pencabutan bendera PPDK	Pada tanggal 14 Maret 2004 pkl. 03.40 wita telah terjadi pencabutan bendera Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) sebanyak 12 bendera, antara lain dua buah berukuran 210 Cmx 155 cm dan 10 buah ukuran 75 cm x 55 cm.bertempat di sepanjang Jl. Baypass Nyanyi, Kediri. Palaku masih dalam lidik. Kerugian Rp. 1.000.000,-		Ditangani Polsektif Kediri - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
10.	Pencabutan bendera PPDK	Pada tanggal 14 Maret 2004 pkl 23.00 wita telah terjadi pencabutan bendera Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan di Jln. Raya Tanah Lot, Dsn Batanpoh. Ds Pandak Gede, Kec. Kediri, Tabanan sebanyak tiga bendera berukuran 75cm x 55cm. pelaku masih dalam lidik. Kerugian sebanyak Rp. 30.000,-		Ditangani Polsektif Kediri - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
11.	Terjadi penganiayaan terhadap KP alias PM dan pengancaman terhadap MD alias PS.	Pada hari Senin tanggal 15 Maret 2004 sekira pkl 14.30 wita telah terjadi penganiayaan terhadap KT alias PM, 64 th, Hindu, Bali, Tani, alamat Br. Jebaud, Ds Beringkit, Kec. Marga. Kab. Tabanan dan pengancaman terhadap MK alias PS, 29 th, Hindu, tani, alamat sad. Pelaku diduga dari kader PDIP, saat ini masih dalam lidik. ML : dengan cara menendang sebanyak satu kali mengenai ulu hati mengakibatkan korban terjatuh dan pelaku mengacungkan pedang.		Ditangani Polsektif Marga - Menerima laporan - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
12.	Penurunan dan Perobekan Bendera PNBK	Pada hari senin tanggal 15 Maret 2004 sekirat pkl. 13.30 wita telah terjadi penurunan sebuah bendera PNBK dalam ukuran besar dirobek dan empat buah bendera		Ditangani Polsektif Kerambitan - Menerima laporan

		PNBK dalam ukuran kecil hilang. TKP : Di Br. Lebah, Tista, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan. Pelaku diduga dari massa PDIP dengan MO : penurunan bendera pada saat Massa PDIP berkonvoi: Kerugian Rp. 200.000,-		<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangi TKP - Melakukan sidik dan lidik
13.	Pencabutan Bendera PNI Marhaenisme	Pada tanggal 16 Maret 2004 sekira pkl. 13.30 wita telah terjadi pencabutan satu buah bendera PNI Marhaenisme di depan sekretariat PNI Marhaenisme, Dsn. Pemudungan, Ds. Belimbing, Kec. Pupuan, Tabanan. Pelaku dalam lidik, modus operandi pelaku mencabut bendera yang dipasang depan Kantor Sekretariat Ranting PNI Marhaenisme Kec. Pupuan.		Telah dilaporkan Panwaslu Kec. Pupuan
14.	Pencabutan bendera PKPB, Partai Demokrat dan PNBK	Pada tanggal 15 Maret 2004 pkl 23.00 wita telah terjadi pencabutan bendera Partai Karya Peduli Bangsa sebanyak 9 buah, Partai Demokrat 2 buah dan bendera PNBK sebanyak 3 buah. TKP di depan Kantor Desa Luwus, Kec. Baturiti, Tabanan. Pelaku masih dalam lidik. Modus operandi pelaku mencabut bendera yang dipasang di depan kantor Desa Luwus.		Telah dilaporkan Panwaslu Kec. Baturiti
15.	Pencatutan nama institusi tanpa adanya koordinasi dan rekomendasi	Pada Tanggal 16 Maret 2004 Pkl 10.45 Wita Telah Diturunkan Sebuah Sepanduk Bertuliskan Suksesan Pemilu 2004. Damai itu indah, Kamtibmas tanggung jawab kita bersama. Berisi logo Parpol PDIP dan mengatas namakan Humas Polda Bali. Spanduk dipasang di Jalan Gajah Mada tabanan, depan toko mebel Nusantara, yang dipasang oleh NS alias D atas suruhan NS, karyawan DPC PDIP Tabanan yang diperoleh dari DPD PDIP Bali. Atas temuan tersebut spanduk diturunkan oleh yang memasang NS alias D atas perintah kapolres Tabanan dengan alasan belum adanya rekomendasi dari Bid Hummas Polda Bali.	DPC PDIP Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan secara paksa - Barang bukti diamankan Bid Hummas Polda Bali
16.	Pengrusakan papan nama sekretariat PAC PKB	Pada Tanggal 17 Maret 2004 Pkl 17.30 Wita Telah Terjadi Pengrusakan Papan Nama Sekretariat PAC PKB Di Jln. Kebon Taruna No. 2 Bajra, Kec. Selamadeg Tengah, Kab. Tabanan. Pelaku Sekelompok Orang Yang Salah Satunya Dikenali Bernama I. Modus operandi pelaku merusak papan nama sekretariat PAC PKB sampai roboh dan langsung meninggalkan TKP, kejadian		<ul style="list-style-type: none"> - Telah ditangani Panwaslu Kecamatan Selamadeg

		tersebut diduga dilatarbelakangi masalah politik.		
17.	Pengrusakan pintu warung/rumah	Pada tanggal 4 Maret 2004 pkl 23.00 wita, namun dilaporkan tanggal 17 Maret 2004 di Polsektif Selamadeg, telah terjadi pengrusakan pintu warung milik AS, 35 th, Hindu, tani, alamat Dsn. Batanbuah, Desa Tangguntiti, Kec. Selamadeg Timur, Kec. Tabanan. Singkat kejadiannya ketika korban diatas sedang tidur tiba-tiba pintu digedor dan ditendang hingga rusak. Kemudian pelaku tidak dikenal sebanyak 6 orang menanyakan suaminya dan mengatakan "Ini masalah PNI" kemudian pelaku pergu. Kerugian Rp. 300.000. Akibatnya papan pintu warung pecah sebanyak 3 buah.		- Telah ditangani Polsektif Selamadeg
18.	Perobekan bendera partai Golkar, partai Demokrat, dan bendera PNI Marhaenisme	Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2004 pkl 05.30 wita telah terjadi perobekan bendera Partai Golkar sebanyak 11 lembar, bendera Partai Demokrat 1 lembar dan bendera PNI Marhaenisme 1 lembar di Dsn/Ds Jatiluwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, yang dilakukan oleh LG, alamat tersebut diatas (istri WS caleg PDIP daerah pemilihan III Tabanan). Modus operandi pelaku merobek bendera sendiri, tidak menyertakan massa.		- Telah ditangani Panwaslu Kecamatan Penebel
19.	Pengrusakan/pelemparan kaca nako rumah	Pada tanggal 20 Maret 2004 pkl. 07.00 wita telah terjadi pelemparan kaca jendela nako milik WW di Dsn. Pemudungan, Ds. Belimbing, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Pelaku masih dalam lidik, modus operandi pelaku datang langsung melempar saat rumah dalam keadaan kosong. Akibatnya 2 lembar kaca nako jendela dalam keadaan pecah.		- Telah dilaporkan dan ditangani Polsek Pupuan
20.	Pengrusakan / pelemparan atap rumah	Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 pkl. 22.00 wita telah terjadi pelemparan rumah milik I Made Sukadana, 41 tahun, Hindu, Wiraswasta, alamat Dsn. Gunung, Ds/Kec.Penebel, Kab. Tabanan. Pelaku masih dalam lidik. Modus operandi pelaku datang langsung melempar atap genteng rumah pada saat rumah kosong. Akibatnya 8 buah genteng pecah, kerugian Rp., 15.000,-		- Telah ditangani Polsek Penebel
21.	Pengrusakan/pelemparan kaca jendela	Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2004 pkl. 24.00 wita telah terjadi pelemparan kaca jendela rumah milik MS, 50 th. Hindu, tani, alamat Dsn. Dapana Kaja, Ds. Piliang		- Telah ditangani Polsek Penebel

		gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan. Pelaku masih dalam lidik, modus operandi latar belakang politik. Akibatnya kaca jendela pecah dan kerugian Rp. 200.000.		
22.	Pencabutan bendera PNBK dan PDK	Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 pkl. 23.00 wita telah terjadi pencabutan bendera PNBK di Banjar Anyar, Desa Senganan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, sebanyak 5 lembar. Di Br. Sanganan Kangin sebanyak 2 lembar dan pencabutan bendera PDK di Ds. Blaung, Kec. Penebel, Kab. Tabanan sebanyak 1 lembar. Pelaku tidak diketahui masih dalam lidik, modus operandi latar belakang politik, pelaku sekelompok orang tidak dikenal menggunakan pakaian hitam-hitam mencabut langsung pergi.		- Telah ditangani Panwaslu Kecamatan Penebel
23.	Pencabutan bendera PNI Marhaenisme	Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2004 pkl. 22.00 wita telah terjadi pencabutan bendera PNI Marhaenisme di Dsn. Babahan Tengah dan Babahan Kangin, Desa Babahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, sebanyak 8 lembar, ukuran 30 x 40 cm. Pelaku PB, 36 th, Hindu, tani, alamat Dsn. Babahan Tengah, Ds. Babahan. Modus operandi latar belakang politik pelaku mencabut bendera yang terpasang di pinggir jalan.		Telah dilaporkan ke Panwaslu Kec. Penebel
24.	Penurunan bendera partai Golkar	Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 pkl 23.00 wita telah terjadi penurunan bendera partai Golkar sebanyak 20 lembar antara lain : 3 ukuran besar dan 17 ukuran kecil di Dsn/Ds Belalang, Kec. Kediri, Kab. Tabanan. Pelaku sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Modus operandi pelaku menurunkan dan mencabut bendera dan dibawa pergi		Telah dilaporkan ke Panwaslu Kec. Kediri
25.	Pencabutan bendera PNBK	Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 pkl 23.00 wita telah terjadi pencabutan bendera PNBK oleh Kepala Desa Denbatas WS dan Bendesa Adat Denbatas AM bersama beberapa simpatisan PDIP, yang terpasang di Dsn. Tuakalang, Desa Denbatas, Kec/Kab. Tabanan. Modus operandi Kades dan Bendesa adat mencabut bendera karena pengurus partai PNBK tidak minta ijin kepada aparat desa setempat.		Telah dilaporkan ke Panwaslu Kec. Tabanan
26.	Pencabutan bendera	Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 pkl 22.30 wita		Telah dilaporkan kepada

	partai Golkar	telah terjadi pencabutan bendera partai Golkar sebanyak 2 lembar ukuran 30 x 40 cm, di Dsn/Desa Mangesta, Kec. Penebel, Kab. Tabanan. Pelaku tidak diketahui identitasnya. Modus operandi pelaku mencabut bendera yang terpasang dan membawa pergi.		Panwaslu Kec. Penebel
27.	Pengrusakan rumah	Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2004 pkl 19.30 wita telah terjadi pengrusakan rumah milik NP, 28 th, Hindu, tani, alamat Br. Puspasari, Ds. Pujungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Pelaku sekelompok orang tidak dikenal menggunakan kendaraan jeep warna merah mendarangi rumah dan mencari korban namun tidak ada dirumah, kemudian pelaku mersak kaca jendela, dinding triplek dan beberapa genteng pecah. Modus operandi pelaku/ sekelompok orang merusak dengan kayu dan melempar atap genteng dengan batu, akibatnya korban mengalami kerugian Rp. 1.500.000 sedang motifnya diduga karena korban mantan wakil ketua ranting dan satgas PDIP yang sekarang pindah ke partai Golkar.		Telah ditangani oleh Polsek Pupuan guna proses lebih lanjut dan dilaporkan ke Panwaslu Kec. Pupuan

Sumber : Polres Tabanan

Keterangan : Identitas nama diringkas



**PROSENTASE PEROLEHAN SUARA PARNPOL
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2004
DI KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA PARNPOL	JUMLAH PER DP				JUMLAH	PROSENTASE
		DP I	DP II	DP III	DP IV		
1	PNI MAHAENISME	1.289	1.091	1.888	1.622	5.890	2,13 %
2	PBSD	80	0	0	109	189	0,07 %
3	PBB	90	0	96	0	186	0,07 %
4	PARTAI MERDEKA	383	17	72	71	543	0,20 %
5	PPP	0	0	0	151	201	0,07 %
6	PDK	0	0	408	633	1.101	0,40 %
7	PIB	1.203	543	1.069	1.779	4.594	1,66 %
8	PNBK	507	920	1.240	927	3.594	1,30 %
9	PARTAI DEMOKRAT	2.103	0	2.702	2.749	7.554	2,73 %
10	PKPI	651	151	1.947	1.383	4.132	1,50 %
11	PPDI	136	0	0	231	367	0,13 %
12	PAN	220	0	0	325	545	0,20 %
13	PKPB	405	42	1.586	2.221	4.254	1,54 %
14	PKB	474	44	92	532	1.142	0,41 %
15	PKS	198	30	353	144	725	0,26 %
16	PDIP	49.004	61.885	43.133	54.289	208.311	75,38 %
17	PDS	137	20	32	192	381	0,14 %
18	PARTAI GOLKAR	11.245	5.531	8.079	6.098	30.953	11,20 %
19	P. PATRIOT PANCASILA	249	0	374	126	749	0,27 %
20	PSI	20	0	0	50	70	0,03 %
21	PPD	130	0	0	0	130	0,05 %
22	PARTAI PELOPOR	340	99	244	72	755	0,27 %
JUMLAH		68.864	70.373	63.315	73.704	276.366	100 %

Sumber : KPUD Tabanan

HASIL PEMILU TAHUN 2004 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

NAMA PARTAI	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN								JUMLAH
	Tabanan	Kediri	Marga	Baturiti	Penebel	Kerambitan	Selemadeg	Pupuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PIB	3	15	3	17	2	4	3	3	50
KRISNA	39	43	3	13	1	3	8	3	113
PNI	151	222	141	255	261	160	163	248	1601
PADI	5	15	4	0	1	3	2	2	32
KAMI	9	6	9	15	7	5	3	5	59
PUI	0	6	3	5	2	0	2	3	21
PKU	3	3	4	3	1	4	2	0	20
P. MASYUMI B	2	14	8	5	3	1	3	6	42
PPP	192	148	1	333	52	2	49	46	823
PSII	7	10	5	9	5	4	4	3	47
PDI PERJU	33126	34385	21967	24595	30827	2254	41869	21969	231292
PAY	23	52	17	13	11	10	10	11	147
PKM	0	7	7	3	6	1	4	3	31
PDKB	23	30	7	8	18	28	16	7	137
PAN	347	319	61	145	132	88	106	80	1278
PRD	19	27	16	7	9	4	1	8	91
PSII 1905	1	7	5	6	3	1	2	4	29
PKD	1	4	3	1	0	2	3	2	16
PILAR	0	4	2	2	1	3	2	1	15
PARI	6	7	6	14	4	8	2	3	50
MASYUMI	33	74	37	54	30	16	18	26	288
PBB	38	32	6	22	11	9	8	8	134
PSP	3	2	1	6	3	2	2	2	21
PK	4	5	0	3	3	1	3	1	20
PNU	8	19	1	8	10	7	2	4	59
PNI FM	100	178	101	124	103	63	100	142	911
PKI	34	134	51	15	30	49	10	32	355
PRD	45	126	416	296	243	183	40	29	1378
PID	4	1	5	2	1	3	2	4	22
PNI M.M.	107	174	111	148	89	60	100	123	912
MURBA	0	29	9	2	3	0	6	0	49
PDI PERJU	61	112	77	71	50	51	68	68	558
P. GOLKAR	3279	4125	2024	787	2429	3050	1794	1616	19104
PPP	37	18	4	19	3	3	5	5	94
PKB	709	506	17	231	60	65	100	101	1789
PUDI	9	9	8	2	16	3	4	2	53
PBN	8	10	5	12	7	6	10	5	63
MKGR	23	11	20	9	10	3	10	2	88
PDR	24	147	285	41	21	41	6	5	570
P CINTA D	7	12	2	5	6	0	2	17	51
PKP	633	729	317	267	275	466	165	154	3006

PSI	16	10	13	9	19	4	1	10	82
NBI	16	154	14	6	14	57	14	11	286
BI	23	10	8	5	6	9	2	7	70
SUNI	5	4	2	3	1	1	3	3	22
ND	24	34	27	20	14	17	14	13	163
UMI	3	1	1	2	1	1	1	1	11
PI	9	12	5	1	9	2	3	3	44
A SAH	39219	42002	25839	27619	34813	27057	4474	24801	266097
A TIDAK SAH	701	848	686	623	507	388	456	500	4709
TERPAKAI	1912	2104	1424	1410	1510	1364	1896	1240	12860
K	106	42	66	36	72	66	78	21	489
AHAN	303	1340	816	800	1107	813	1409	794	7382
AH SUARA	33920	42850	26525	28242	35320	27445	45203	25301	270806
NG DITERIMA	41938	44996	28017	29688	36902	28875	47177	26562	284155

: Panitia Pemilihan Kecamatan Tabanan
 : SS SURAT SUARA





Daftar Pertanyaan sebagai pembimbing untuk menelusuri konflik antar partai di Kabupaten Tabanan.

(Pertanyaan yang mengarah pada penelusuran sebab-sebab munculnya konflik)

- 1). Dalam pandangan Anda bagaimana konflik itu bisa muncul.
- 2). Apakah hal itu didorong oleh akibat terlalu dominannya kekuasaan Orde Baru?.
- 3). Apakah didorong oleh ketakutan berkurangnya suara kelak di dalam pemilu 2004.
- 4). Apakah konflik itu disebabkan secara temporal, karena peristiwa saat melakukan arak-arakan.
- 5). Mengapa PDI Perjuangan selalu terlibat konflik dengan partai-partai lainnya.
- 6). Mengapa konflik tersebut juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Tabanan.
- 7). Bagaimana pandangan Anda terhadap upaya seperti mencabut atribut partai lawan, atau melempari rumah simpatisan partai lawan serta cara-cara teror lainnya.
- 8). Bagaimana sikap partai Anda ketika terprovokasi konflik oleh partai lain
- 9). Di daerah mana saja simpatisan partai Anda mendapatkan gangguan dengan partai lain.

(Pertanyaan yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik)

- 1). Bagaimana upaya organisasi untuk mengatasi konflik dengan partai-partai lain.
- 2). Apakah elit-elit partai melakukan pendekatan kepada anggota akar rumput yang terlibat dalam konflik?

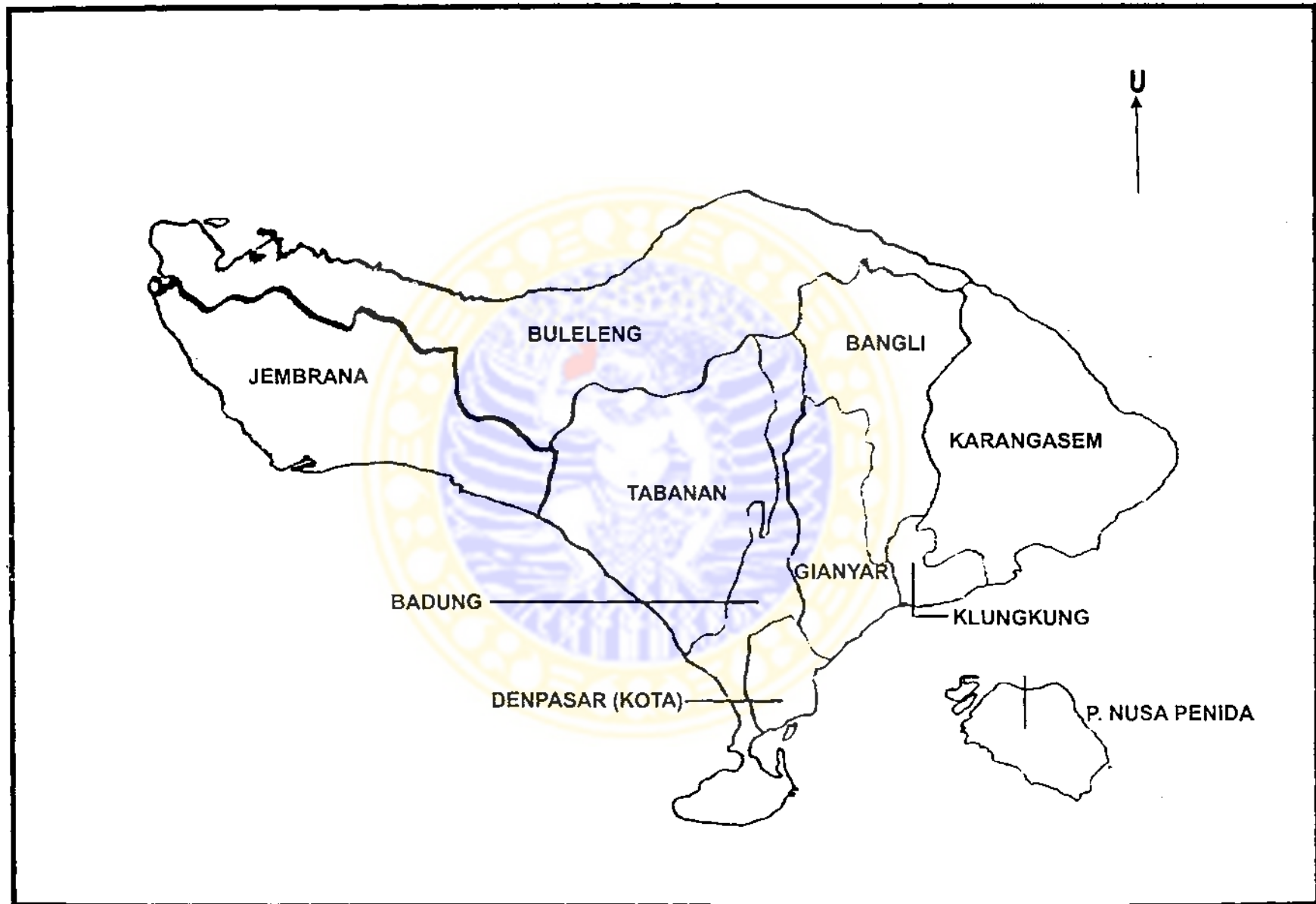
- 3). Jika ya, cara apa yang digunakan elit partai untuk meredam amarah kader.
- 4). Apakah elit partai melakukan pembicaraan dengan elit-elit partai lain yang terlibat konflik untuk berupaya meredam konflik tersebut?
- 5). Apakah ada komitmen dari anggota akar rumput untuk tidak mengulangi sikap demikian?





LAMPIRAN E
PETA PULAU BALI DAN KABUPATEN TABANAN

PETA PULAU BALI



Sumber : Diolah Dari Buku Peta Politik Pemerintah Propinsi Bali 2003

PETA KABUPATEN TABANAN



Keterangan :

1. Desa Tegallinggah
2. Kota Tabanan
3. Desa Abiantuwung
4. Desa Tunjuk
5. Desa Bongan Lebah

Sumber : Diolah Dari Buku Peta Politik Pemerintah Propinsi Bali 2003